

6141-96
13
Bag. Organisasi

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN 1995/1996 - 2005/2006**

RANCANGAN RENCANA



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

KATA PENGANTAR

Buku Rencana ini merupakan laporan keempat dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota IKK (*Ibukota Kecamatan*) Kedungpring, setelah laporan ketiga yang berupa Buku Analisa Data. Pelaksanaan penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Kedungpring ini dilaksanakan pada tahun anggaran 1995/1996.

Buku Rencana ini bertujuan untuk melaksanakan regional, potensi dan masalah, rumusan kebijaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RURK) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Kedungpring, rencana tata ruang (RURK), struktur tata ruang tiap BKK, pengembangan prasarana perkotaan serta pengembangan fungsi kegiatan tiap BKK. Disamping itu juga rencana struktur pelayanan, struktur kegiatan, kependudukan, pemanfaatan ruang tiap BKK, sistem perangkutan, sistem utilitas dan pengaturan bangunan semua tertuang pada Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota. Selain rumusan tersebut di atas adalah aspek pengelolaan pembangunan kota Kedungpring dan pembinaan administrasi pembangunan kota yang berisikan aspek-aspek pelaksanaan rencana, administrasi, pembiayaan, hukum dan tahapan prioritas pembangunan kota Kedungpring. Buku Rencana ini dimaksudkan untuk memberikan arahan perkembangan keadaan kota pada masa depan dan juga dasar bagi pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan selanjutnya dalam penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Kedungpring.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam rangka penyusunan buku Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Kedungpring ini diucapkan banyak terima kasih.

Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Halaman	i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		v
DAFTAR GAMBAR		vii
 BAB I PENDAHULUAN		1 - 1
1.1 Maksud, Tujuan dan Sasaran Rencana		1 - 1
1.1.1 Maksud, Tujuan Penyusunan Rencana		1 - 1
1.1.2 Sasaran Penyusunan Rencana		1 - 2
1.2 Pengertian Umum dan Dasar Hukum		1 - 2
1.2.1 Pengertian Umum		1 - 2
1.2.2 Dasar Hukum Penyusunan Rencana		1 - 3
1.3 Pendekatan Rencana		1 - 5
1.4 Dimensi waktu Perencanaan		1 - 5
1.5 Sistematika Penyusunan Perencanaan		1 - 5
 BAB II KARAKTERISTIK WILAYAH PERENCANAAN		11 - 1
2.1 karakteristik wilayah Kota Kedungpring		11 - 1
2.1.1 kedudukan Kota Dalam lingkup wilayah		11 - 1
2.1.2 Peranan Kota Kedungpring Dalam lingkup wilayah		11 - 2

	Halaman		Halaman
2.2 Karakteristik Internal Kota Ikk Kedungpring	11 - 6	3.2.3 Kebijakan Kependudukan	111 - 9
2.2.1 Karakteristik Fisik	11 - 6	3.2.4 Kebijakan Sistem Pusat Pelayanan	111 - 10
2.2.2 Karakteristik Kependudukan	11 - 7	3.2.5 Kebijakan Pengembangan Utilitas dan Fasilitas	111 - 10
2.2.3 Karakteristik Perumahan	11 - 9	3.2.6 Kebijakan Tata Bangunan	111 - 10
2.2.4 Karakteristik Transportasi	11 - 10	3.2.7 Kebijakan Sistem Transportasi	111 - 11
2.2.5 Karakteristik Sarana dan Prasarana	11 - 12	3.2.8 Penentuan Dimensi Waktu Perencanaan	111 - 11
2.3 Potensi dan Masalah Kota Ikk Kedungpring	11 - 14	3.3 Konsep Rencana	111 - 12
2.3.1 Kedudukan Kota dalam Masalah Struktur Regional	11 - 14	3.3.1 Sistem Pusat Pelayanan	111 - 12
2.3.2 Penduduk dan Kegiatannya	11 - 14	3.3.2 Sistem Struktur Kegiatan Kota	111 - 12
2.3.3 Wilayah Potensial Pengembangan Kota	11 - 16	3.3.3 Sistem Jaringan Jalan	111 - 14
2.3.4 Permasalahan Struktur Tata Ruang Kota Ikk Kedungpring	11 - 22	3.4 Rencana Unit Lingkungan dan Pusat Pelayanan	111 - 14
2.3.5 Sistem Transportasi	11 - 22	3.5 Rencana Struktur Kegiatan	111 - 14
2.3.6 Fasilitas Kota	11 - 23	3.6 Kapasitas Tampung BwK	111 - 16
2.3.7 Utilitas Kota	11 - 23	3.7 Rencana Penggunaan Lahan	111 - 16
2.3.8 Administrasi dan Pengelolaan Pembangunan	11 - 24	3.8 Rencana pengembangan obyek khusus	111 - 19
2.4 Peningkatan Fungsi dan Peranan Kota Ikk Kedungpring	11 - 24	3.8.1 Rencana Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	111 - 19
2.4.1 Peranan yang diharapkan dari Kota Ikk Kedungpring di dalam kebijaksanaan Regional Wilayah	11 - 25	3.8.2 Rencana Pengembangan Industri dan Perdagangan	111 - 22
2.4.2 Peningkatan Peranan Kota Ikk Kedungpring sebagai Pusat Kegiatan Wilayah	11 - 25	3.9 Rencana Tata Bangunan	111 - 22
BAB III RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA IKK KEDUNGPRING	111 - 1	3.9.1 Pengaturan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	111 - 22
3.1 Kebijakan Pengembangan Wilayah	111 - 1	3.9.2 Pengaturan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	111 - 22
3.1.1 Kebijakan Regional Jawa Timur	111 - 1	3.9.3 Pengaturan Garis Sempadan	111 - 23
3.1.2 Kebijakan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan	111 - 2	3.10 Rencana Pengembangan Sistem Transportasi	111 - 23
3.1.3 Kebijakan Sektor	111 - 4	3.11 Rencana Pengembangan Utilitas Kota	111 - 24
3.2 Kebijakan Dasar Rencana	111 - 4	3.11.1 Air Bersih	111 - 24
3.2.1 Penentuan Fungsi dan Peranan Kota Ikk Kedungpring	111 - 7	3.11.2 Penyaluran air buangan	111 - 26
3.2.2 Kebijakan Penentuan Strategi Dasar Pengembangan Sektor-sektor Kegiatan Kota	111 - 8	3.11.3 Pengelolaan Sampah	111 - 30
		3.11.4 Rencana Pengembangan Jaringan Listrik	111 - 35
		3.11.5 Rencana Pengembangan Jaringan Telepon	111 - 35

	Halaman
3.12 Rencana Pemanfaatan Air Baku	III - 35
3.12.1 Rencana Pemanfaatan Air Permukaan ...	III - 35
3.12.2 Air Tanah	III - 38
3.13 Rencana Sistem Fasilitas Kota	III - 38

BAB IV RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IKN KEDUNGPRING.. IV - 1

4.1 Wilayah Perencanaan	IV - 1
4.2 Rumusan kebijaksanaan Dasar Rmk	IV - 1
4.2.1 Penentuan Fungsi Bagian Wilayah Kota	IV - 2
4.2.2 Penentuan Struktur Bagian Wilayah Kota	IV - 2
4.2.3 Penentuan Jenis dan Intensitas Prasarana dan Sarana Utama	IV - 2
4.2.4 Kapadatan Penduduk	IV - 4
4.2.5 Pengembangan Fasilitas dan Utilitas ..	IV - 4
4.3 Rencana Detail Tata Ruang Kota Ikn Kedung- pring	IV - 5

4.3.1 Indikasi Pembagian Unit-unit Lingkung- an Rmk	IV - 6
4.3.2 Rencana Kapadatan Penduduk	IV - 6
4.3.3 Rencana Pemanfaatan Ruang pada Bagian Wilayah Kota	IV - 6
4.3.3.1 Pemanfaatan Ruang untuk Masing masing Peruntukan Tiap Rmk ..	IV - 9
4.3.3.2 Ketentuan-ketentuan/persyaratan Kegiatan Penunjang Fungsi Utama Rmk	IV - 17
4.3.4 Rencana Sistem Transportasi	IV - 18
4.3.5 Rencana Sistem Utilitas	IV - 27
4.3.6 Rencana Pengaturan Bangunan	IV - 42

BAB V ASPEK PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KOTA KEDUNGPRING V - 1

5.1 Tahapan dan Prioritas Pembangunan	V - 1
5.2 Arahan Penanganan Lingkungan	V - 6
5.3 Indikasi Program dan Proyek Pendanaan	V - 6

5.4 Aspek Kelembagaan Pembangunan	V - 7
5.4.1 Organisasi Fungsional Otonomi Daerah Vertikal	V - 8
5.4.2 Tata Kerja Aparatur Pelaksanaan	V - 8
5.5 Aspek Hukum Pelaksanaan Rencana	V - 11

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
2.2-1	Penggunaan Lahan Kota Kedungpring Tahun 1994 ...	ii - 6
2.2-2	Jumlah dan Type Rumah Kota Kedungpring Tahun 1994	ii - 7
2.2-3	Sebaran Kepadatan dan Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Kedungpring Tahun 1950-1994	ii - 8
2.2-4	Perubahan Penduduk Kota Kedungpring Tahun 1994 .	ii - 8
2.2-5	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kota Kedungpring Tahun 1994	ii - 8
2.2-6	Struktur Umur Penduduk Kota Kedungpring Tahun 1994	ii - 8
2.2-7	Struktur Pemeluk Agama Kota Kedungpring Tahun 1994	ii - 9
2.2-8	Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Kedungpring Tahun 1994	ii - 9
2.2-9	Struktur Mata Pencarian Kota Kedungpring Tahun 1994	ii - 9
2.2-10	Produksi Tanaman Pangan Kota Kedungpring Tahun 1994	ii - 10
2.2-11	Produksi Tanaman Perkebunan Kota Kedungpring Tahun 1994	ii - 10
2.2-12	Jumlah Ternak Kota Kedungpring Tahun 1994	ii - 11
2.2-13	Jumlah Industri/Kerajinan Rakyat dan Produksi Kota Kedungpring Tahun 1994	ii - 11
2.2-14	Jumlah Pemilikan Kendaraan Kota Kedungpring Tahun 1994	ii - 11

Nomor	Judul Tabel	Halaman	Nomor	Judul Tabel	Halaman
2.2-15	Jumlah Fasilitas Pendidikan Kota Kedungpring Tahun 1994	II -12	4.3-2	Rencana Distribusi dan Kepadatan Bangunan Kota Kota Kedungpring Tahun 2005/2006	IV -11
2.2-16	Jumlah Fasilitas Peribadatan Kota Kedungpring Tahun 1994	II -13	4.3-3	Rencana Penggunaan Lahan Tiap BUK Kota Kedungpring Tahun 2005/2006	IV -23
2.2-17	Jumlah Fasilitas Kesehatan Kota Kedungpring Tahun 1994	II -13	4.3-4	Keuntungan dan Kerugian Sistem Pengelolaan Air Limbah	IV -38
2.2-18	Jumlah Fasilitas Perdagangan dan Jasa Kota Kedungpring Tahun 1994	II -13	4.3-5	Kriteria Pemilihan Sistem Berdasarkan Kondisi Air Tanah	IV -42
2.3-1	Perkiraan Jumlah Penduduk	II -15	4.3-6	Rencana Ketentuan Koefisien Dasar Bangunan Kota Kedungpring Tahun 2005/2006	IV -55
2.3-2	Simpangan Proyeksi Regresi Linier	II -15	4.3-7	Rencana Ketetapan Bangunan Kota Kedungpring Tahun 2005/2006	IV -55
2.3-3	Simpangan Proyeksi Bunga Berganda	II -15	4.3-8	Rencana Ketentuan Koefisien Lantai Bangunan Kota Kedungpring Tahun 2005/2006	IV -55
2.3-4	Simpangan Proyeksi Polinomial	II -15	4.3-9	Ketentuan Garis Sempadan Bangunan Minimum	IV -56
2.3-5	Perkiraan Jumlah Penduduk Per desa	II -15	4.3-10	Pengaturan Sempadan Bangunan (Ruang Terbuka) Wilayah Potensial Pengembangan Kota IKK Kedungpring, 2005/2006	IV -16
2.3-6	Wilayah Potensial Pengembangan Kota IKK Kedungpring, 2005/2006	II -16			
-56					
3.4-1	Karakteristik Kegiatan Kota Kedungpring yang akan dikembangkan Tahun 2005/2006	III -13	5.1-1	Kriteria Penentuan Bobot Kepentingan Program-program Pembangunan	V -2
3.7-1	Kebutuhan dan Penambahan Penyediaan Ruang di Kota Kedungpring Tahun 1994/1995 - 2005/2006	III -19	5.1-2	Penentuan Bobot Program Pembangunan	V -4
3.7-2	Kebutuhan Penyediaan Fasilitas dan Ruang di Kota IKK Kedungpring Tahun 1995/1996 - 2005/2006	III -20	5.1-3	Urutan Program Pengembangan Pembangunan	V -5
3.9-1	Rencana Pengaturan Bangunan Kota Kedungpring Tahun 2005/2006	III -23	5.3-1	Prioritas Program Pembangunan	V -7
3.11-1	Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah di Kota Kedungpring Tahun 1995/1996 - 2005/2006	III -32			
4.2-1	Daya Tampung setiap BUK Tahun 2005/2006	IV -4			
4.3-1	Rencana Distribusi dan Kepadatan Penduduk Kota Kota Kedungpring Tahun 2005/2006	IV -11			

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
II - 1	Orientasi Kabupaten Lamongan	II - 3
II - 2	Orientasi Kecamatan Kedungpring	II - 4
II - 3	Orientasi Wilayah Perencanaan	II - 5
II - 4	Batas Administrasi	II - 17
II - 5	Penggunaan Lahan	II - 18
II - 6	Arah Kecenderungan Perkembangan Kota	II - 19
II - 7	Analisis Fisik Kota	II - 20
II - 8	wilayah Potensial Pengembangan Kota	II - 21
III - 1	Perwilayahan Pembangunan Propinsi Jawa Timur ...	III - 3
III - 2	Perwilayahan Pembangunan Kabupaten Lamongan	III - 5
III - 3	Hubungan Fungsional Antar Kegiatan Ruang Kota di Kota Kedungpring Tahun 2005/2006	III - 13
III - 4	Rencana Pembagian Unit Lingkungan dan Pusat Pelayanan	III - 15
III - 5	Rencana Struktur Kegiatan Kota	III - 17
III - 6	Rencana Penggunaan Lahan	III - 21
III - 7	Rencana Pengembangan Jaringan Jalan	III - 25
III - 8	Rencana Struktur Jaringan Jalan	III - 26
III - 9	Rencana Pola Perangkutan dan Fasilitas Transport	III - 27
III - 10	Rencana Pengembangan Jaringan Air Bersih	III - 29
III - 11	Rencana Saluran Drainase	III - 31
III - 12	Diagram Pengelolaan Sampah	III - 33
III - 13	Rencana Sistem Pembuangan Sampah	III - 34

Nomor	Judul Gambar	Halaman	Nomor	Judul Gambar	Halaman
III -14	Rencana Pengembangan Jaringan Listrik.....	III -36	IV -20	Rencana Sistem Pembuangan Sampah BWK B	IV - 44
III -15	Rencana Jaringan Telepon.....	III -37	IV -21	Rencana Pengaturan Bangunan BWK A	IV - 47
III -16	Rencana Sebaran Fasilitas Pelayanan Umum	III -40	IV -22	Rencana Pengaturan Bangunan BWK B	IV - 48
IV - 1	Rencana Unit Lingkungan & pusat Pelayanan BWK A	IV - 7			
IV - 2	Rencana Unit Lingkungan & pusat Pelayanan BWK B	IV - 8			
IV - 3	Rencana Distribusi Kepadatan Penduduk BWK A ...	IV - 10			
IV - 4	Rencana Distribusi Kepadatan Penduduk BWK B	IV - 11			
IV - 5	Rencana Struktur Kegiatan BWK A	IV - 12			
IV - 6	Rencana Struktur Kegiatan BWK B	IV - 13			
IV - 7	Rencana Penggunaan Lahan BWK A	IV - 22			
IV - 8	Rencana Penggunaan Lahan BWK B	IV - 23			
IV - 9	Rencana Struktur Jaringan Jalan BWK A	IV - 25			
IV -10	Rencana Struktur Jaringan Jalan BWK B	IV - 26			
IV -11	Rencana Jaringan Air Bersih BWK A	IV - 30			
IV -12	Rencana Jaringan Air Bersih BWK B	IV - 31			
IV -13	Rencana Jaringan Drainase BWK A	IV - 33			
IV -14	Rencana Jaringan Drainase BWP B	IV - 34			
IV -15	Rencana Jaringan Listrik BWK A	IV - 37			
IV -16	Rencana Jaringan Listrik BWK B	IV - 38			
IV -17	Rencana Jaringan Telepon BWK A	IV - 39			
IV -18	Rencana Jaringan Telepon BWK B	IV - 40			
IV -19	Rencana Sistem Pembuangan Sampah BWK A	IV - 43			

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud, Tujuan dan Sasaran Rencana

1.1.1 Maksud, Tujuan Penyusunan Rencana

Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Kedungpring bertujuan :

1. Untuk meningkatkan fungsi dan peranan kota ibukota Kecamatan Kedungpring dalam perimbangan wilayah yang lebih luas. Dalam hal ini pengembangan kota kecamatan ditujukan agar mampu berfungsi sebagai pusat atau sub pusat pengembangan dalam sistem pengembangan wilayah SWP II Babat.
2. Untuk dapat menciptakan pola tata ruang kota kecamatan yang serasi dan optimal, serta penyebaran fasilitas dan utilitas secara tepat dan merata sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, tanpa mengabaikan usaha peningkatan kualitas lingkungan kehidupan kota dan norma-norma yang berlaku.
3. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah pada umumnya.

1.1.2 Sasaran Penyusunan Rencana

Bertitik tolak dari tujuan penyusunan tersebut di atas, sasaran yang ingin dicapai dari penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Kedungpring adalah :

1. Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Kedungpring akan memberikan kepastian hukum dalam hal pemanfaatan ruang. Kepastian hukum merupakan salah satu faktor penting dalam merangsang partisipasi masyarakat (investor) untuk melakukan investasi di Ibukota Kecamatan Kedungpring, terutama di bidang Agro Industri.

2. Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Kedungpring akan berfungsi sebagai instrumen pengendali pertumbuhan dan keserasian lingkungan Ibukota Kecamatan Kedungpring, baik melalui pengawasan dan/atau perijinan maupun tindakan penertiban.

1.2 Pengertian Umum dan Dasar Hukum

1.2.1 Pengertian Umum

Pengertian dasar yang terangkum dalam suatu rencana kota khususnya Rencana Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 050.06/1695/SJ Tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Kota di daerah adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan kota adalah kegiatan penentuan konsepsi perumusan dan penyusunan rencana kota dalam rangka mewujudkan bentuk suatu kota yang berwawasan lingkungan hidup, berasaskan kelestarian dan pelestarian serta peningkatan kemampuan lingkungan secara serasi dan seimbang untuk dapat menunjang pembangunan yang berkesinambungan:

2. Rencana kota adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis, baik yang ditetapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi di wilayah kota termasuk ruang dilaksanainya serta merupakan pedoman pengarah dan pengendalian pelaksanaan pembangunan kota.

3. Ibukota kecamatan adalah ibukota dari kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah yaitu pusat pemerintahan dari kecamatan yang bersangkutan.

4. Rencana tata ruang ibukota kecamatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari pola dasar pembangunan daerah tingkat II khususnya dalam hal pemanfaatan ruang.

5. Rencana tata ruang ibukota kecamatan mempunyai ruang lingkup sebagai suatu rencana kota yang mencerminkan strategi pembangunan kota dalam kurun waktu 10 tahun serta dijabarkan dalam skala prioritas 5 tahun sekali yang sejalan dengan pelaksanaan pembangunan 5 tahun daerah tingkat II dan pembangunan 5 tahun daerah tingkat I.

6. Rencana tata ruang ibukota kecamatan merupakan rencana tata ruang kota yang mendasari strategi pembangunan fisik kota sesuai jenis rencana kota yang disebut dalam Perendagri Nomor 2 Tahun 1987 tentang penyusunan rencana kota.

Dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota sendiri pengertian dari masing-masing perencanaan adalah sebagai berikut :

A. Rencana Umum Tata Ruang Kota.

1. Rencana Umum Tata Ruang Kota adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program pembangunan kota.

2. Rencana Umum Tata Ruang Kota mempunyai ruang lingkup sebagai suatu rencana kota yang mencerminkan suatu strategi pengembangan kota dalam kurun waktu 10 tahun serta dapat dijabarkan dalam skala prioritas 5 tahun sekali yang sejalan pula dengan pelaksanaan pembangunan lima tahun Daerah Tingkat I dan pembangunan lima tahun nasional (Repelita).

3. Rencana Umum Tata Ruang Kota merupakan rencana tatq ruang kota yang mendasari strategi pembangunan fisik kota baik yang menyangkut perencanaan tata ruang yang sifatnya lebih terinci seperti Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Teknik Ruang Kota.

B. Rencana Detail Tata Ruang Kota.

1. Rencana Detail Tata Ruang Kota adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk menyiapkan

perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan program-program pembangunan kota.

2. Rencana Detail Tata Ruang Kota memuat rumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang kota yang disusun dan ditetapkan untuk menyiapkan perwujudan ruang bagian-bagian wilayah kota dalam rangka pelaksanaan program dan pengendalian pembangunan kota, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat dalam jangka panjang dan jangka menengah.

3. Pada prinsipnya RUTRK merupakan rencana yang mendukung pengertian upaya penetapan intensitas penggunaan ruang yang setiap bagian-bagian wilayah yang sesuai dengan fungsinya di dalam struktur tata ruang kota secara keseluruhan.

4. Didalam kaitannya dengan urutan penyusunan rencana kota maka RUTRK pada hakekatnya juga merupakan dasar pertimbangan bagi penyusunan Rencana Teknik Tata Ruang kota yang mencakup ketentuan mengenai kerangka materi pokok bagi penyusunan Rencana Teknik Tata Ruang kota.

1.2.2 Dasar Hukum Penyusunan Rencana

Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Kedungpring berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;
12. Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kegiatan Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan perencanaan dan pengendalian Pembangunan di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 650-1595 dan Nomor 503/Kpts/1985 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Perencanaan Kota;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota;
19. Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 650/607/201.3/89 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rencana Kota di Jawa Timur tanggal 7 Juni 1989.
20. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 050.06/1685/SJ Tanggal 22 Juni 1990 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Kota di Daerah .
21. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 09 Tahun 1990 tentang Tata Ruang Jawa Timur;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan No 20 Tahun 1988 Tentang Batas Wilayah Kota dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan No 1 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

1.3. Pendekatan Rencana

Dalam penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Kedungpring didiakan pendekatan perencanaan akan mempertimbangkan :

1. Tiga aspek pokok pendekatan, yang terdiri dari :
 - a. Aspek strategis meliputi kebijaksanaan dasar penentuan fungsi kota pengembangan dan perencanaan tata ruang kota yang merupakan penjabaran atau pengisian dari rencana-rencana pembangunan nasional dan daerah dalam jangka panjang.
 - b. Aspek teknis meliputi kebijaksanaan dasar yang ditujukan untuk menyediakan dan mengoptimalkan pola tata ruang kota memberikan fasilitas dan utilitas secara tepat, mendayagunakan pola transportasi dan meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman dan menjaga kelestarian lingkungan.
 - c. Aspek pengelolaan kota meliputi kebijaksanaan dasar perencanaan dengan mempertimbangkan aspek hukum dan pembangunan serta administrasi kota agar rencana dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan pembayasan pembangunan.
2. Asas manfaat, pemerataan, keseimbangan pertumbuhan serta kelestarian maupun hubungan antara kota Kedungpring dengan daerah sekitarnya terutama dengan kota Cibat dan Lamongan yang menjadi kutub pertumbuhan.
3. Perumusan rencana kotanya berdasarkan tumbuh dan berkembangnya kota serta watak kota kecamatan Kedungpring itu sendiri.

1.4. Dimensi Waktu Perencanaan.

Jika Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Kedungpring itu dikaitkan dengan pembatas waktu, maka kemampuan dalam memperkirakan ketepatan akan suatu rencana tata ruang kota yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis planologis dan sesuai dengan UU No 24 tahun 1992 adalah maksimum untuk tenggang waktu 10 tahun mendatang. Adapun tahapan kegiatan prioritas pelaksanaan pembangunan untuk tenggang waktu 5 tahun disesuaikan dengan rencana pembangunan lima tahun nasional maupun Daerah. Dengan demikian bagi kota Kedungpring yang penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kotanya pada tahun 1995/1996 akan disusun sampai dengan tahun 2005/2006 dengan penitahapan sebagai berikut :

- Tahap I : tahun 1995/1996 - 1996/1999.
- Tahap II : tahun 1999/2000 - 2003/2004.
- Tahap III : tahun 2004/2005 - 2005/2006.

1.5 Sistematisa Penyusunan Perencanaan .

Di dalam penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Kedungpring penyusunan buku rencana ini meliputi 5 bab pembahasan, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan mengenai maksud, tujuan dan sasaran penyusunan, pengertian umum dan dasar hukum, pendekatan rencana dan dimensi waktu perencanaan.

BAB II : KARAKTERISTIK WILAYAH PERENCANAAN

Tinjauan karakteristik wilayah Kota Kedungpring, potensi, masalah, fungsi dan peranan Kota kedungpring.

BAB III : RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA IKK KEDUNGPRING

Berisikan mengenai kebijaksanaan pengembangan wilayah, kebijaksanaan dasar rencana, konsepsi rencana, rencana unit lingkungan dan pusat pelayanan, rencana struktur kegiatan, kapasitas tampung BWK, rencana penggunaan lahan, rencana pengembangan obyek khusus, tata bangunan, transportasi dan utilitas.

BAB IV : RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IKK KEDUNGPRING

Berisikan mengenai wilayah perencanaan, rumusan kebijaksanaan dasar BWK dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Kedungpring.

BAB V : ASPEK PENGELOLAAN PEMBANGUNAN KOTA IKK KEDUNGPRING

Berisikan tahapan dan prioritas pembangunan, arahan penanganan lingkungan, indikasi program dan pembiayaan pembangunan, aspek kelembangaan pembangunan dan aspek hukum pelaksanaan rencana.

BAB II

KARAKTERISTIK WILAYAH PERENCANAAN

Sebelum menginjak kepada tahapan penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota IKK Kedungpring, berikut ini akan dikemukakan secara ringkas pokok-pokok pembahasan yang dirangkum dari buku sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah menyusun rencana yang akan dihasilkan.

Adapun pokok-pokok hasil analisis yang akan dibahas meliputi Karakteristik wilayah Kota IKK Kedungpring, Karakteristik internal kota serta Potensi dan permasalahan kota.

2.1 Karakteristik Wilayah Kota IKK Kedungpring

2.1.1 Kedudukan Kota dalam Lingkup Wilayah

Dalam lingkup yang lebih luas, Kota IKK Kedungpring dengan wilayah sekitarnya membentuk suatu sistem perwilayahan yang pola pembangunannya saling berkaitan satu sama lain. Dengan demikian, pertumbuhan dan perkembangan Kota IKK Kedungpring secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh kedudukan kota didalam struktur pengembangan wilayah regional.

Kota IKK Kedungpring sebagai ibukota kecamatan IKK Kedungpring berada di dalam wilayah administratif Kecamatan Kedungpring Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Kota IKK Kedungpring terletak ± 28 km Sebelah Barat Kota Lamongan, dilalui oleh jalur jalan kabupaten (Lokal Primer) ke arah utara menuju Kota Babat, ke arah timur menuju Kecamatan Sugio (Obyek Wisata Waduk Gondang), ke arah selatan menuju Kecamatan Modo dan ke arah barat menuju jalan Kolektor Primer Babat-Ploso sehingga lokasinya mempunyai akses yang cukup tinggi terhadap hubungan regional. Hal ini tentunya akan mendukung peranan dan fungsi Kota Kedungpring sebagai simpul koleksi dan distribusi bagi wilayah belakangnya.

Wilayah administrasi kota IKK Kedungpring berdasarkan Perda No 20 Tahun 1988 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota meliputi wilayah seluas 1.304,20 Ha, mencakup 4 desa, yaitu :

- Desa Kedungpring seluas : 419,70 Ha.
- Desa Tlanak seluas : 325,60 Ha.
- Desa Mekanderejo seluas : 290,60 Ha.
- Desa Kandangrejo seluas : 268,30 Ha.

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Sukomalo, Desa Sumengko dan Desa Karangcangkring.
- Sebelah Selatan : Desa Mlati.
- Sebelah Timur : Desa Sidobangun, Blawirejo dan Desa Majenang.
- Sebelah Barat : Desa Warungring dan Desa Jatidirojog.

Untuk lebih jelasnya mengenai lokasi dan posisi dari Kota IKK Kedungpring dalam struktur regional Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dan Kecamatan Kedungpring, dapat dilihat pada Gambar II - 1 sampai dengan Gambar II - 3 (Orientasi).

2.1.2 Peranan Kota IKK Kedungpring dalam Lingkup Wilayah

Kecamatan Kedungpring sebagai bagian dari SWP II Lamongan yang berpusat di Babat, sehingga Peranan Kota IKK Kedungpring dalam lingkup wilayah adalah sebagai pendukung SWP II yang berpusat di Babat dan lebih luas lagi sebagai pendukung Kota Lamongan, atas dasar peranan tersebut, sektor-sektor yang ada di Kota IKK Kedungpring sangat dipengaruhi oleh sektor-sektor yang ada dalam wilayah pengaruhnya (daerah belakang/hinterland). Akan tetapi di pihak lain, sektor-sektor yang ada di kota IKK Kedungpring harus mampu memenuhi kebutuhan sendiri, juga harus mampu mendukung (memenuhi) kebutuhan wilayah pengaruhnya yaitu desa-desa yang ada di kecamatan Kedungpring. Dengan demikian terlihat adanya saling ketergantungan antara sektor-sektor kegiatan yang ada di kota IKK Kedungpring dan sektor-sektor lain yang ada di dalam wilayah pengaruhnya.

Dalam lingkup yang lebih kecil (kecamatan), Kota IKK Kedungpring bertanggung jawab mengadakan hubungan kegiatan sektoral yang timbal balik dengan wilayah pengaruhnya (desa-desa dalam kecamatan Kedungpring) dan lingkup lebih luas sebagai mendukung pelayanan dan fasilitas yang memadai dalam SWP II.



**PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IKK KEDUNGPRING
TAHUN 1995/1996 - 2005/2006

**PETA ORIENTASI
KABUPATEN LAMONGAN**

KETERANGAN :

- 13. 1 GERBANGKERTOSUSILA
 - 13. 2 MADURA
 - 13. 3 BANYUWANGI
 - 13. 4 JEMBER
 - 13. 5 PROBOLINGGO, LUMAJANG
 - 13. 6 MALANG, PASURUAN
 - 13. 7 KEDIRI
 - 13. 8 MADIUN
 - 13. 9 TUBAN, BOJONEGORO
- BATAS SWP.
 - IBUKOTA PROPINSI
 - IBUKOTA KABUPATEN/KODYA
 - KABUPATEN LAMONGAN

SUMBER : BAPPEDATRI JAWA TIMUR :

GAMBAR : II - 1

DIGAMBAR : *[Signature]*

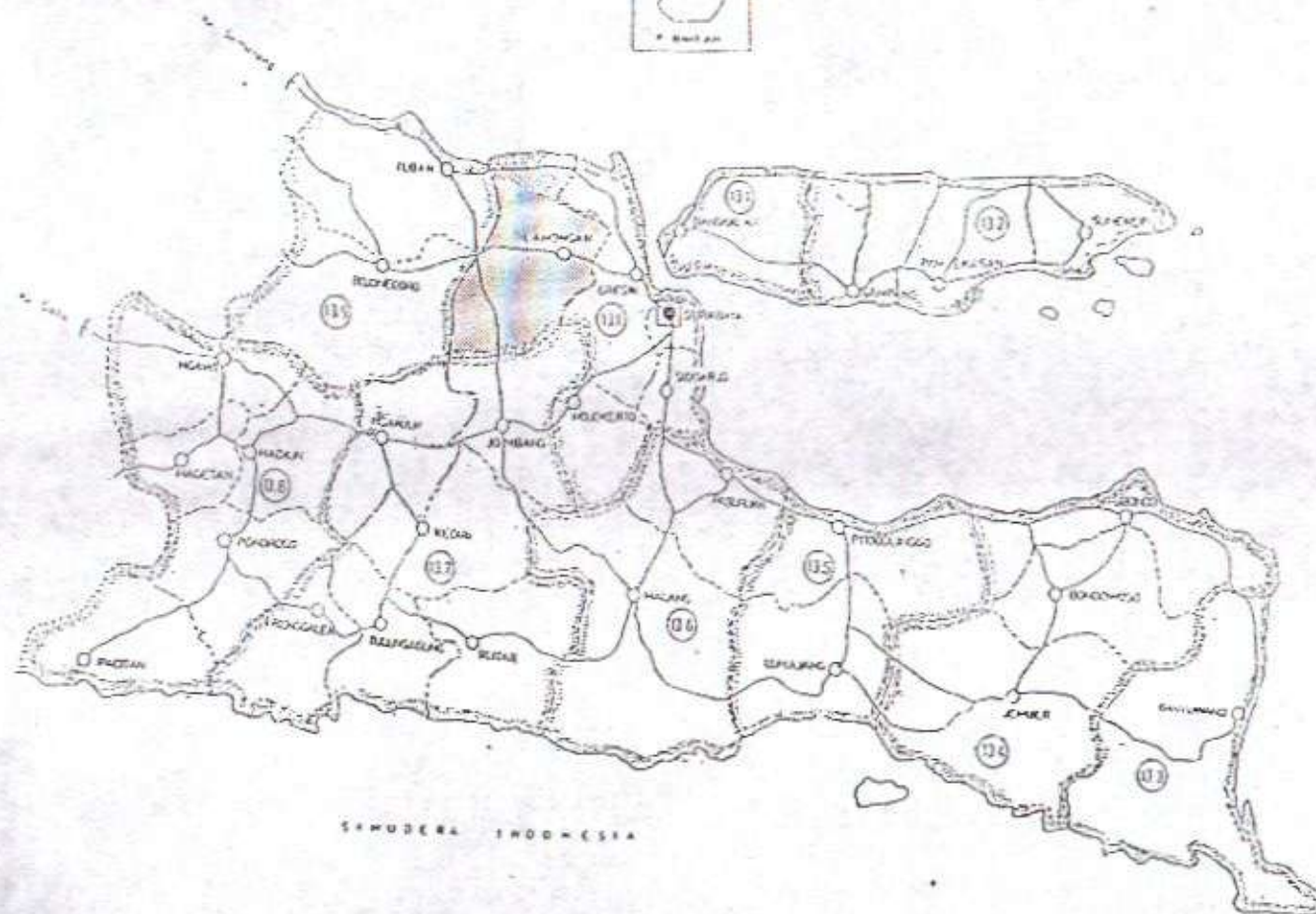
DIPERIKSA :



UTARA

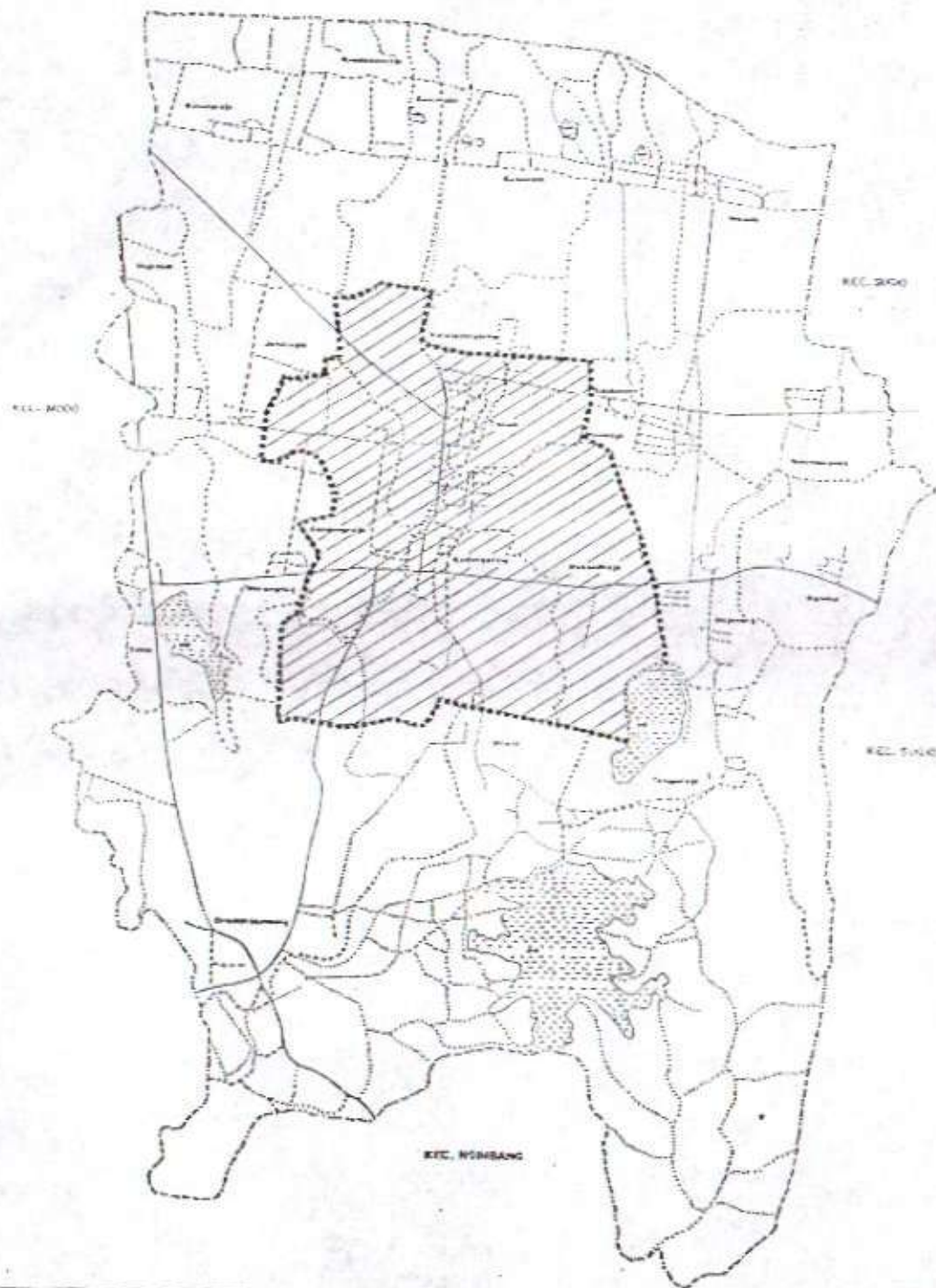
SKALA

1 : 1:150000



S K A L A
0 12 36 51 85 KM





PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IKA KEDUNGPURING
TAHUN 1995/1996 - 2005/2006

PETA ORIENTASI
WILAYAH PERENCANAAN



KOTA IKA KEDUNGPURING

SUNGER : BPN



GAMBAR : II - 3

DIGAMBAR : *[Signature]*

DIPERIKSA :



PTARA

SKALA

1:75000

2.2 Karakteristik Internal Kota IKK Kedungpring

2.2.1 Karakteristik Fisik

a. Kondisi Fisik Dasar

Sebagian besar wilayah Kota IKK Kedungpring terletak pada lahan datar. Secara umum, ketinggian lahan berkisar antara 0 % sampai dengan 2 % dan tidak menunjukkan adanya perbedaan ketinggian lahan yang cukup menyolok. Ketinggian lahan berkisar 25 m di atas permukaan air laut.

Pada umumnya aliran sungai/kali yang ada untuk memenuhi berbagai kepentingan penduduk setempat, seperti mengairi sawah, pembuangan/air hujan.

Air tanah di Kota IKK Kedungpring relatif dangkal antara 6 sampai 8 meter dari permukaan tanah yang umumnya rasanya tawar yang dapat dipergunakan untuk air minum, disamping itu Kota IKK Kedungpring terdapat sumber air yang cukup besar yang telah dieksplotasi untuk kebutuhan air bersih bagi warga Kota Kedungpring yang dikelola oleh PDAM.

Seperti halnya tempat-tempat lain di Jawa Timur, Kota IKK Kedungpring juga mengalami dua musim dalam waktu setahun, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan pada umumnya jatuh antara bulan Oktober sampai dengan April dan musim kemarau antara bulan April sampai dengan Oktober. Curah hujan tertinggi di Kota IKK Kedungpring pada umumnya jatuh pada bulan Desember sampai Januari. Suhu udara Kota IKK Kedungpring menjadi cukup tinggi terutama pada bulan-bulan Agustus hingga September.

Kawasan terbangun Kota Kedungpring dibatasi oleh lahan pertanian produktif berupa sawah pengairan teknis dan selengah teknis, sehingga dapat menjadi pembatas dalam pengembangan kota.

b. Pola Penggunaan Lahan dan Struktur Kegiatan.

Secara administrasi Kota IKK Kedungpring mempunyai wilayah seluas 1.304,20 Ha, dengan pola penggunaan tanah sebagai berikut. Penggunaan perumahan seluas 104.800 Ha (7,900 %). Juga untuk fasilitas-fasilitas lain seperti pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, peribadatan dan fasilitas umum lainnya. Sedangkan lahan sawah sebagian besar sawah irigasi teknis dan tegalan/ladang. Lihat Tabel 2.2-1.

TABEL : 2.2-1

PENGUNAAN LAHAN KOTA KEDUNGPRING TAHUN 1994

No.	Jenis Fasilitas	Luas Lahan (Ha)	Luas Lahan (%)
1.	Fasilitas Pendidikan	16.890	1.448
2.	Fasilitas Kesehatan	0.240	0.016
3.	Fasilitas Peribadatan	0.725	0.056
4.	Fasilitas Perdagangan	2.070	0.159
5.	Fasilitas rekreasi dan olahraga	0.375	0.029
6.	Perkantoran	2.540	0.195
7.	Kebudayaan	0.840	0.064
8.	Perumahan	103.030	7.900
9.	Industri/perdagangan	0.500	0.038
10.	Kuburan/makam etc	2.000	0.153
11.	Ruang Terbuka Hijau	17.672	1.355
12.	Transportasi	37.220	2.854
13.	Sawah Teknis	927.390	71.106
14.	Sawah 1/2 Teknis	33.310	2.554
15.	Sawah non Teknis	52.598	4.033
16.	Tegalan	104.800	8.036
17.			
KEBUTUHAN LAHAN (Ha)		1.304.200	100.000

Sumber : Potensi Desa dan Monografi Kecamatan

Berdasarkan pola penggunaan lahan tersebut, maka struktur kegiatan Kota Kedungpring secara garis besar ada dua, yaitu :

- Kegiatan Primer (perdagangan regional/pasar umum)
- Kegiatan Sekunder, meliputi kantor pemerintahan, pelayanan umum (pendidikan, kesehatan, peribadatan, kebudayaan dan olah raga).

c. Kondisi lingkungan permukiman

Berdasarkan tipe rumah di Kota Kedungpring menunjukkan sebagian besar tipe C (60 %) menunjukkan bahwa lingkungan permukiman masih kondisi sedang sampai buruk, sedangkan 40 % tipe A dan B dengan kondisi sedang sampai baik. lebih jelasnya lihat pada Tabel 2.2-2.

TABEL : 2.2-2

JUMLAH DAN TIPE RUMAH KOTA KEDUNGPRING TAHUN 1994

No.	Desa	Jumlah Rumah (Bua)	Tipe Rumah (Bua)		
			Tipe A	Tipe B	Tipe C
1	Kedungpring	715	73	141	501
2	Tianak	731	40	325	366
3	Mekanderejo	501	25	204	272
4	Kandangrejo	514	50	130	334
Kota Kedungpring		2.461	188	800	1.473

Sumber : Potensi Desa dan Monografi Kecamatan

2.2.2 Karakteristik Kependudukan

Secara administratif Kota IKK Kedungpring mempunyai luas 1.304,20 Ha dengan penduduk pada tahun 1994 sejumlah 11.781 jiwa (berdasarkan data Potensi Desa dan Monografi Kecamatan).

Penybaran penduduk Kota IKK Kedungpring menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang terbanyak berada di Desa Tianak yaitu 3.582 jiwa, disusul Desa Kedungpring 3.365 jiwa, sedangkan desa dengan jumlah penduduk terendah berada di Desa Kandangrejo yaitu 2.256 jiwa.

Kepadatan kotor rata-rata penduduk (gross density) yang tertinggi adalah Desa Tianak dengan tingkat kepadatan 11 jiwa/ha, dan yang terendah adalah Desa Kedungpring dan Desa Kandangrejo dengan tingkat kepadatan 8 jiwa/ha. Kepadatan bersih (net density) penduduk Kota IKK Kedungpring tertinggi adalah Desa Kandangrejo dengan tingkat kepadatan 84 jiwa/ha, dan yang terendah adalah Desa Kedungpring dengan tingkat kepadatan 49 jiwa/ha. Secara keseluruhan kepadatan kotor penduduk Kota IKK Kedungpring adalah 9 jiwa/ha, dengan kepadatan bersih adalah 56 jiwa/ha.

Perkembangan penduduk Kota IKK Kedungpring menunjukkan kecenderungan meningkat sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 1994. Pertambahan penduduk Kota IKK Kedungpring selama lima tahun rata-rata 0,66 %, lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata perkembangan penduduk Kecamatan 0,22 % per tahun. jelasnya lihat Tabel 2.2-3 dan Tabel 2.2-4.

TABEL : 2.2-3

SEBARAN KEPADATAN DAN PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK
KOTA KEDUNGPRING TAHUN 1950 - 1954

No.	Desa	Tahun (Jumlah)					Perubahan		Jumlah (Jumlah)		Tingkat (Jumlah)	
		1950	1951	1952	1953	1954	(%)	(%)	1950	1954	1950	1954
1	Kedungpring	3.314	3.341	3.355	3.359	3.363	0,08	47,12	56,30	4	4	4
2	Tianak	3.318	3.349	3.318	3.327	3.322	0,04	20,52	63,05	11	27	27
3	Mekanderejo	2.358	2.368	2.367	2.357	2.356	-0,01	20,60	46,76	9	37	37
4	Kandangrejo	2.018	2.020	2.040	2.053	2.056	0,03	20,30	37,50	8	34	34
Kota Kedungpring		11.408	11.738	11.782	11.798	11.797	0,00	130,40	403,72	3	3	3

Sumber : Potensi Desa dan Monografi Kecamatan

TABEL : 2.2-4

PERUBAHAN PENDUDUK KOTA KEDUNGPRING TAHUN 1954

No.	Desa	Perubahan Penduduk (Jumlah)					Perkembangan (Jumlah)
		Lahir	Mati	Datang	Pergi		
1	Kedungpring	20	10	17	10	17	17
2	Tianak	24	25	13	17	17	-5
3	Mekanderejo	18	9	10	10	10	9
4	Kandangrejo	25	15	41	4	4	27
Kota Kedungpring		87	59	81	41	41	68

Sumber : Potensi Desa dan Monografi Kecamatan

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin di Kota

Kedungpring menunjukkan bahwa penduduk perempuan berjumlah lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Keadaan ini terjadi secara umum dalam setiap desa dan lingkup kota. Namun, secara proporsional, perbedaan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan tidak terlalu menyolok. Lihat Tabel 2.2-5.

TABEL : 2.2-5

JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN
KOTA KEDUNGPRING TAHUN 1954

No.	Desa	Jumlah Penduduk (Jumlah)	Jenis Kelamin		Jenis Kelamin (%)	
			Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Kedungpring	3.363	1.639	1.726	48,72	51,28
2	Tianak	3.362	1.743	1.619	51,85	48,15
3	Mekanderejo	2.376	1.233	1.143	51,89	48,11
4	Kandangrejo	2.056	1.096	1.160	53,31	46,69
Kota Kedungpring		11.761	5.733	6.028	48,67	51,33

Sumber : Potensi Desa dan Monografi Kecamatan

Komposisi penduduk menurut struktur umur dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan angkatan kerja yang tersedia dan jumlah penduduk usia sekolah. Proporsi jumlah penduduk yang termasuk dalam kategori angkatan kerja relatif sama dengan usia sekolah, bahkan sedikit lebih kecil. Jelasnya lihat Tabel 2.2-6.

TABEL : 2.2-6

STRUKTUR UMUR PENDUDUK KOTA KEDUNGPRING TAHUN 1954

No.	Desa	Kelompok Umur (Jumlah)											
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55+
1	Kedungpring	302	327	328	213	212	240	257	248	236	206	164	404
2	Tianak	349	334	356	336	355	352	331	293	330	275	204	212
3	Mekanderejo	199	207	203	203	195	196	189	182	172	175	200	405
4	Kandangrejo	153	143	149	174	167	276	201	184	196	124	137	370
Kota Kedungpring		1.003	911	946	936	960	1.066	975	916	836	783	563	1.402

Sumber : Potensi Desa dan Monografi Kecamatan

Produksi berbagai sektor kegiatan ekonomi di Kota IKK Kedungpring masih bertumpu pada kegiatan pertanian. Hal ini tampak dari produksi sektor kegiatan pertanian tanaman pangan tahun 1994 untuk beras mencapai 5.637,00 ton, jagung 346,50 ton dan ketela 346,00 ton.

Produksi sektor kegiatan perkebunan tahun 1994 untuk kelapa mencapai 112.320,00 buah, Tembakau 3.385,00 ton dan tebu 1.105,00 ton.

Kegiatan peternakan yang terdapat di Kota IKK Kedungpring meliputi ternak budidaya sapi, kambing/domba, kerbau dan unggas dari jumlah ternak yang terbanyak ternak unggas sekitar 2.500 ekor, kambing ada 25 ekor dan kambing/domba ada 11 ekor.

Dari sektor perdagangan dan perindustrian yang nampak cukup berperan dalam menunjang kehidupan perekonomian dari wilayah Kota IKK Kedungpring adalah dengan adanya pasar utama kota dan kegiatan penunjangnya (toko, warung dan kios) serta perusahaan pengolahan tambakau dan industri kecil/kerajinan meliputi ayam-ayaman, meubel dan kerajinan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.2-10 sampai dengan Tabel 2.2-13.

2.2.4 Karakteristik Transportasi

Prasarana transportasi jalan raya yang ada di Kota IKK Kedungpring, secara konstruktif terbagi kedalam tiga jenis permukaan yakni aspal, makadam dan tanah. Jaringan-jaringan jalan tersebut dikelola dan berada dibawah pengawasan Kabupaten

TABEL : 2.2-10

PRODUKSI TANAMAN PANGAN KOTA KEDUNGPRING TAHUN 1994

No.	Desa	Beras	Jagung	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Ketela
		Produksi (ton)	Produksi (Ton)	Produksi (Ton)	Produksi (Ton)	Produksi (Ton)
1	Kedungpring	1.215,00	60,50			113,00
2	Tianak	1.150,00	58,00		40,00	207,00
3	Mekanderejo	1.572,00	110,00	21,00	60,00	5,00
4	Kandangrejo	1.700,00	120,00	40,00	190,00	21,00
Kota Kedungpring		5.637,00	346,50	61,00	310,00	346,00

Sumber : Potensi Desa dan Monografi Kecamatan

TABEL : 2.2-11

PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN KOTA KEDUNGPRING TAHUN 1994

No.	Desa	Kelapa		Tembakau		Tebu		Kpk Randu
		Produksi (Buah)	Produksi (Ton)	Produksi (Ton)	Produksi (Kg)	Produksi 000 Buah	Produksi 000 Buah	
1	Kedungpring	17.000,00	360,00		720,00		371,00	
2	Tianak	11.620,00	2.875,00		365,00		40,50	
3	Mekanderejo	13.500,00					50,00	
4	Kandangrejo	70.000,00	150,00					
Kota Kedungpring		112.320,00	3.385,00		1.105,00		461,50	
Kec. Kedungpring		621.580,00	15.971,00		4.230,00		4.263,00	

Sumber : Potensi Desa dan Monografi Kecamatan

TABEL : 2.2-12 JUMLAH TERNAK KOTA KEDUNGPRING TAHUN 1994

No.	Desa	Jumlah Ternak (Ekor)			
		Sapi	Kambing/ Domba	Kerbau	Unggas
1	Kedungpring	14	108		8.100
2	Tlanak	20	36	10	8.530
3	Mekanderejo	35	85	6	2.100
4	Kandangrejo	29	111	20	2.500
Kota Kedungpring		98	340	36	21.230

Sumber : Potensi Desa dan Monografi Kecamatan

TABEL : 2.2-13

JUMLAH INDUSTRI/KERAJINAN RAKYAT DAN PRODUKSI
KOTA KEDUNGPRING TAHUN 1994

No.	Desa	Ayanan Tikar		Ayanan Seseh		Meubel/Kayu		Kerajinan Tanah	
		Jumlah Usaha	Produk (Buah)	Jumlah Usaha	Produk (Buah)	Jumlah Usaha	Produk (Buah)	Jumlah Usaha	Produk (Buah)
1	Kedungpring								
2	Tlanak	3	345	6	1.470	7	260		
3	Mekanderejo	6	1.584	5	951			2	6.000
4	Kandangrejo	2	220						
Kota Kedungpring		13	2.149	11	2.421	7	260	2	6.000

Sumber : Potensi Desa dan Monografi Kecamatan

dan desa. Jaringan jalan tersebut bagi Kota IKK Kedungpring berfungsi sebagai jalan primer (lokal primer) dan jalan sekunder (lokal sekunder).

Jaringan jalan lokal primer menghubungkan antar kecamatan dengan kecamatan, jaringan jalan lokal sekunder merupakan jaringan-jaringan jalan yang terdapat di dalam Kota IKK Kedungpring.

Sarana transportasi yang ada di Kota IKK Kedungpring meliputi jenis kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Jumlah dan jenis kendaraan yang ada di Kota IKK Kedungpring dapat dinilai sebagai potensi penghasil pergerakan lalu lintas di dalam kota. Selanjutnya dari hal tersebut dapat digambarkan tingkat permasalahan transportasi yang dihadapi Kota IKK Kedungpring.

Jumlah dan jenis kepemilikan kendaraan yang ada di Kota IKK Kedungpring meliputi berbagai jenis kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Jenis dan jumlah kendaraan yang cukup banyak adalah kendaraan jenis sepeda dan sepeda motor. Kendaraan jenis truk, dan mobil relatif sedikit jumlahnya. Lihat Tabel 2.2-14.

TABEL : 2.2-14

JUMLAH PEMILIKAN KENDARAAN KOTA KEDUNGPRING, TAHUN 1994

No.	Desa	Jenis Kendaraan				
		Sepeda	Sepeda Motor	Becak	Truk	Mobil
1	Kedungpring	131	97	2	3	14
2	Tlanak	95	36			8
3	Mekanderejo	104	46			6
4	Kandangrejo	150	102	7	3	17
Kota Kedungpring		480	283	9	6	45

Sumber : Potensi Desa dan Monografi Kecamatan

Volume lalu lintas dapat menggambarkan pemanfaatan jaringan jalan untuk berbagai kepentingan (regional dan lokal). Pengamatan jumlah kendaraan yang melalui Kota IKK Kedungpring dapat dibagi menurut jenis kendaraan, baik yang menuju atau hanya melintasi kota. Lalu Lintas Kota IKK Kedungpring masih rendah, baik yang melintasi jalan utama maupun jalan lokal.

2.2.5 Karakteristik Sarana dan Prasarana

A. Sebaran Fasilitas Umum

Secara umum, fasilitas pelayanan di Kota IKK Kedungpring tersebar sebagai berikut:

Fasilitas pendidikan

Fasilitas pendidikan tingkat Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar/ sederajat relatif telah tersebar di empat desa yang termasuk dalam wilayah Kota IKK Kedungpring. Untuk pendidikan tingkat SLTP ada 6 unit, SLTA ada 4 unit.

Fasilitas peribadatan

Fasilitas peribadatan yang ada di Kota IKK Kedungpring antara lain berupa langgar/musholla, masjid dan gereja. Jumlah fasilitas langgar/musholla 64 buah, masjid 10 buah masing-masing tersebar di seluruh wilayah Kota IKK Kedungpring dan Gereja ada 1 buah terdapat di Desa Kedungpring.

Fasilitas kesehatan

Fasilitas kesehatan yang disediakan atau dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk Kota IKK Kedungpring dan sekitarnya yang berupa 1 puskesmas, 2 poliklinik dan 17 pos-pos kesehatan/posyandu.

Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Untuk menunjang kelancaran kegiatan perekonomian di wilayah Kota IKK Kedungpring terdapat beberapa fasilitas perdagangan dan jasa antara lain 1 pasar, 26 toko, 33 kios/warung, 1 koperasi, 1 bank dan KURK.

Fasilitas rekreasi dan olah raga

Fasilitas jenis ini dimanfaatkan untuk kegiatan olah raga dan hiburan. Jenis fasilitas yang ada di Kota IKK Kedungpring antara lain berupa lapangan terbuka yaitu Lapangan Sepak bola, voli, dan tempat olah raga lainnya.

Fasilitas umum/perkantoran

Fasilitas umum/perkantoran yang ada di Kota IKK Kedungpring dimaksudkan untuk memberi pelayanan bagi kepentingan penduduk/masyarakat wilayah Kota IKK Kedungpring dan sekitarnya. Fasilitas jenis ini antara lain berupa kantor-kantor pemerintahan seperti Kantor KUA, PDAM, Koramil, Polisi, Camat, kantor kepala desa dan perkantoran lainnya.

Untuk lebih jelasnya distribusi fasilitas umum yang terdapat di Kota Kedungpring dapat dilihat pada Tabel 2.2-15 sampai dengan Tabel 2.2-19.

TABEL : 2.2-15

JUMLAH FASILITAS PENDIDIKAN KOTA KEDUNGPRING TAHUN 1994

No	Desa	TK		SD		SLTP		SLTA	
		Jumlah (unit)	Daya Tampung	Jumlah (unit)	Daya Tampung	Jumlah (unit)	Daya Tampung	Jumlah (unit)	Daya Tampung
1	Kedungpring	2	120	4	300	3	400	2	320
2	Tlajah	2	145	3	435	1	50	1	42
3	Mekanderejo	2	75	2	480	1	65	1	60
4	Kandangrejo	1	60	2	261	1	157		
	Kota Kedungpring	7	400	11	1.536	6	740	4	622

Sumber : Potensi Desa dan Monografi Kecamatan

TABEL : 2.2-16

JUMLAH FASILITAS PERIBADATAN
KOTA KEDUNGPRING TAHUN 1994

No.	Desa	Mush./Langgar		Mesjid		Gereja	
		Jumlah (Unit)	Daya Tampung	Jumlah (Unit)	Daya Tampung	Jml (U)	Daya Tampung
1	Kedungpring	17	680	3	1.200	1	10
2	Tlanak	16	900	1	550		
3	Mekanderejo	20	800	3	1.895		
4	Kandangrejo	9	130	3	1.750		
Kota Kedungpring		64	2.510	10	5.395	1	10

Sumber : Potensi Desa dan Monografi Kecamatan

TABEL : 2.2-17

JUMLAH FASILITAS KESEHATAN
KOTA KEDUNGPRING TAHUN 1994

No.	Desa	Fasilitas Kesehatan		
		Puskesmas (Unit)	Poliklinik (Unit)	Posyandu (Unit)
1	Kedungpring			6
2	Tlanak	1		3
3	Mekanderejo			2
4	Kandangrejo		1	6
Kota Kedungpring		1		17
Kec. Kedungpring		2	4	36

Sumber : Potensi Desa dan Monografi Kecamatan

TABEL : 2.2-18

JUMLAH FASILITAS PERDAGANGAN DAN JASA
KOTA KEDUNGPRING TAHUN 1994

No.	Desa	Fasilitas Perdagangan dan Jasa				
		Pasar Kios/ Warung	Toko	Gudang	Bank	Koperasi
1	Kedungpring	1	6	3	1	1
2	Tlanak		10	20	3	
3	Mekanderejo		10	4	1	
4	Kandangrejo			6		
Kota Kedungpring		1	26	33	5	1

Sumber : Potensi Desa dan Monografi Kecamatan

B. Utilitas Umum

Listrik

Perusahaan Umum Listrik Negara telah memperluas jangkauan pelayanannya hingga wilayah Kota IKK Kedungpring. Pelayanan listrik untuk penduduk Kota belum terlayani ke seluruh desa ada 51,19 % sudah terlayani.

Telepon

Prasarana perhubungan yang cukup penting yaitu telekomunikasi, bagi wilayah Kota IKK Kedungpring pelayanan fasilitas telekomunikasi berupa telepon otomatis dan telepon umum.

Drainase/pematusan

Sistem jaringan pematusan pembuangan air kotor maupun air hujan di wilayah Kota IKK Kedungpring, pada umumnya masih sangat sederhana dan sebagian besar memanfaatkan saluran

irigasi dan kali yang ada. Dari pengamatan secara visual dijumpai bahwa saluran-saluran yang ada masih berupa saluran tanah. »

Air Bersih

Untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih bagi keperluan sehari-hari penduduk wilayah Kota IKK Kedungpring, sebagian besar dipenuhi dari Sumur dan sebagian dari PDAM.

Persampahan

Masalah penanganan sampah, yang dihasilkan oleh rumah tangga dan kegiatan lainnya (perkantoran, pasar dan sebagainya), sampah-sampah ini dibuang ke dalam lubang galian tanah yang mereka buat belakang pekarangan masing-masing yang kemudian ditimbun atau dibakar.

2.3 Potensi dan Masalah Kota IKK Kedungpring

Sebelum menginjak kepada kebijaksanaan dan pengembangan tata ruang kota IKK Kedungpring, identifikasi permasalahan dan potensi perkembangan kota kota IKK Kedungpring akan diungkap sebagai ringkasan dari proses penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota IKK Kedungpring yang telah dilakukan.

2.3.1. Kedudukan Kota dalam Masalah Struktur Regional.

Kota IKK Kedungpring sebagai pusat dari wilayah Kecamatan Kedungpring mempunyai lokasi yang cukup strategis dari struktur regional. Dapat dilihat dengan keberadaan Jalan pertigaan Lokal

Primer yang melewati kota IKK Kedungpring dan jarak cukup dekat dengan Kota Babat.

Keuntungan lokasi dan kemudahan hubungan regional ini telah menimbulkan permasalahan struktur tata ruang didalam kota IKK Kedungpring. Masalah ini akan tampak dari lokasi kegiatan fungsional kota seperti perdagangan, pemerintahan, perumahan dan pergudangan cenderung memadat pada lokasi-lokasi di sepanjang jalan utama kota tersebut. Lain dari itu, dengan jarak yang relatif dekat dengan kota Babat menimbulkan permasalahan didalam pemenuhan fasilitas yang cenderung berorientasi kepada fasilitas yang lebih lengkap dalam hal ini di Kota Babat dan Lamongan.

2.3.2 Penduduk dan Kegiatannya

Perkembangan penduduk empat desa "kota" Kedungpring selama 5 tahun terakhir (1990-1994) mencapai rata-rata 0,68 % per tahun atau 79 jiwa per tahun. Pertumbuhan penduduk ini cukup tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk di tingkat Kecamatan Kedungpring (0,22 % per tahun).

Dengan perkembangan 0,68% pertahun maka penduduk Kota IKK Kedungpring yang terdiri dari sebagian 4 desa (Desa Kedungpring, Tianak, Mekanderejo dan Kandangrejo) pada tahun 2005/2006 akan mencapai 12.848 jiwa.

Berdasarkan uji metode tersebut, ternyata metode Regresi Linier mempunyai rata-rata simpangan terkecil dari ke tiga model (Regresi Linier, Polinomial dan Bunga berganda) yang dilakukan

uji tersebut. Untuk itu, maka proyeksi penduduk Kota IKK Kedungpring akan menggunakan Regresi Linier.

Dengan menggunakan metode Regresi Linier, penduduk Kota IKK Kedungpring sampai dengan tahun 2005/2006, lihat dalam

Tabel 2.3 - 1 sampai dengan Tabel 2.3 - 5.

TABEL 2.3-1 PERHITUNGAN JUMLAH PENDUDUK

No	Tahun	Perkiraan Jumlah Penduduk (jiwa)		
		Regresi Linier	Bunga Polinomial	Bunga
1.	1994	11.641	11.761	11.761
2.	1999	12.177	12.179	12.179
3.	2004	12.612	12.613	12.668
4.	2006	12.846	13.050	12.962

TABEL 2.3-2 SIMPANGAN PROYEKSI REGRESI LINIER

No.	Tahun	Penduduk Aktual	Proyeksi Penduduk	Simpangan	Kuadrat simpangan
1.	1990	11.466	11.573	107,0	11.449,00
2.	1991	11.736	11.640	-93,9	9.196,81
3.	1992	11.776	11.707	-68,5	4.733,44
4.	1993	11.777	11.774	-2,7	7,29
5.	1994	11.781	11.841	60,4	3.648,16
RATA-RATA SIMPANGAN					5.806,94

TABEL 2.3-3 SIMPANGAN PROYEKSI BUNGA BERGANDA

No.	Tahun	Penduduk Aktual	Proyeksi Penduduk	Simpangan	Kuadrat simpangan
1.	1990	11.466	11.464	-2,1	4,41
2.	1991	11.736	11.542	-193,7	37.502,20
3.	1992	11.776	11.621	-154,6	23.915,17
4.	1993	11.777	11.701	-76,1	5.790,44
5.	1994	11.781	11.781	0,0	0,00
RATA-RATA SIMPANGAN					11.202,06

TABEL 2.3-4 SIMPANGAN PROYEKSI POLINOMIAL

No.	Tahun	Penduduk Aktual	Proyeksi Penduduk	Simpangan	Kuadrat simpangan
1.	1990	11.466	11.466	0,0	0,00
2.	1991	11.736	11.545	-191,3	36.576,56
3.	1992	11.776	11.624	-152,5	23.256,25
4.	1993	11.777	11.702	-74,8	5.587,56
5.	1994	11.781	11.781	0,0	0,00
RATA-RATA SIMPANGAN					10.003,40

TABEL 2.3-5 PERHITUNGAN JUMLAH PENDUDUK PERDESA

No.	Desa	Tahun (jiwa)					Tahun (jiwa)				
		1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
1.	Kedungpring	1.574	1.341	1.335	1.316	1.333	1.365	1.383	1.403	1.377	1.389
2.	Timor	3.573	3.386	3.362	3.375	3.382	3.384	3.382	3.373	3.353	3.323
3.	Kedungpring	1.533	1.333	1.367	1.371	1.378	1.378	1.377	1.382	1.373	1.373
4.	Kedungpring	1.813	1.733	1.761	1.765	1.774	1.781	1.785	1.784	1.784	1.784
Kota Kedungpring		11.466	11.736	11.776	11.777	11.781	11.841	11.841	11.841	11.841	11.841
Kota Kedungpring		31.394	31.330	31.333	31.335	31.335	31.335	31.335	31.335	31.335	31.335

Sumber : Perhitungan

Apabila proporsi angkatan kerja (kelompok usia 15-55 tahun) pada tahun 2005/2006 sama dengan proporsi pada tahun 1994 yaitu 63,95%, maka jumlah angkatan kerja pada tahun 2005/2006 adalah 6.216 jiwa. Jumlah angkatan kerja sebesar 6.216 jiwa ini akan membutuhkan lapangan kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Kualitas angkatan kerja yang ada di Kota IKK Kedungpring masih didominasi oleh tingkat pendidikan tamatan sekolah Dasar 61,30 % dari jumlah penduduk yang ada pada tahun 1994.

Sektor pertanian selama ini paling banyak menyerap tenaga kerja di kota Ikk Kedungpring ± 78,43 % dan lainnya 21,51 % penduduk yang bekerja. Dengan perkembangan kota Ikk Kedungpring tahun 2005/2006, diharapkan sektor jasa dan perdagangan dapat menyerap lebih banyak angkatan kerja, sedangkan dari sektor pertanian kontribusinya akan lebih dikurangi.

2.3.3 Wilayah Potensial Pengembangan Kota

Penentuan wilayah Potensial Perencanaan (WPP) kota Ikk Kedungpring, dimaksudkan untuk mendapatkan wilayah perencanaan yang optimum serta tidak mengakibatkan atas-atas kelestarian lingkungan.

Dalam Penentuan Wilayah Potensial Perencanaan kota Ikk Kedungpring bertitik tolak pada :

- Batas administratif wilayah kota Ikk Kedungpring, yang terdiri dari empat desa (Kedungpring, Tlanak, Mekanderejo dan Kandangrejo. Jelasnya dapat dilihat pada Gambar 11-4 (Dasar Administrasi).
 - Berdasarkan analisis sebelumnya bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan Wilayah Potensial Perencanaan, yaitu:
 - Penggunaan lahan;
 - Kecenderungan Perkembangan kota
 - Fisik kota dan pembatas perkembangan
- Berdasarkan arah kecenderungan perkembangan fisik kota Ikk Kedungpring, dan berbagai perkiraan perkembangan komponen kegiatan yang ada, dipatiah di simpulkan kecenderungan

perkembangan fisik, struktur kota Ikk Kedungpring tidak akan bergeser terlalu jauh dengan perkembangan yang terjadi sebelumnya, serta karakteristik kawasan terbangun pada saat ini.

Dari beberapa faktor tersebut wilayah Kota Kedungpring tidak seluruh administrasi desa yang digunakan untuk perkembangan kegiatan kota.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 11-5 (Penggunaan Lahan), Gambar 11-6 (Arah Kecenderungan Perkembangan Kota) dan Gambar 11-7 (Analisis Fisik kota).

Berdasarkan penelitian terhadap penggunaan lahan kecenderungan perkembangan kota dan analisis fisik kota, maka wilayah Potensial Pengembangan (WPP) kota Ikk Kedungpring mencakup wilayah seluas ± 414,66 Ha, dengan rincian lihat Tabel 2.3-6.

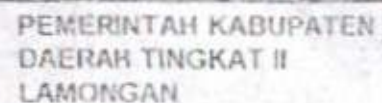
TABEL : 2.3-6

WILAYAH POTENSIAL PENGEMBANGAN KOTA IKK KEDUNGPRING, 2005/2006

No.	Desa	Luas Wilayah (Ha)	Wilayah Potensial	
			(%)	(Ha)
1	Kedungpring	419,700	0,27	113,320
2	Tlanak	325,600	0,31	160,060
3	Mekanderejo	290,600	0,16	52,310
4	Kandangrejo	268,300	0,21	83,170
Jumlah		1.304,200	0,32	414,660

Sumber : Prosentase, Pengukuran Pita/meter dan Skala Garis

Untuk lebih jelasnya, Wilayah Potensial Pengembangan (WPP) dapat dilihat pada Gambar 11-8 (Wilayah Potensial Pengembangan Kota).



RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN 1985/1986 - 2005/2006

PETA
PENGUNAAN LAHAN
TAHUN 1995

KETERANGAN



SUMBER : HASIL SIGL LAPANGAN TAHUN 1995



GAMBAR : 11 - 5

ORGANISAR : S/D

DEFINITION 1



UTARA

1:30000



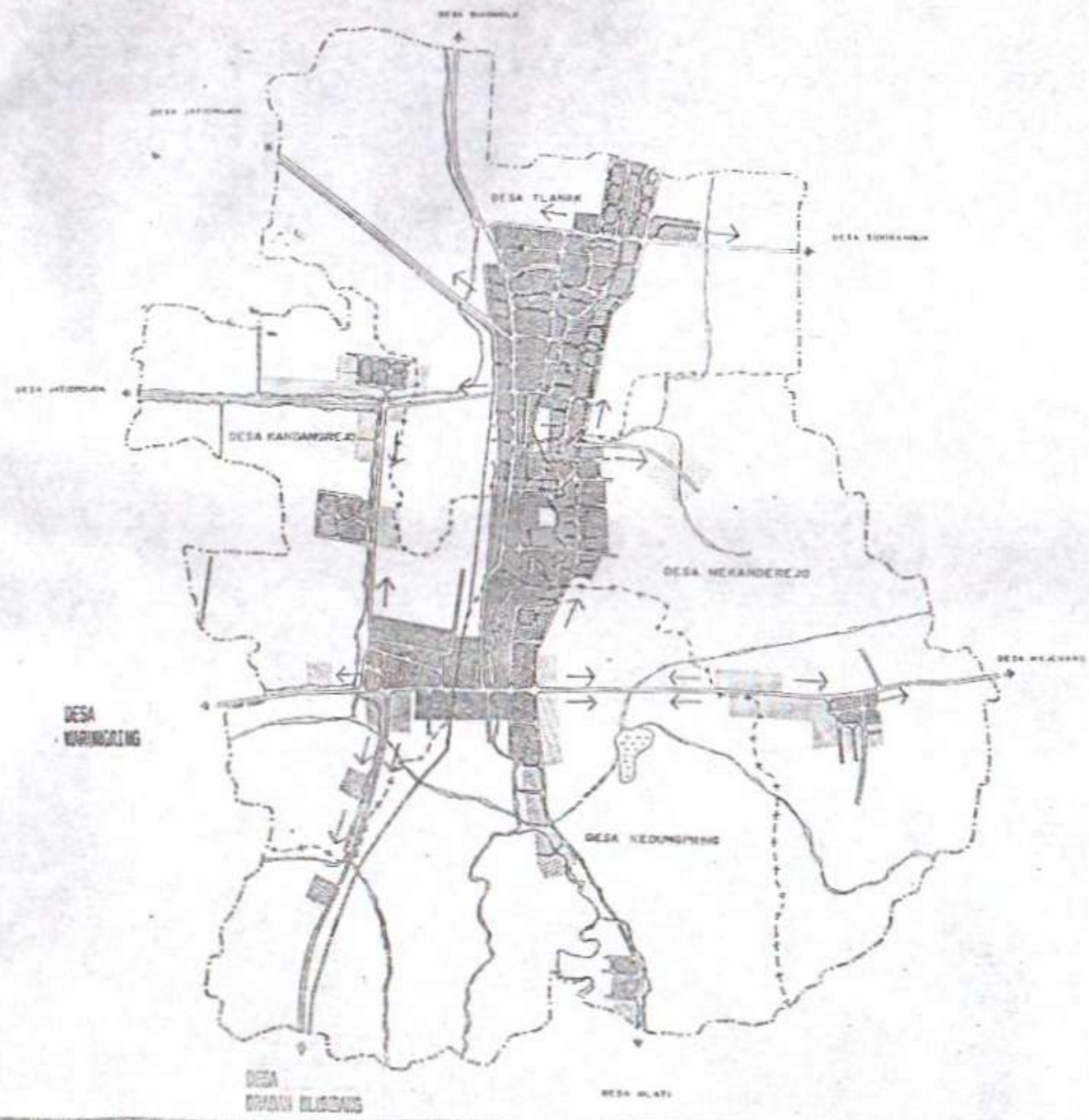
PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN 1995/1996 - 2005/2006

PETA
KECENDERUNGAN
PERKEMBANGAN KOTA

KETERANGAN

- WILAYAH TERDAKUKAN TH. 1900
- WILAYAH TERDAKUKAN TH. 1995
- ARAH PERKEMBANGAN KOTA



SUMBER : HASIL ANALISA



GAMBAR : II - 6
DISAMBAI :
DIPERIKSA :



SKALA
1:30000

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
BUKOTA KECAMATAN KEDUNGPRINGS
TALAM 1506/1506 - 2005/2005

MULTI-COMPARTMENT

	PENGAWAS		PLANG TITIK/
	PENCONTOHAN		
	PENDOSAN		
	PEREKADAN		
	PEDAGANGAN DAN JASA		
	VESEJANTIN		
	GAJAH / GURU TENGAH		
	POLISI KAWAN PINDA / MALLER		
	LIPSIKAWAN KAWAN		
	PANCAJALAN DOK		
	MUSKAW		
	SHAWET TONG		
	SHAWET SEMPAN TONG		
	TIGERAN		
	SHAWET KAW TONG		

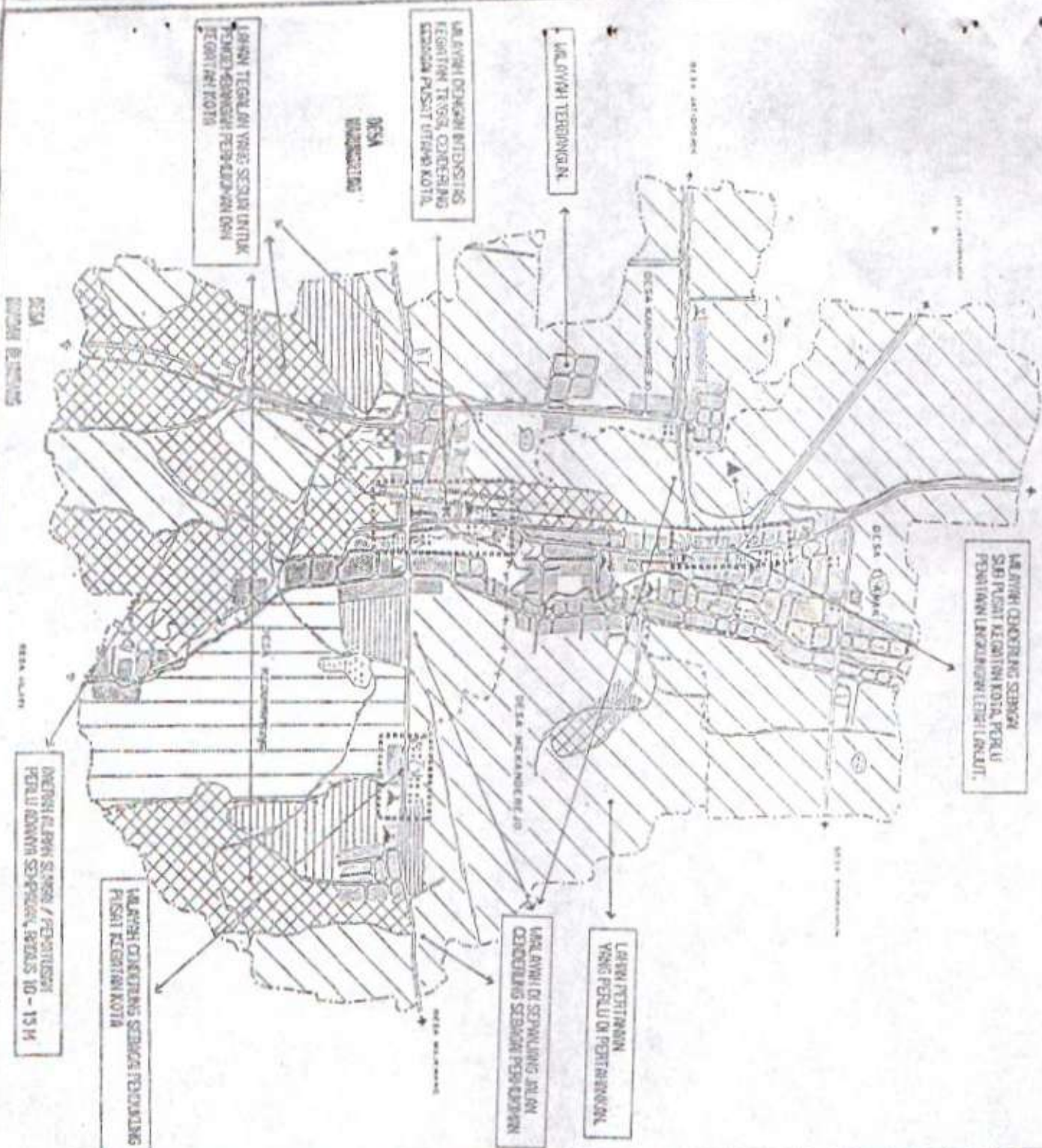
[illegible]

COAUTHOR : Shirley

Abstract

 $L = 3000$

UTAH



PEMERINTAH
DAERAH TTA
LAMONGAN



RENCANA UMUM TATA
DENGAN KEDA
RENCANA DETAIL TATA

IDUKOTA KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN 1995/1996 - 2005/2006

PETA WILAYAH
POTENSIAL PENGEMBANGAN KOTA

RENCANA

RENCANA
PENGEMBANGAN KOTA

SUMBER: HASIL PENELITIAN

GAMBAR : II - B

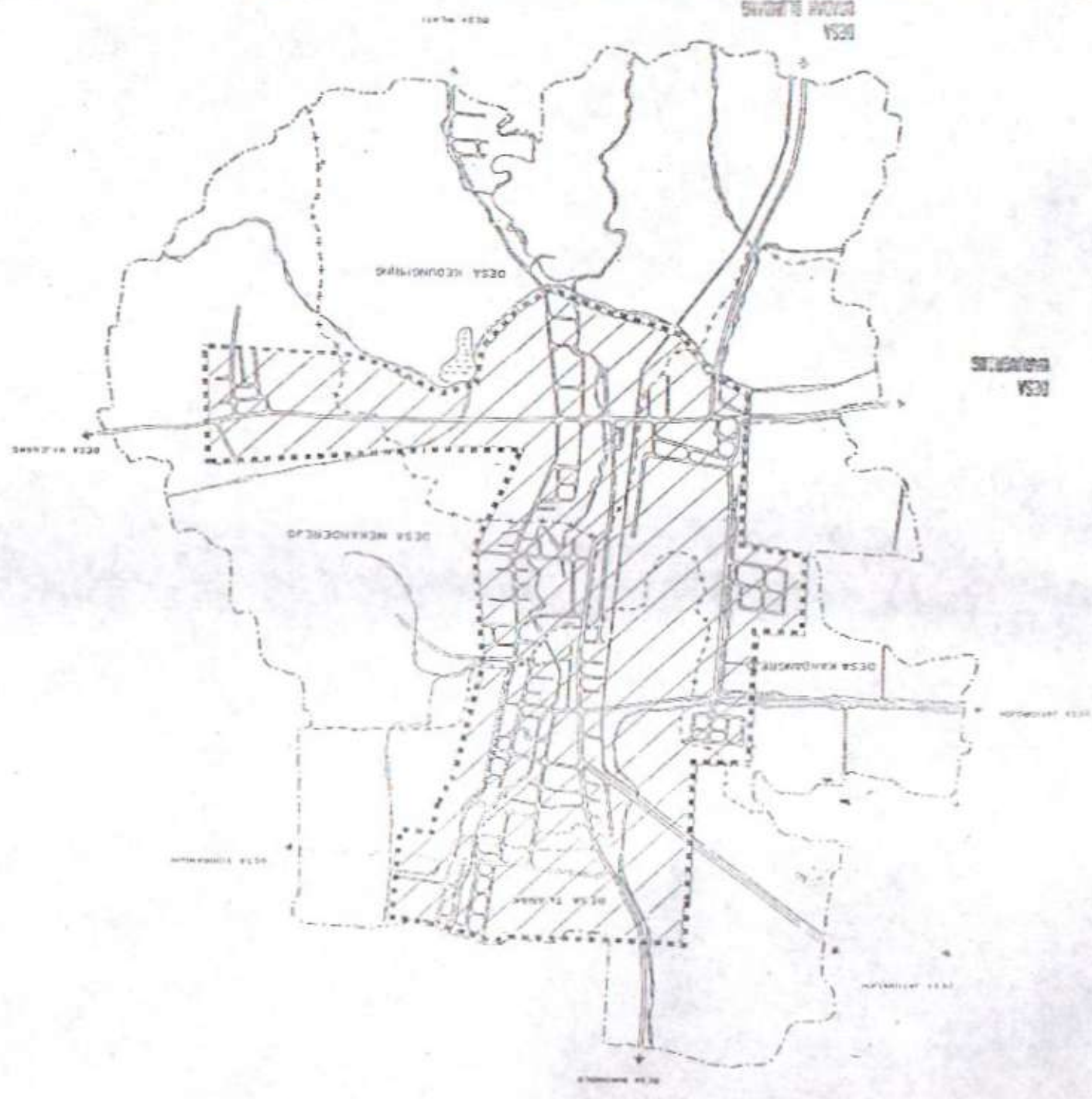
DIMASUKAN : 4

DISERVISI :



SKALA
1 : 30000

UTARA



2.3.4 Permasalahan Struktur Tata Ruang Kota IKK Kedungpring

Kota yang terbentuk dari berbagai elemen kegiatan yang ditempatkan dalam struktur ruang wilayah yang tercermin didalam penggunaan lahan masing-masing kegiatan yang ditempatkan di dalam ruang tersebut.

Penempatan elemen kegiatan dalam ruang tersebut di satu sisi akan menimbulkan dampak positif, dimana penggunaan ruang untuk masing-masing kegiatan yang ditempatkan serasi dan saling melengkapi, sehingga antara penggunaan yang satu dan yang lainnya dapat berlangsung sesuai yang diharapkan. Namun dipihak yang lain, kegiatan yang ditempatkan dapat membawa permasalahan bagi kegiatan yang ada didalam kota/wilayah tersebut.

Permasalahan struktur tata ruang yang ada di kota IKK Kedungpring dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Kawasan Pusat Kota

Di Kawasan Pusat Kota IKK Kedungpring pada saat ini mempunyai permasalahan yang cukup pelik, dimana pada pusat kota IKK Kedungpring terjadi penumpukan kegiatan yang bercampur antara fungsi Primer dan fungsi Sekunder. Sehingga kawasan pusat kota IKK Kedungpring merupakan kawasan yang padat akan kegiatan dan menimbulkan konflik antara kegiatan yang satu dengan yang lainnya, seperti perdagangan dengan transportasi, perdagangan regional dengan perumahan, perdagangan dan pendidikan.

- Kawasan Perumahan

Kawasan perumahan yang merupakan salah satu elemen pembentuk kota telah menimbulkan permasalahan di Kota IKK Kedungpring

sebagai akibat kecenderungan dan motivasi dari penduduk kota IKK Kedungpring untuk menempatkan perumahan pada lokasi-lokasi yang mempunyai akses tinggi terhadap pusat pelayanan dan kegiatan kota. Permasalahan ini sangat menonjol di kawasan pusat kota, di masa kawasan perumahan kepadatan tinggi telah bercampur dengan kawasan perdagangan, sehingga terjadi konflik kepentingan di dalam pemanfaatan ruang.

- Kawasan Perdagangan

Kawasan perdagangan utama kota IKK Kedungpring berlokasi pertigaan jalan lokal Primer telah menimbulkan konflik terhadap kegiatan transport pada saat-saat intensitas kegiatan perdagangan cukup tinggi (hari pasaran), juga sebagai tempat mangkal kendaraan umum dan bongkar muat barang.

Selain dari itu penggunaan badan jalan untuk kegiatan parkir dan bongkar muat ini telah menimbulkan tingkat pelayanan jalan menurun dan mengganggu kelancaran arus pergerakan barang dan manusia, sehingga pemakai jasa tidak dapat bergerak sesuai dengan harapannya, yaitu cepat, aman, menyenangkan dan ekonomis.

2.3.5 Sistem Transportasi

Kondisi sistem transportasi yang ada di Kota IKK Kedungpring pada saat ini terdiri dari :

- Jaringan Jalan

Jaringan jalan yang ada umumnya masih ber kondisi parkerasan tanah dengan fungsi jalan lingkungan, jalan-jalan utama yang

ada di Kota IKK Kedungpring masih cukup mampu untuk mendukung volume lalu lintas yang ada, tetapi untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, maka peningkatan dan pembangunan jaringan jalan baru di bagian utara dan selatan ke timur kota disarankan untuk memisahkan lalu lintas regional dan lokasi yang terkumulasi ke pusat Kota di masa mendatang.

- Fasilitas Transportasi

Fasilitas transportasi yang ada masih bercampur di Pusat kegiatan perdagangan kota, perlu adanya penataan lokasi pangkalan kendaraan umum (sub terminal) dengan pusat kegiatan perdagangan kota dan pada pusat perdagangan perlu penyediaan tempat parkir yang memadai.

2.2.6 Fasilitas Kota

Fasilitas kota yang ada di Kota IKK Kedungpring umumnya masih mampu mendukung kebutuhan penduduk Kota IKK Kedungpring pada tahun 1994, kecuali untuk beberapa fasilitas seperti Ruang terbuka hijau, taman tempat bermain, tempat rekreasi, Apotik, fasilitas kebudayaan dan lingkungan.

Kondisi bangunan untuk fasilitas umumnya baik, hal ini disebabkan sebagian besar fasilitas yang ada merupakan bangunan baru, tetapi ada beberapa fasilitas yang memerlukan perbaikan.

2.3.7 Utilitas Kota

Utilitas kota yang ada di Kota IKK Kedungpring yang ditekankan meliputi Jaringan Air Minum/bersih, Jaringan

Drainase/pemutihan, Jaringan Air Limbah/Kotor, Jaringan Listrik dan Persampahan adalah sebagai berikut :

1. Air Bersih

- Hingga saat ini di Kota IKK Kedungpring jaringan air bersih (PDAM) yang ada masih belum terdistribusi ke seluruh bagian Wilayah Kota IKK Kedungpring. Sehingga kebutuhan air bersih masyarakat sebagian di penuhi dari air sumur.

- Kondisi Air Sumur masih perlu penelitian lebih lanjut sebagai persyaratan untuk mendapatkan air bersih yang sehat.

2. Air Kotor/Limbah

- Di Kota IKK Kedungpring penyaluran air limbah rumah tangga masih menggunakan saluran alam yang menyatu dengan saluran drainase.

- Hanya sebagian kecil saja yang menggunakan septic tank baik dengan atau tanpa bidang resapan.

3. Drainage/Pemutihan

- Di Kota IKK Kedungpring keberadaan saluran drainage/pemutihan kota masih sangat sederhana.

- Kondisi saluran adalah alami/perkerasan tanah

- Untuk itu perlu diadakan pembangunan dan pengembangan saluran drainage saat mendatang.

4. Listrik

Jaringan listrik saat ini telah menjangkau hampir seluruh bagian wilayah Kota IKK Kedungpring, hanya wilayah pinggiran yang masih belum terjangkau oleh jaringan listrik.

5. Sampah

- Di Kota Ikk kedungoring permasalahan sampah masih belum ditangani dengan terpadu, hal ini tampak masih belum terdistribusi fasilitas pengelolaan sampah di kota ini, sebagian besar produksi sampah masih dibakar dan dibuang pada ruang terbuka begitu saja.
- TPS hanya ada di Pasar Ikk kedungoring, sedangkan kawasan kota yang lain belum ada.
- TPA masih belum ada dan pada masa pendatang lokasi TPA diusahakan di luar wilayah kota (jadi satu dengan TPA Babat).

2.3.8 Administrasi dan Pengelolaan Pembangunan

Di dalam pengelolaan pembangunan akan tetap di perlukan peningkatan Kemampuan Aparatur Pemerintah yaitu:

- Peningkatan kemampuan individu aparat pelaksana sesuai dengan penguasaannya.
- Memelihara forum koordinasi yang telah ada selama ini, sehingga pelaksanaan tugas yang seringkali harus di dukung antar lembaga dapat dilakukan dengan baik.
- Dari anggaran pendapatan yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, serta pengelolannya dan kemampuan pembiayaan pembangunan, akan dilakukan usaha-usaha sebagai berikut:
 - Menggali sumber-sumber pendapatan Asli Daerah sendiri yang antara lain berupa retribusi dan pajak-pajak daerah.

- Meneliti sektor yang paling tepat dan memberikan kemampuan pengembangan paling besar agar segera dapat turut membayai pembangunan sektor lainnya.
- Menggunakan surplus anggaran yang walaupun kecil telah mulai dimanfaatkan dirinya untuk sektor-sektor penting yang jarang dapat diantarkan untuk di bayai oleh pemerintah pusat.
- Kebijakan dan usaha intensifikasi, yaitu berupa peningkatan pendapatan Asli Daerah dari sumber-sumber yang telah berjalan selama ini.
- Pola alokasi dana pembangunan perlu berangsur-angsur di rubah dan di arahkan terhadap sektor-sektor yang paling memerlukan perhatian serius.

Di dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota, perlu mengacu pada peraturan perundangan lainnya yang erat kaitannya, antara lain mengenai aspek pertanahan (Urban Land Policy) dan ketentuan Pokok Lingkungan Hidup.

Selain dari itu, di dalam mengendalikan perkembangan kota dapat dilakukan berbagai cara antara lain :

- Penerbitan Ijin Lokasi
- Peraturan Perdaerah IMB dan Penggunaan bangunan
- Ijin berdasarkan Undang-undang gangguan (N.O)
- Penerbitan pelaksanaan

Dengan mengendalikan perkembangan yang diawasi peraturan di dalam pemberian syarat-syarat lokasi, mendirikan bangunan, serta dikaitkan dengan peraturan yang lain yang ada dari masing-masing instansi sektoral dan vertikal.

Dengan koordinasi yang baik dan terpadu di harapkan perkembangan kota yang tidak diharapkan dapat dikendalikan seminimal mungkin.

2.4 Peningkatan Fungsi dan Peranan Kota IKK Kedungpring

2.3.1 Peranan yang diharapkan dari Kota IKK Kedungpring di dalam Kebijakan Regional Wilayah.

Di dalam konstalasi regional kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, Kota IKK Kedungpring sebagai Sub Pusat Wilayah Pembangunan SWP II Babat mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting. Peranan Kota IKK Kedungpring di dalam struktur ruang berdasarkan jenjang kota-kota yang ada di kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan adalah :

- Sub Satuan Wilayah Pengembangan II yang berpusat di Babat.

Dengan peran yang diprioritaskan adalah untuk mendukung Pusat SWP II, agar tidak timbul penumpukan kegiatan di Pusat SWP II tersebut.

- Pusat Pengembangan Wilayah Pembangunan Kecamatan Kedungpring. Dengan peran yang disandang oleh Kota IKK Kedungpring sebagai pusat pengembangan Wilayah Pembangunan Kecamatan di dalam kebijaksanaan regional, maka peran Kota IKK Kedungpring adalah sebagai pusat dari berbagai kegiatan yang ada di dalam Wilayah Pembangunan Kecamatan Kedungpring. Antara lain bagi :

- * Kegiatan pemerintahan
- * Kegiatan perdagangan dan Jasa
- * Kegiatan Pelayanan fasilitas

- Pusat Pemerintahan

Berfungsi sebagai pusat pengembangan Kecamatan Kedungpring, Kota IKK Kedungpring juga mempunyai peran sebagai pusat dari Kecamatan Kedungpring sendiri. Konsekuensi dari hal tersebut, maka Kota IKK Kedungpring harus dapat berperan sebagai pusat kegiatan dan aktivitas dalam lingkup kecamatan Kedungpring.

2.4.2 Peningkatan Peranan Kota IKK Kedungpring Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah

Peningkatan peranan kota IKK Kedungpring sebagai pusat pengembangan bagi daerah sekitarnya dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan antara lain sebagai berikut :

- a. Perbaikan, penyebaran dan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, terutama peningkatan kondisi/kualitas jalan serta sarana angkutannya
- b. Penyediaan dan perbaikan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang kelancaran pertumbuhan peranan kota IKK Kedungpring. Dalam hal ini peranan kota IKK Kedungpring yang jelas terlihat ialah sebagai pusat koleksi dan distribusi daerah pengaruh (hinterland). Keadaan ini dapat meningkatkan peranan kota IKK Kedungpring apabila kota tersebut lebih menyediakan fasilitas untuk mempertinggi perannya.
- c. Peningkatan dalam pemanfaatan potensi-potensi kota IKK Kedungpring. Pemanfaatan potensi ini dapat ditingkatkan dengan investasi bagi pengembangan kegiatan yang memang potensial di Kota IKK Kedungpring.

BAB III

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
IKK KEDUNGPRING

3.1 Kebijakan Pengembangan Wilayah

Kebijakan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mempengaruhi arahan pengembangan Kota IKK Kedungpring adalah kebijakan regional dalam lingkup yang lebih luas, yaitu Kabupaten Lamongan dan Propinsi Jawa Timur. Secara hirarkis, kebijakan tersebut menentukan pokok-pokok pembangunan Kota IKK Kedungpring.

3.1.1 Kebijakan Regional Jawa Timur

Dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Repelita VI Daerah Propinsi Jawa Timur (tahun 1994/1995-1998/1999), telah ditegaskan bahwa di samping adanya kebijakan umum dan sektoral ditetapkan pula kebijakan perwilayahan pembangunan. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menjamin laju perkembangan dan pertumbuhan daerah serta memelihara keseimbangan dan kesinambungan pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh, terarah dan terpadu.

Pusat pembangunan ditetapkan pada tiap wilayah pembangunan dan diharapkan akan menjadi pusat penggerak kegiatan pembangunan.

Kebijakan pelaksanaan pembangunan Jawa Timur melalui penempatan sembilan Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) yaitu:

1. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) 13.1 Gerbangkertosusila dengan pusat Surabaya, meliputi satuan wilayah pembangunan Kotamadya Surabaya, Kabupaten Gresik, Bangkalan, Sidoarjo dan Lamongan serta Kabupaten/Kotamadya Mojokerto.
2. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) 13.2 Madura dan kepulauan dengan pusat Sumenep, meliputi satuan-satuan wilayah pembangunan Kabupaten-Kabupaten Sumenep, Pamekasan dan Sampang.
3. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) 13.3 Banyuwangi dengan pusat Banyuwangi, meliputi satuan wilayah pembangunan Kabupaten Banyuwangi.
4. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) 13.4 Jember dan sekitarnya dengan pusat Jember, meliputi satuan-satuan wilayah pembangunan Kabupaten-Kabupaten Jember, Bondowoso dan Situbondo.
5. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) 13.5 Probolinggo-Lumajang dengan pusat Probolinggo, meliputi satuan-satuan wilayah pembangunan Kabupaten/Kotamadya Probolinggo dan Kabupaten Lumajang.
6. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) 13.6 Malang dan Pasuruan, dengan pusat Malang, meliputi satuan-satuan wilayah pembangunan Kabupaten/Kotamadya Malang dan Pasuruan.

7. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) 13.7 Kediri dan sekitarnya dengan pusat Kediri, meliputi satuan-satuan wilayah pembangunan Kabupaten/Kotamadya Kediri, Kabupaten-Kabupaten Trenggalek, Tulungagung, Nganjuk dan Jombang serta Kabupaten/Kotamadya Blitar.

8. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) 13.8 Madiun dan sekitarnya dengan pusat Madiun, meliputi satuan-satuan wilayah pembangunan Kabupaten/Kotamadya Madiun, Kabupaten-Kabupaten Ponorogo, Magetan, Ngawi dan Pacitan.

9. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) 13.9 Tuban-Bojonegoro dengan pusat Tuban, meliputi satuan-satuan wilayah pembangunan Kabupaten-Kabupaten Tuban dan Bojonegoro.

Untuk lebih memperjelas pembagian perwilayahan di Jawa Timur, dapat dilihat pada Gambar III - 1 (*Perwilayahan Pembangunan Provinsi Jawa Timur*)

3.1.2 Kebijakan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan.

Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ditetapkan untuk mengarahkan pembangunan daerah agar tercapai keseimbangan dalam hal tingkat kemakmuran antar SWP. Kebijakan tersebut diupayakan dengan memanfaatkan seluruh potensi ekonomi nasional dan efisiensi pertumbuhan daerah dengan tujuan keseimbangan sebagai titik sentranya. Untuk mendukung kebijaksanaan pembangunan tersebut diperlukan suatu urutan skala prioritas yang berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah.



PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IKK KEDUNGPRING
TAHAP 1995/1996 - 2005/2010

PETA PERWILAYAHAN
PENBAUNAN PROPINSI
JAWA TIMUR

KEPERAWAN

- 13.1 GERANGPERTOSUSA
 - 13.2 MADURA
 - 13.3 BANYUWANGI
 - 13.4 JEMBER
 - 13.5 PROBOLINGGO, LUMAJANG
 - 13.6 MALANG, PASURUAN
 - 13.7 KEDIRI
 - 13.8 MADEIRA
 - 13.9 TUBAN, BOJONEGORO
- ☐ DATAS SMP.
- ☒ IBUKOTA PROPINSI
- ☐ IBUKOTA KABUPATEN/KODYA

SUMBER : BAPPENDETA I JAN 1995

GAMBAR : III - 1

DAFTAR : 13

DITEMBA : 1

SKALA

1 : 115000



UTARA



0 10 20 30 40 50 km

Pembagian wilayah pengembangan di Kabupaten Lamongan meliputi:

- a. Satuan Wilayah Pembangunan I dengan pusat pengembangannya di Lamongan yang meliputi Kecamatan Turi, Sukodadi, Kalitengah, Karanggeneng, Tikung, Kembangbahu, Mantup, dan Sugio.
- b. Satuan Wilayah Pembangunan II dengan pusat pengembangannya di Babat yang meliputi kecamatan Sekaran, Pucuk, Kedungpring, Mudo, Ngimbang, Bluluk, Sukorame dan Sambeng.
- c. Satuan Wilayah Pembangunan III dengan pusat pengembangannya di Brondong yang meliputi Kecamatan Paciran, Solokuro dan Laren.
- d. Satuan Wilayah Pembangunan IV dengan pusat pengembangannya di Deket yang meliputi Kecamatan Karangbinangun dan Glagah.

Untuk memperjelas gambaran kebijaksanaan Tata ruang di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan melalui pembagian wilayah pembangunannya, dapat dilihat pada Gambar III - 2 (*Perwilayahan Pembangunan Kabupaten Lamongan*).

3.1.3 Kebijakan Sektor

Untuk mempercepat perwujudan tujuan Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan secara terpadu dan menyeluruh, maka kebijaksanaan sektoral ditetapkan sebagai berikut :

- Kebijakan Bidang Ekonomi,
- Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan,
- Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
- Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,

- Hukum,
- Politik, Aparatur Negara, Penerangan, Komunikasi dan Media Masa,
- Pertahanan dan Keamanan.

Dari beberapa kebijaksanaan sektoral tersebut perlu ditingkatkan dan saling menunjang dengan kemajuan dibidang ekonomi.

Dalam kaitannya dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan, Kota IKK Kedungpring sebagai sub pusat dari Satuan Wilayah Pembangunan II yang berpusat di Babat tentunya tidak akan terlepas dari kebijaksanaan yang diarahkan bagi pengembangan SWP II ini, namun kebijaksanaan ini tentunya disesuaikan dengan kondisi dan situasi dari kawasan kota IKK Kedungpring berada.

Pengembangan perdagangan dan jasa sangat memungkinkan untuk dikembangkan di kota IKK Kedungpring ini, namun tidak terlepas dari fungsi yang diarahkan bagi kota IKK Kedungpring yaitu sebagai pusat pelayanan kecamatan dan desa-desa yang ada dalam wilayah pengaruhnya.

3.2. Kebijakan Dasar Rencana

Sejalan dengan penyusunan Rencana Tata Umum Tata Ruang Kota dengan Kealaman Rencana Detail Tata Ruang Kota IKK Kedungpring, perumusan kebijaksanaan yang mendasari perencanaan kota perlu di telaah. Kebijakan ini berdasarkan tiga aspek peninjauan, yaitu:

- Aspek strategis: letak kawasan ini mendukung pertumbuhan yang di dan peranan kota, pembangunan kota ruang kota yang merupakan penjabaran kebijaksanaan Nasional dan Daerah serta jangka panjang.
 - Aspek teknis: kebijaksanaan yang mendukung upaya mendukung masukan pembangunan ruang kota, diantaranya meliputi: memperbaiki lingkungan, pembangunan lingkungan, perbaikan lahan, pemberian fasilitas dan utilitas secara tepat, pemanfaatan pola agribisnis dan wisata, ketertarikan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan sesuai dengan kaidah teknis perencanaan.
 - Penguatan pengelolaan: menyangkut aspek administrasi, kewenangan, hukum dan perundang undangan agar rencana kota dapat dilaksanakan melalui koordinasi penelitian, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian rencana kota.
- Berdasarkan hal tersebut diatas, maka ditinjau dari aspek-aspek pokok (strategis, teknis dan pengelolaan), tujuan pembangunan kota IKK Kedungpring dapat dirumuskan sebagai berikut.
1. Menciptakan keseimbangan antara kota IKK Kedungpring dengan kota lainnya di Satuan Wilayah Pembangunan II Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, dan antara kota IKK Kedungpring dengan daerah di lingkungannya yakni desa-desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Kedungpring, serta secara hirarkhi di wilayah Pembangunan Propinsi Jawa Timur pada umumnya dan di Kabupaten Lamongan pada khususnya.

2. Meningkatkan pembangunan sektor sektor kegiatan ekonomi di kota IKK Kedungpring yang lebih luas agar fungsi dan peranan kota IKK Kedungpring secara makro dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dengan demikian kota IKK Kedungpring sebagai bagian dari Wilayah Pembangunan SMP II eksistensinya dapat lebih diintegrasikan lagi.
3. Meningkatkan dan mendorong pembangunan sektor-sektor kegiatan ekonomi di kota IKK Kedungpring yang diperkirakan mempunyai potensi pelayanan makro yang dapat mendorong perkembangan sektor-sektor kegiatan ekonomi yang terkait di Satuan Wilayah Pembangunan II, serta wilayah pembangunan Kabupaten Lamongan pada umumnya, sehingga diharapkan terdapat hubungan saling ketergantungan yang saling menguntungkan antara kota IKK Kedungpring dengan daerah sekitarnya.
4. Mengarahkan pola tata ruang kota IKK Kedungpring yang serasi dan optimal, melalui :
 - Mendorong kegiatan fungsional yang tepat didalam ruang fisik kota dengan mempertimbangkan hubungan fungsional antar elemen kegiatan fungsional tersebut.
 - Indikator rencana mengenai pola jaringan transportasi yang mampu memajukan proses interaksi yang optimal.
 - Penyebaran fasilitas dan utilitas kota secara tepat dan merata sesuai dengan tingkat kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.
5. Menciptakan keadaan lingkungan kota IKK Kedungpring yang seimbang serasi dan harmonis melalui :

- Perkiraan mengenai kebutuhan yang optimal untuk elemen-elemen kota (fasilitas dan utilitas).
- Usaha pencegahan pencemaran lingkungan biotis dan abiotis.
- Pemanfaatan dan pelestarian elemen-elemen alamiah yang mengandung nilai-nilai khusus.

6. Meningkatkan produktivitas kota IKK Kedungpring dan daerah sekitarnya, sebagai usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran dari Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota IKK Kedungpring adalah :

1. Memanfaatkan sumber-sumber alam yang tersedia serta mengembangkan kegiatan-kegiatan yang diberikan pada kehidupan kota, serta memanfaatkan lapangan kerja bagi penduduk dalam rangka pencapaian sifat kota "Self Contained".
2. Meningkatkan penyediaan fasilitas sosial dan ekonomi yang lengkap meliputi penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, peribadatan, perbelanjaan dan perdagangan serta jasa-jasa yang tidak hanya melayani penduduk kota saja, melainkan juga melayani daerah sekitarnya.
3. Menyediakan dan meningkatkan penyediaan fasilitas kehidupan kota yang meliputi prasarana maupun sarana transport seperti perbaikan dan pembuatan jalan, yang ditujukan untuk merangsang perkembangan kota.
4. Meningkatkan sarana sarana utilitas kota seperti air minum/bersih, listrik, sanitasi, dan lain-lain.

5. Menciptakan kondisi/bentuk-bentuk lingkungan yang baik ditinjau dari komposisi, efisiensi penggunaan, keindahan dan kenikmatan, diantaranya dengan mengadakan penyebaran penduduk dan fasilitas/pelayanan yang merata di seluruh kota.

6. Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota IKK Kedungpring dimaksudkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan mempunyai rencana pembangunan jangka panjang kota IKK Kedungpring yang dapat berfungsi sebagai wadah keterpaduan bagi kepentingan dan aspirasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat II Lamongan serta masyarakat kota IKK Kedungpring sendiri.

Untuk jelasnya dalam bab ini dikemukakan pembahasan mengenai Rencana Umum Tata Ruang Kota IKK Kedungpring sebagai bagian dari penyusunan Rencana Tata Ruang Kota IKK Kedungpring.

3.2.1 Penentuan Fungsi dan Peranan Kota IKK Kedungpring

Kota adalah satuan permukiman bukan pedesaan yang berperan di dalam satuan wilayah pengembangan sebagai simpul jasa distribusi. Jumlah dan kepadatan penduduk relatif tinggi, dimana kegiatannya berorientasi pada kegiatan non pertanian (perdagangan, industri dan jasa), serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk mendukung kehidupan maupun penghidupan kota.

Seperti telah diungkapkan dalam bab 2 kota IKK Kedungpring diarahkan untuk berfungsi sebagai kota Perdagangan, Industri/perdagangan, Pendidikan dan kota pemerintahan dalam

lingkup Kecamatan Kedungpring yang mempunyai peranan dan kedudukan sebagai bagian dari SWP II yang berpusat di kota Babat Kabupaten daerah Tingkat II Lamongan.

Untuk mencapai fungsi kota tersebut strategi pembangunan yang akan dilakukan disamping mengembangkan kegiatan-kegiatan di atas, juga mengembangkan sarana dan prasarana penunjang. Didalam sub bab ini akan dikemukakan strategi pengembangan untuk dapat mencapai fungsi kota tersebut.

3.2.2 Kebijakan Penentuan Strategi Dasar Pengembangan Sektor-sektor Kegiatan Kota.

Sesuai dengan fungsi kota yang akan dikembangkan, maka kebijakan pengembangan struktur kegiatannya adalah :

1. Pengembangan fisik kota sampai tahun 2005/2006 secara umum dilaksanakan secara ekstensif dan intensif. Pengembangan fisik secara ekstensif yaitu penambahan kawasan fungsional kota dengan memanfaatkan lahan yang belum terbangun dan layak untuk dikembangkan. Ekstensifikasi ini *diprioritaskan* pada lahan yang relatif kurang subur dan dari segi pembiayaan tidak memerlukan dana besar untuk pembangunan fisik. Intensifikasi dilakukan dengan memanfaatkan lahan-lahan pada kawasan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kebijakan ini diambil guna memanfaatkan potensi perkembangan yang ada sekarang. Intensifikasi ini sejauh mungkin menghindari pembongkaran bangunan yang telah ada.

2. Pembatasan perkembangan fisik kota hingga tidak melampaui batas wilayah yang dapat dikembangkan sebagai kawasan perkotaan (kawasan potensial pengembangan kota)
3. Perkembangan fisik kota IKK Kedungpring pada masa yang akan datang diarahkan agar tidak terkonsentrasi hanya pada satu pusat saja, tetapi diarahkan pada pembentukan sub pusat-sub pusat baru. Pengelompokan kegiatan utama kota masih tetap dipertahankan di kawasan pusat kota dengan menyebarkan sebagian fungsinya ke sub pusat yang ada maupun yang akan dibentuk. Sehubungan dengan itu, maka dalam rencana pengembangan Kota IKK Kedungpring pada masa yang akan datang dibagi menjadi dua bagian Wilayah kota [BWK] yaitu satu Kawasan Pusat Kota (BWK-A) dan satu sub pusat kota (BWK-B).
4. Pemisahan fungsi kegiatan primer dengan fungsi sekunder, khususnya pada kawasan pusat kota.
5. Mengembangkan kegiatan-kegiatan utama kota, berupa :
 - Fasilitas pelayanan umum kota/pelayanan lingkungan perumahan.
 - Fasilitas perdagangan.
 - Industri/pergudangan.
 - Fasilitas pendidikan.
 - Jaringan jalan.
 - Fasilitas penunjang lainnya.

Elemen-elemen tersebut direncanakan sebagai berikut:

- a. Penyediaan fasilitas umum dipusatkan pada 2 [dua] kawasan, yaitu : di pusat kota untuk melayani kegiatan kota dan

wilayah; dan di pusat-pusat lingkungan untuk melayani kegiatan lingkungan Bagian Wilayah Kota. Direncanakan penyediaan fasilitas secara lengkap dan tepat sesuai dengan yang diperlukan.

- b. Pembangunan fasilitas perdagangan diarahkan untuk menunjang kelangsungan arus barang dari pusat-pusat produksi ke pusat-pusat perdagangan, konsumen dan penyaluran bahan pokok kebutuhan masyarakat.

Perkembangan perdagangan ini khususnya didalam skala regional antar wilayah, dimana kegiatan perdagangan ini perlu dibenahi dalam arti pemenuhan berbagai fasilitas penunjang perdagangan seperti lahan parkir, tempat bongkar muat dan lokasi fasilitas perdagangan. Sehingga arus distribusi dan koleksi barang kebutuhan bagi penduduk dapat terpenuhi.

- c. Pengembangan Industri/perdagangan

Kegiatan pengembangan industri diutamakan dan diarahkan :

- Industri pengolahan hasil pertanian
- Berbagai industri rumah tangga yang tidak membutuhkan lahan khusus, serta mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan (khususnya industri-industri yang mengolah potensi dan sumber daya dari Kecamatan dan Kota IKK Kedungpring).

- d. Pengembangan fasilitas pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan perluasannya diarahkan pada relevansi dengan kebutuhan pembangunan pertanian, industri dan jasa.

- e. Penyediaan utilitas kota terdiri dari listrik, saluran pembuangan, dan air bersih dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan. Untuk menyediakan listrik direncanakan dengan jaringan PLN. Untuk seluruh pembangunan direncanakan pembangunannya oleh Pemerintah Daerah dan swadaya masyarakat, dan untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih pengadaannya sebagian dari PDAM dan sebagian lainnya secara individu dari air tanah yang cukup bersih.

- f. Pengembangan jaringan jalan direncanakan sedemikian rupa sehingga dapat melayani secara sistematis dan efisien, melayani hubungan antar komponen kota yang ada, serta hubungan ke luar kota.

3.2.3 Kebijakan Kependudukan

Kebijakan kependudukan perlu diperhatikan mengingat penduduk merupakan subyek dan obyek pembangunan. Kebijakan kependudukan yang akan dibahas dalam subbab ini meliputi pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas penduduk, ketersediaan tenaga kerja dan pengaturan kepadatan penduduk.

- Pengendalian Jumlah Penduduk.

Jumlah penduduk Kota IKK Kedungpring pada tahun 1994 adalah sejumlah 11.781 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk IKK Kedungpring selama periode 1990-1994 rata-rata 0,68 % per tahun, diperkirakan penduduk Kota IKK Kedungpring pada tahun 2005/2006 akan berkembang menjadi 12.848 jiwa. Untuk menjaga agar pada tahun 2005/2006 jumlah penduduk kota IKK Kedungpring

tidak melebihi jumlah yang diproyeksikan, maka tingkat kelahiran perlu dipertahankan dan dikendalikan terus.

- Peningkatan Kualitas Penduduk

Kebijakan ini mencakup usaha perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pendidikan dan peningkatan produktivitas penduduk. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan fungsi dan peranan pendidikan serta penurunan tingkat ketergantungan kelompok penduduk 0 - 14 tahun, dan 55 tahun keatas, pada kelompok penduduk berusia produktif (15 - 54 tahun).

- Kesiadaan Tenaga Kerja

Sebagian besar penduduk kota IKK Kedungpring termasuk berusia produktif, oleh karena itu perlu disediakan lapangan kerja untuk menyerap tenaga kerja yang ada. Sektor lapangan kerja yang perlu dikembangkan adalah dari sektor perdagangan dan jasa, karena sektor ini mempunyai potensi yang cukup besar di masa datang dalam penyerapan angkatan kerja.

- Pengaturan Kepadatan Penduduk.

Tingkat kepadatan penduduk dalam kota IKK Kedungpring diatur sesuai dengan pembagian kota, baik tingkat kota, BKK dan tingkat lingkungan.

3.2.4 Kebijakan Sistem Pusat Pelayanan

Untuk mencapai fungsi dan peranan kota seperti yang diharapkan, serta untuk mengurangi beban pusat kota IKK Kedungpring, maka di dalam pengembangan kota IKK Kedungpring untuk Tahun

2005/2006 pusat pelayanan kota akan didistribusikan sesuai dengan hirarki pelayanannya, yaitu :

- Pusat Utama yang berfungsi sebagai pusat kota IKK Kedungpring.

- satu (1) Pusat Bagian Wilayah Kota (BWK) untuk melayani Bagian Wilayah Kota.

3.2.5 Kebijakan Pengembangan Utilitas dan Fasilitas

Salah satu tujuan umum Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota IKK Kedungpring adalah pengupayaan jenjang pelayanan fasilitas dan prasarana kota yang optimal, yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat kota. Akan tetapi untuk mencapai optimalisasi pelayanan antara masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan penyediaan fasilitas/prasarana pelayanan tersebut sering sangat sulit. Salah satu pendekatan yang sampai saat ini dipergunakan adalah penetapan skala pelayanan dari berbagai jenis fasilitas/prasarana yang diukur dari jumlah penduduk sebagai pendukung eksistensi (keberadaan) dari suatu fasilitas dan utilitas.

3.2.6 Kebijakan Tata Bangunan

Kebutuhan akan bangunan khususnya perumahan adalah, salah satu dari kebutuhan pokok manusia untuk mempertahankan eksistensinya. Karena itu dewasa ini pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan perumahan penduduk untuk seluruh lapisan masyarakat melalui

Perumahan dan Real Estate guna memudahkan penduduk memenuhi keperluan perumahan.

Di dalam menyusun Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Kota, dipertimbangkan kebutuhan dan pola alokasi perumahan merupakan prioritas utama yang harus diperhatikan guna memberikan arahan dalam usaha menyediakan ruang bagi pembangunan perumahan penduduk pada masa mendatang dan dalam usaha mengarahkan lokasi pengembangan kawasan perumahan dalam struktur kota.

Arahan lokasi pengembangan kawasan perumahan secara fisik pada umumnya harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain :

- Tidak terganggu oleh polusi [air, udara dan suara].
 - Mempunyai kemudahan untuk pencapaian yang relatif baik ke tempat kerja dan pusat-pusat pelayanan.
 - Mudah untuk pengembangan infrastruktur yang dibutuhkan (jaringan jalan, jaringan air minum, jaringan listrik dan jaringan utilitas lainnya).
- Sedangkan kebutuhan perumahan penduduk umumnya ditentukan oleh faktor sosial, ekonomi dan budaya setempat, seperti :
- Tingkat pendapatan golongan masyarakat.
 - Status sosial golongan masyarakat.
 - Pola budaya masyarakat setempat yang tercermin dari kecenderungan perkembangan kawasan perumahan penduduk.

Dalam upaya merangkum seluruh aspek-aspek tersebut didalam pengembangan kawasan perumahan di kota IKK Kedungpring, maka kebijaksanaan pola alokasi perumahan ditetapkan, yaitu :

1. Seluruh lapisan masyarakat penduduk kota IKK Kedungpring berhak membangun perumahan yang layak yang memenuhi unsur-unsur sehat, nyaman dan bebas polusi, tergantung kepada kemampuan sosial ekonomi masing-masing penduduk.

2. Dalam upaya mewujudkan lingkungan perumahan yang sehat dan nyaman, maka penyediaan ruang kawasan pengembangan perumahan diusahakan agar tidak berbaur dengan kegiatan fungsional yang lain, bebas polusi, mudah bagi pengembangan infrastruktur dan mudah mencapai tempat kerja dan pusat pusat pelayanan.

3.2.7 Kebijaksanaan Sistem Transportasi

Pengembangan sarana dan prasarana transportasi yang merupakan hal penting didalam pembangunan kota IKK Kedungpring. Prasarana transportasi terpenting adalah peningkatan dan pengembangan jaringan jalan alternatif yang dalam hal ini lebih diarahkan pada peningkatan kemampuan tingkat pelayanan jalan guna mendukung perkembangan lalu lintas yang terjadi.

Selain itu, peningkatan kondisi jalan-jalan yang ada perlu segera dilakukan. Khususnya peningkatan jalan-jalan lingkungan menjadi jalan kolektor sehingga arus lalu lintas tidak terkumulasi ke arah pusat kota, dimana pada pusat kota merupakan lokasi kegiatan fungsional wilayah.

3.2.8 Penentuan Dimensi Waktu Perencanaan

Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota IKK Kedungpring adalah suatu rencana yang

pada dasarnya disusun secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan kota IKK Kedungpring dalam suatu rangkaian yang bersifat komprehensif, berupa uraian-uraian, kebijaksanaan dan langkah-langkah yang bersifat mendasar untuk mencapai rencana yang bersifat praktis dan efektif.

1.1.1. Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana

Detail Tata Ruang Kota IKK Kedungpring itu dikaitkan dengan pendataran aktif, maka kemampuan dalam memperkirakan ketetapan akan suatu rencana tata ruang kota yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis planologis dan UU No 24 tahun 1992 adalah maksimum untuk tenggang waktu 10 tahun mendatang. Adapun tahapan kegiatan prioritas pelaksanaan pembangunan untuk tenggang waktu 5 tahun disesuaikan dengan rencana pembangunan lima tahun Nasional maupun Daerah. Dengan demikian bagi Kota IKK Kedungpring yang penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota pada tahun 1995/1996 sampai dengan tahun 2005/2006 dengan pentahapan sebagai berikut:

- Tahap I tahun 1995/1996 - 1998/1999.
- Tahap II tahun 1999/2000 - 2003/2004.
- Tahap III tahun 2004/2005 - 2005/2006.

3.3. Konsep Rencana

3.3.1 Sistem Pusat Pelayanan

Berdasarkan hasil analisis dan strategi pengembangan kota, maka sistem pusat pelayanan di Kota IKK Kedungpring akan

dilayani oleh 2 [dua] pusat pelayanan, yaitu pusat kota untuk melayani kegiatan kota dan wilayah kecamatan IKK Kedungpring dan pusat Bagian Wilayah Kota untuk melayani kegiatan lingkungan Bagian Wilayah Kota.

3.3.2 Sistem Struktur Kegiatan Kota

Seperti telah dijelaskan di dalam Buku II [analisis], Kota IKK Kedungpring mempunyai bentuk struktur ruang yang linear dan konsentris [memusat] untuk pusat kegiatan kota. Pada awal pertumbuhannya kota ini berada di pertemuan Jalan Loket Primer, kemudian mengikuti perkembangan secara linear ke arah Utara, Barat, Timur dan Selatan.

Berdasarkan keadaan tersebut di atas, selanjutnya dapat ditentukan arahan pengembangan kota IKK Kedungpring berdasarkan permasalahan yang ada saat ini dan kemungkinan pemecahannya dimasa datang, serta disesuaikan dengan kondisi dan kemungkinan perkembangan kota.

Untuk memperoleh struktur tata ruang yang dituju, diperlukan pengelompokan beberapa kegiatan yang mempunyai karakteristik yang selanjutnya dapat diketahui tingkat hubungan fungsional; atau sama atau mempunyai ketergantungan satu dengan yang lainnya, antar komponen kegiatan kota yang akan direncanakan. Selanjutnya lihat Tabel 3.4 - 1. Selanjutnya dapat diketahui tingkat hubungan fungsional antar komponen kegiatan kota yang direncanakan melalui matrik hubungan fungsional dapat lihat Gambar III - 3).

TABEL : 3.4 - 1

KARAKTERISTIK KEGIATAN KOTA KEDUNGPRING YANG AKAN DIKEMBANGKAN TAHUN 2005/2006.

No	Kawasan Kota	KARAKTERISTIK
1	Pusat Perdagangan	Pusat perdagangan ini meliputi toko/pertokoan, perdagangan grosir, pergudangan dan fasilitas pendukungnya. Komponen ini merupakan pusat awal distribusi dan koleksi barang baik berasal dari dalam kota untuk didistribusikan ke wilayah yang lebih luas (regional), maupun yang berasal dari regional (kota-kota lain) untuk didistribusikan ke pedagang eceran, penduduk di dalam kota. Dengan skala pelayanannya (lokal) kota dan regional, memerlukan akses tinggi ke seluruh bagian wilayah kota.
2	Sub Pusat Perdagangan	kegiatan perdagangan klasifikasi ini berfungsi melayani kebutuhan penduduk kota sehari-hari. Dalam hal ini, kelompok toko dan warung yang memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan skala pelayanan Blok dan atau lingkungan.
3	Jasa Ekonomi	Merupakan suatu kegiatan yang menunjang kegiatan perekonomian. Antara lain adalah Bank, Koperasi, jasa dan lainnya.
4	Sub Terminal	Melayani arus penumpang lokal dan regional di kota Kedungpring dan sekitarnya.
5	Fasilitas Sosial	Kegiatan pelayanan umum kepada masyarakat kota dan sekitarnya. termasuk fasilitas ini adalah Pendidikan, kesehatan, peribadatan rekreasi dan olah raga, kebudayaan dan makan.
6	Perumahan	Lingkungan tempat tinggal penduduk yang lokasinya tersebar di wilayah kota, terdiri dari berbagai type lingkungan perumahan berdasarkan kepadatan bangunan. Dalam hal ini termasuk fasilitas sosial ekonomi dengan skala pelayanan lingkungan.
8	Industri dan Perdagangan	Suatu kegiatan yang mengolah bahan setengah jadi untuk ditujukan bagi pemasaran regional, sehingga diperlukan akses tinggi terhadap bahan baku, dan pemasaran.

Sumber : Hasil Analisis

GAMBAR : III - 3

HUBUNGAN FUNSIONAL ANTAR KEGIATAN RUANG KOTA DI KOTA KEDUNGPRING TAHUN 2005/2006

1	PUSAT PERDAGANGAN								
2	SUB PUSAT PERDAGANGAN	3							
3	JASA EKONOMI	3	3						
4	SUB TERMINAL	3	3	2					
5	PUSAT PEMERINTAHAN	3	0	2	3				
6	FASILITAS SOSIAL	1	1	2	1	2			
7	PERUMAHAN	1	3	1	1	2	3		
8	INDUSTRI / PERGUDANGAN	1	1	1	1	1	1	1	

Keterangan :

- 3 : Hubungan fungsional antar komponen sangat erat
Kedua komponen diperlukan akses yang baik/jarak yang berdekatan.
- 2 : Hubungan fungsional antar komponen kurang kuat
Kedua komponen dapat saling berdekatan dengan persyaratan, namun disarankan untuk berjauhan
- 1 : Hubungan fungsional antar komponen lemah
Kedua komponen diusahakan untuk tidak saling berdekatan

Sumber : Hasil Analisis

Setelah hubungan fungsional antara komponen kota dapat disusun dan dibandingkan dengan alternatif yang telah ada, maka kemudian dapat di peroleh alternatif pengembangan fisik Kota IKK Kedungpring berdasarkan kondisi serta potensi perkembangan yang dimiliki. Berdasarkan hal tersebut dan analisis konsepsi tata ruang Kota IKK Kedungpring (Buku Analisa) rencana tata ruangnya terbagi atas 2 (dua) SWK, 1 SWK pusat kota dan 1 SWK sub pusat kota.



PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

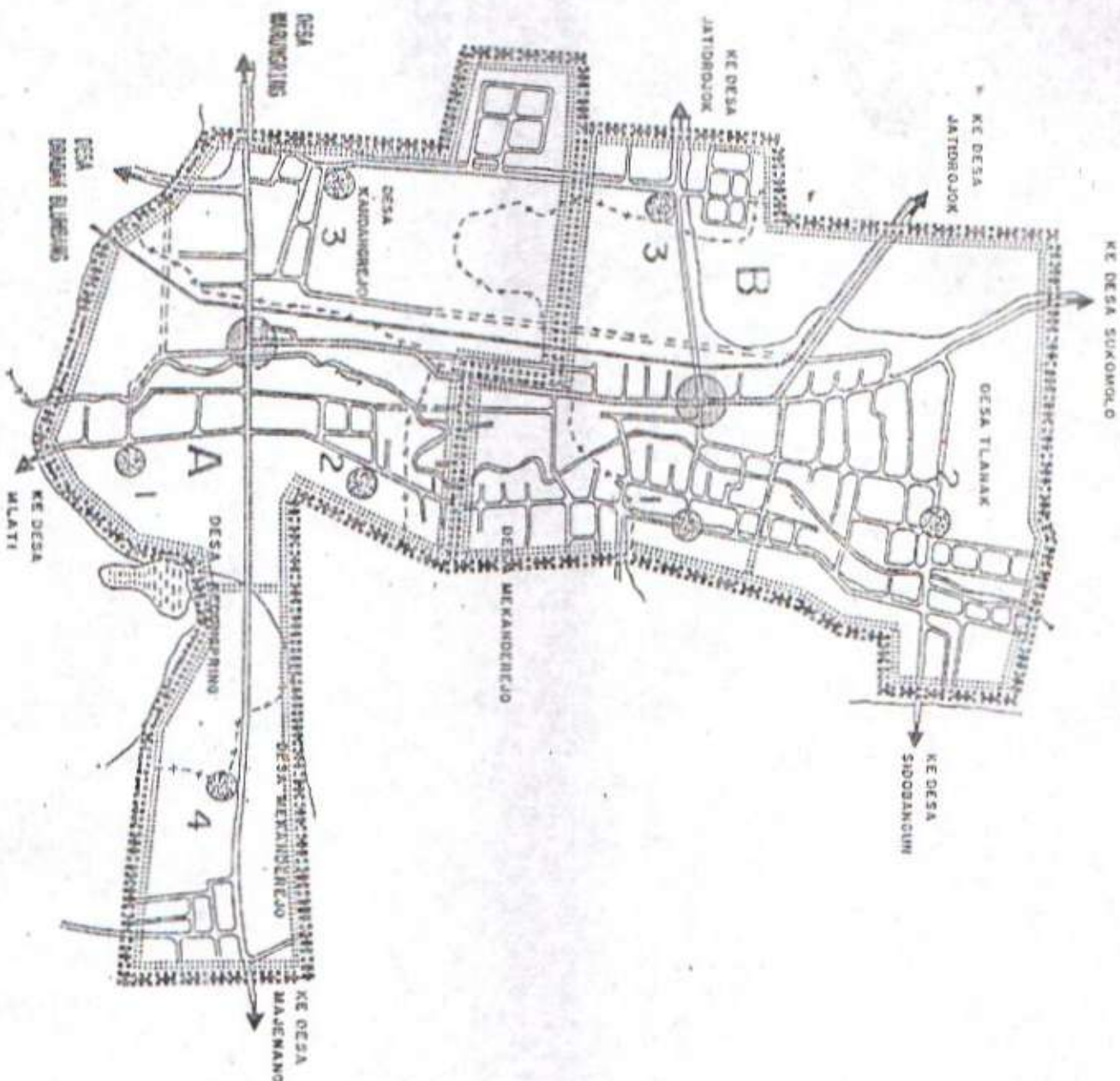
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IDUKOTA KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHAP 1995/1996 - 2005/2006

PETA RENCANA
Pembagian Unit Lingkungan
Dan Pusat Pelayanan

Legenda :

- BATAS KOTA
- - - BATAS DESA
- JALURAN JALAN
- PEL. KEBERSIHAN
- SAMPAH
- LIMBAH

- PUSAT KOTA / DAK
- PUSAT UNIT LINGKUNGAN
- BATAS BAK
- BATAS UNIT LINGKUNGAN



SKALA : 1:30000

DAFTAR : 111 - 4

UTARA

SKALA

1:30000

UTARA

1. Masjid
2. Industri dan pergudangan
3. Perbelanjaan lingkungan
4. Pos keamanan lingkungan
5. Gedung Serbaguna
6. Puskesmas pembantu/poliklinik.

Untuk lebih jelasnya struktur kegiatan di Kota IKK Kedungpring dapat dilihat pada Gambar III-5 (*Rencana Struktur kegiatan Kota*).

3.6 Kapasitas Tampung BWK

Sesuai dengan arahan yang ditetapkan didalam RUTRK tahun 2005/2006, serta hasil analisis bagi daya tampung dan distribusi penduduk masing-masing BWK yang diarahkan bagi kawasan perencanaan tahun 2005/2006, yaitu:

- Tingkat kepadatan 28 jiwa/Ha untuk BWK A.
- Tingkat kepadatan 35 jiwa/Ha untuk BWK B.

Dari rencana kepadatan penduduk yang diarahkan pada masing-masing BWK tersebut, maka daya tampung yang direncanakan adalah:

- BWK-A dengan jumlah penduduk 6.048 jiwa.
- BWK-B dengan jumlah penduduk 6.800 jiwa.

3.7 Rencana Penggunaan Lahan

Seperti telah dijelaskan pada konsep pengembangan tata ruang kota IKK Kedungpring dan rencana struktur tata ruang kota,

bahwa pengembangan kota IKK Kedungpring akan dilakukan secara intensif dan ekstensif.

Bertitik tolak dari hal tersebut, serta hasil analisis yang telah dilakukan, maka penggunaan ruang/lahan di kota IKK Kedungpring pada tahun 2005/2006 akan terdiri dari :

a. Perumahan.

Kawasan perumahan di Kota IKK Kedungpring direncanakan untuk menampung penduduk sebanyak 12.848 jiwa pada tahun 2005/2006. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada tahun 2005/2006 diperlukan rumah sebanyak 3.211 buah, yang memerlukan lahan seluas 112,38 Ha. Pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan ini terutama ditekankan kepada intensifikasi penggunaan lahan-lahan yang ada di kawasan pemukiman.

b. Perkantoran/Pusat Pemerintahan.

Kawasan perkantoran di Kota IKK Kedungpring dikembangkan di sepanjang jalan utama (Lokal Primer) selama tidak mengganggu fungsi kegiatan lain di jalan ini juga ke arah timur (jalan Lokal Primer).

Prioritas pengembangan perkantoran di kawasan ini adalah perkantoran dengan tingkat pelayanan regional (Kecamatan). Sedangkan untuk perkantoran dengan tingkat pelayanan lokal (kota) dan lingkungan (Bagian Wilayah Kota), akan didistribusikan pada masing-masing wilayah tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN 1995/1996 - 2005/2006

PETA RENCANA
STRUKTUR KEGLATAN KOTA
TAHUN 2005/2006

LETTERMAN: 1

- | | |
|---|----------------|
|  | BATAS KOTA |
|  | BATAS DESA |
|  | JARAGAN MELAN |
|  | REL KERETA API |
|  | SUNGAI |
|  | MAJLIS |

FI KEGIATAN PRIMER

1. PASIR/PETAKONGSIAN GROSIR
2. INDUSTRI/GUDANG

(F2) KEGIATAN SEKUNDER

1. PERANGKAT/RSK
2. PENDIDUKAN
3. PERDAGANGAN DAN JASA
4. PERABATAN
5. OPEN TEMER/RI/GUDANG, SELEK PAK, INDUSTRI KECIL/ BAWAH BANGUNAN
6. KESIMPATAN
7. PANGKALAN CUKAI/ KENDARAAN LAMAR
8. LINGKARAN CUKAI BAGI DARI KEDIRIKAN

SUMBER : HRSJL RENCANA



GAMBAR : III - 5

DISPERSED



SKALA
1:15000

c. Pusat/Sub Pusat Perdagangan.

Pusat perdagangan berfungsi melayani seluruh kota, sedangkan sub pusat perdagangan hanya melayani satu lingkungan (Bagian Wilayah Kota) saja. Kawasan pusat perdagangan dikembangkan di lokasi yang telah ada dengan menambah fasilitas pendukung fasilitas perdagangan (Parkir, tempat Bongkar Muat dan lainnya).

Sub pusat perdagangan akan dikembangkan di tiap pusat Bagian Wilayah Kota dengan skala pelayanan Bagian Wilayah Kota. Jadi dalam hal ini pengembangan sub pusat perdagangannya mengikuti sistem pusat-pusat pelayanan.

d. Fasilitas Umum.

Fasilitas umum yang akan dikembangkan di Kota IKK Kedungpring meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, peribadatan, budaya dan rekreasi, olah raga/ruang terbuka, kuburan dan tempat pembuangan sampah sementara.

Fasilitas pendidikan Sekolah Taman Kanak-kanak direncanakan penempatannya akan merata disetiap pemukiman. Sedangkan fasilitas pendidikan Sekolah Dasar disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dari fasilitas ini, serta melayani beberapa lingkungan pemukiman.

Fasilitas Pendidikan Sekolah Lanjutan Pertama (SMP) dan SLTA direncanakan untuk dikembangkan di bagian timur (sesuai dengan alokasi SMP dan SMA yang telah ada saat ini).

Fasilitas kesehatan yang berupa Pos kesehatan/poliklinik akan didistribusikan disetiap Bagian Wilayah Kota, sedangkan

Apotik ditempatkan di fasilitas perdagangan guna mendapatkan akses yang baik yaitu di sepanjang jalan regional.

Fasilitas ekonomi yang akan dikembangkan ini berupa toko/warung yang akan di distribusikan di kawasan-kawasan permukiman secara merata.

Fasilitas peribadatan masjid dan langgar yang ada di kota IKK Kedungpring sudah mampu melayani penduduk kota hingga tahun 2005/2006, tapi kondisi beberapa fasilitas ini masih perlu ditingkatkan lagi. Oleh sebab itu pengembangan fasilitas peribadatan adalah pemugaran tempat ibadat.

Fasilitas kebudayaan dan rekreasi terdiri dari gedung-gedung pertemuan, Gedung serba guna dan lainnya. Alokasi dari kegiatan ini di pusat kota dan pusat-pusat BWK.

Fasilitas olah raga dan ruang terbuka. Fasilitas ini terdiri dari lapangan olah raga, taman terbuka, ruang terbuka. Taman kota akan diletakkan dalam pemukiman-pemukiman penduduk, lapangan olah raga akan diletakkan disekitar sub pusat, sedangkan ruang terbuka dan jalur hijau berguna untuk mempertahankan kawasan-kawasan yang mempunyai tingkat visualitas yang baik serta kawasan-kawasan aliran sungai, dan sepanjang saluran yang ada.

Fasilitas kuburan pengembangannya adalah intensifikasi lahan, lahan kuburan yang ada khususnya bagi lahan-lahan kuburan yang berada di luar kawasan pusat kota.

Fasilitas Sub terminal yang dikembangkan adalah pembangunan sub terminal sebagai pengganti pangkalan sementara di

pertemuan jalan dekat pasar umum. Sedangkan fasilitas parkir merupakan pengembangan untuk parkir di pusat perdagangan dan sub pusat perdagangan.

Fasilitas tempat pembuangan sampah akhir akan diarahkan ke luar Kota IKN Kedungpring (Kota Babat) dengan cara pengeloa- iaannya adalah dengan sistem Controlled Sanitary Land Fill.

c. Lahan Cadangan/ruang terbuka.

Lahan Cadangan/ruang terbuka adalah kawasan-kawasan yang belum direncanakan untuk pengembangan kota IKN Kedungpring hingga periode tahun 2005/2006, umumnya merupakan lahan-lahan pertanian dan kedatangan penduduknya rendah. Kawasan ini sebaiknya dihindari bagi pengembangan fisik kota. Adapun peruntukan penggunaan bagi kawasan-kawasan ini adalah untuk penggunaan Non-perkotaan (Kawasan terbuka dan pertanian).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.7 - 1, Tabel 3.7 - 2 dan Gambar III-6 (Rencana Penggunaan Lahan).

3.8 Rencana pengembangan obyek khusus

Rencana pengembangan obyek khusus terdiri atas Ruang terbuka Hijau dan industri/perdagangan. Penjelasan masing-masing obyek adalah sebagai berikut :

3.8.1 Rencana Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

Ruang terbuka hijau sebagai salah satu komponen ruang kota, dan sangat erat kaitannya dengan pengendalian kelestarian lingkungan hidup dan ekosistem. Di dalam pengembangannya di Kota

IKN Kedungpring diarahkan bagi kawasan-kawasan mempunyai karakteristik :

- Sepanjang Airan Sungai dan Rel Kereta Api
- Paru-paru kota (berupa taman dan tempat bermain)
- Lahan Cadangan perkembangan kota
- Pemukiman kedatangan tinggi

a. Kawasan Airiran Sungai.

Bagi kawasan-kawasan sepanjang aliran Sungai dan rel kereta api dengan radius 10-25 meter dari tepi, dan hingga saat ini masih belum terbangun di arahkan untuk jalur hijau.

TABEL : 3.7-1

KERUTUKAN DAN PENAMBAHAN PENYEDIAAN RUANG DI KOTA KEDUNGPRING TAHUN 1994/1995 - 2005/2006

Jenis Fasilitas	Kebutuhan Ruang Kota									
	1994/1995		1995/1996		1996/1999		2000/2004		2005/2006	
	Luar (ha)	Luar (ha)	Luar (ha)	Luar (ha)	Luar (ha)	Luar (ha)	Luar (ha)	Luar (ha)	Luar (ha)	Luar (ha)
A. Fasilitas Perumahan	16,330	14,490	17,350	20,410	17,350	20,410	17,350	20,410	20,410	18,070
B. Fasilitas Kantor	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240
C. Fasilitas Pertokoan	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710
D. Fasilitas Perdagangan	2,010	3,950	1,850	3,950	1,850	3,950	1,850	3,950	3,950	1,850
E. Fasilitas rekreasi dan lain-lain	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310
F. Pertanian	0,540	0,540	1,550	0,540	1,550	0,540	1,550	0,540	0,540	1,550
G. Kesehatan	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840
H. Pendidikan	103,130	103,130	0,310	106,350	0,310	106,350	0,310	106,350	0,310	106,350
I. Industri/perdagangan	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
J. Industri/kawasan lain	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
K. Ruang terbuka hijau	17,310	17,310	0,500	16,760	0,500	16,760	0,500	16,760	0,500	16,760
L. Pertanian	37,220	40,340	0,200	40,660	0,200	40,660	0,200	40,660	0,200	40,660
GRAND TOTAL (ha)	186,470	187,770	40,050	227,460	51,280	241,040	50,740	245,040	50,330	245,040

Sumber : Hasil perhitungan Tabel 3.7-2

TABEL : 3.7-2

KEBUTUHAN PENYEDIAAN FASILITAS DAN RUANG DI KOTA IKK KEUNGPRING TAHUN 1995/1996-2005/2006

Jenis Fasilitas	Penggunaan Lahan Eksisting 1994/1995		1995/1996		Kebutuhan Fasilitas Kota 1998/1999		2003/2004		2005/2006	
	Kebu- tuhan (unit)	Luas Lahan (Ha)	Kebu- tuhan (unit)	Luas Lahan (Ha)	Kebu- tuhan (unit)	Luas Lahan (Ha)	Kebu- tuhan (unit)	Luas Lahan (Ha)	Kebu- tuhan (unit)	Luas Lahan (Ha)
A. Fasilitas Pendidikan										
- Taman Kanak-kanak	7	0.840	7	0.840	8	0.960	8	0.960	8	0.960
- Sekolah Dasar	11	1.650	19	2.850	19	2.850	19	2.850	20	3.000
- Sekolah Lanjutan Pertama	4	6.000	10	16.000	10	16.000	10	16.000	10	16.000
B. Fasilitas Kesehatan										
- Puskesmas	1	0.120	1	0.120	1	0.120	1	0.120	1	0.120
- Tempat Praktik Dokter		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000
- Apotik		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000
- Poliklinik	2	0.120	2	0.300	2	0.300	2	0.300	2	0.300
C. Fasilitas Peribadatan										
- Masjid Kota		0.000		0.175		0.175		0.175		0.175
- Masjid		0.150		0.150		0.150		0.150		0.150
- Langgar		0.500		0.500		0.500		0.500		0.500
D. Fasilitas Perdagangan										
- Warung	36	0.330	47	0.470	48	0.480	50	0.500	52	0.510
- Toko	26	0.390	26	0.345	24	0.360	24	0.375	24	0.375
- Pertokoan (BWK)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000
- Pertokoan + pasar	1	1.350	1	1.350	1	1.350	1	1.350	1	1.350
E. Fasilitas Perdagangan dan OR										
- Fasilitas rekreasi dan OR		0.000		1.175		1.500		1.500		1.500
- Tempat bermain	3	0.375	47	1.875	48	1.900	50	1.250	52	1.375
- Taman & Lapangan OR		0.000		2.400		2.400		2.400		2.400
F. Perkantoran										
- RW/UL	7	0.140	7	0.140	7	0.140	7	0.140	7	0.140
- BWA		0.000		0.800		0.800		0.800		0.800
- Kecamatan		1.400		1.400		1.400		1.400		1.400
- Serangkat Kecamatan/Desa	1	1.400	1	1.400	1	1.400	1	1.400	1	1.400
- Kantor Swasta		0.000		0.500		0.500		0.500		0.500
G. Kebudayaan										
- Balai Pertemuan (BWK)	1	0.040	2	0.080	2	0.080	2	0.080	2	0.080
- GCS (BWK)	4	0.800	4	0.800	4	0.800	4	0.800	4	0.800
- Keenian		0.000		0.200		0.200		0.200		0.200
- Bioskop		0.000		0.200		0.200		0.200		0.200
H. Perumahan										
- Kapling Besar	294	14.700	296	14.800	304	15.200	312	15.600	321	16.050
- Kapling Sedang	983	35.320	988	35.520	913	36.520	938	37.520	987	38.520
- Kapling Kecil	1.767	33.010	1.776	33.250	1.826	34.780	1.876	36.280	1.927	37.810
I. Industri/perdagangan										
- Industri/makam (%)		0.500		10.000		10.000		10.000		10.000
- Ruang terbuka hijau		17.672		17.200		16.260		16.768		16.267
K. Transportasi		37.220		46.545		47.498		48.370		49.267
KEBUTUHAN LAHAN (Ha)										
		186.102		232.727		237.488		241.849		246.434
LAHAN CADANGAN (Ha)										
		228.758		182.133		177.372		173.013		168.426
LUAS LAHAN KOTA (Ha)										
		414.860		414.860		414.860		414.860		414.860

Sumber : Hasil perhitungan



**PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN 1995/1996 - 2005/2006**

**RENCANA
PENGUNAAN LAHAN**

KETERANGAN:

---	BATAS KOTA
-+ -+ -+ -+	BATAS DESA
	PERUMAHAN
	INDUSTRI
	PERDAGANGAN
	PERTANIAN
	HUTAN
	PERAIRAN
	KUBURAN
	EDUKASI
	JALAN
	ALIRAN AIR
	INDUSTRI
ST	SARUNG
	LAHAN PERTANIAN

SUMBER - HASIL RENCANA



GAMBAR : 111 - 6

DIGAMBAR :

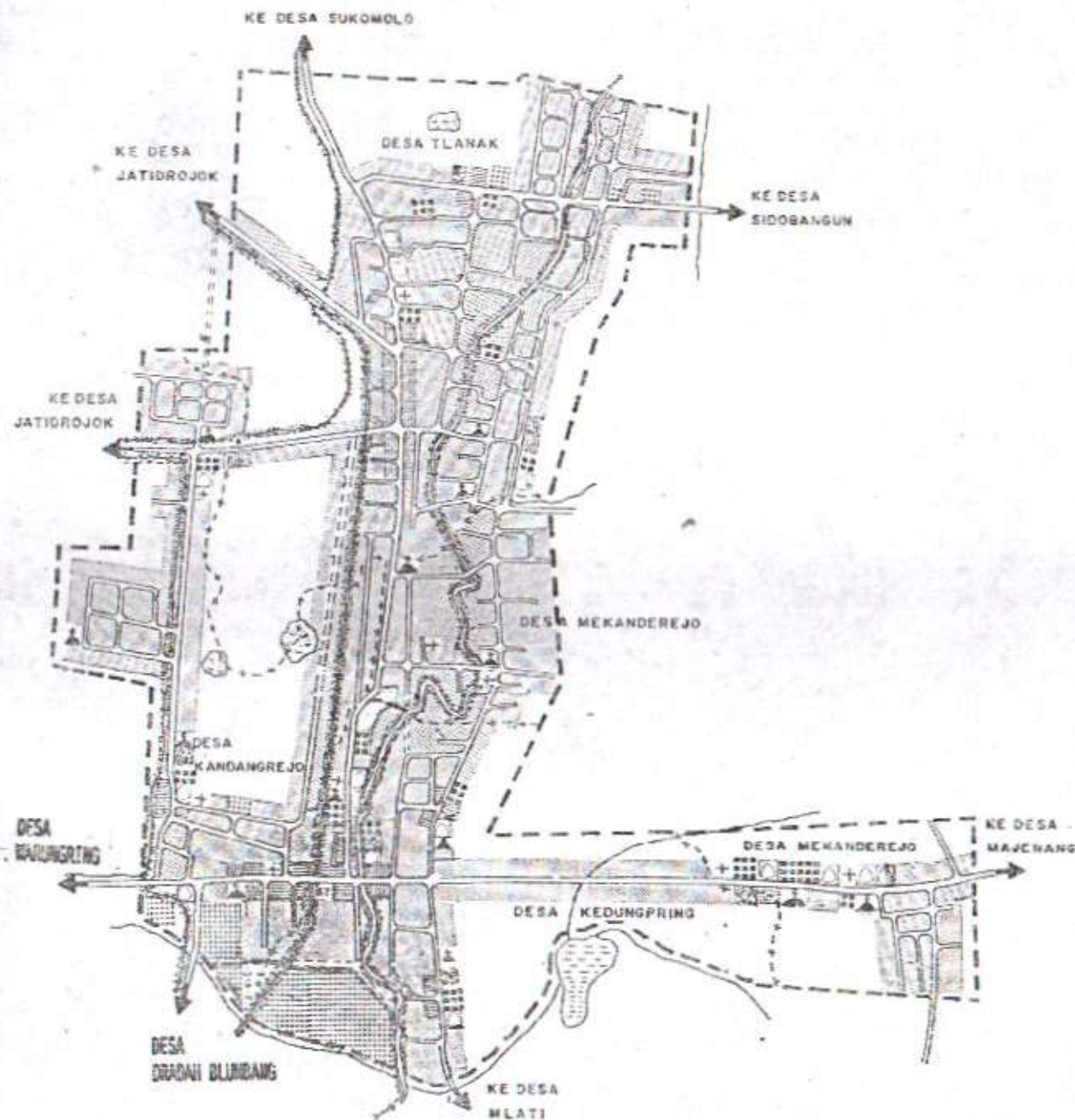
DIPERIKSA :



UTARA

SKALA

1 : 15000



b. Paru-paru Kota.

Ruang terbuka di Pusat kota dan kawasan-kawasan yang padat yang akan dikembangkan di Kota IKK Kedungpring akan menjadikan kota IKK Kedungpring sebagai suatu kawasan tempat tinggal yang asri. Keberadaan ruang terbuka tersebut dapat disatukan sebagai taman tempat bermain atau taman-taman kota.

c. *Lahan Cadangan Perkembangan Kota.*
Bagi kawasan-kawasan yang belum diarahkan pemanfaatan ruangnya bagi kebutuhan ruang kota IKK Kedungpring sampai tahun 2005/2006, maka arahan pemanfaatannya adalah ruang terbuka hijau (pertanian).

3.8.2 Rencana Pengembangan Industri dan Perdagangan

Bertitik tolak dengan kecenderungan investor yang ingin membuka kegiatan industri dan perdagangan di kawasan kota IKK Kedungpring, maka rencana pengembangan industri di kota IKK Kedungpring adalah :

Jenis Industri

- Jenis industri yang akan dikembangkan adalah clean industri
- Industri yang mengolah bahan setengah jadi.
- Industri dengan tingkat teknologi yang tidak terlalu tinggi agar dapat menyerap angkatan kerja dari lingkungan sekitar.

Lokasi Industri

- Kegiatan industri sesuai dengan tujuan pemersatu dan bahan baku untuk proses, maka arahan kegiatan industri ini di bagian Selatan kota jadi satu dengan perdagangan yang ada saat ini).

- Diperlukan suatu lingkungan yang terpisah dengan kegiatan lain yang berorientasi belakang.

- Diperlukan jalur pemisah (buffer) dengan permukiman minimal 50-100 meter dengan ruang terbuka hijau.

3.9 Rencana Tata Bangunan

Rencana tata bangunan (pengaturan bangunan) ditujukan untuk menciptakan lingkungan kota yang tertib bangunan dan sarannya sehingga tercipta kota yang sehat, nyaman dan indah. Yang meliputi Pengaturan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Pengaturan Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

3.9.1 Pengaturan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Pengaturan Koefisien Dasar Bangunan atau Angka Bangun Dasar Bangunan (ABDB) adalah perbandingan luas lantai bangunan terhadap luas persil, pengaturannya sebagai berikut:

- Bagi bangunan yang telah ada dan tidak memenuhi syarat disahkan untuk memenuhi ketetapan yang diberlakukan kemudian.
- Bagi bangunan baru diharuskan memenuhi peraturan yang telah ditetapkan.

3.9.2 Pengaturan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

KLB atau Koefisien Lantai Bangunan sangat tergantung pada kebutuhan ruang kegiatan pada masa yang mendatang serta karakteristik setiap kegiatannya. KLB untuk kegiatan yang bersifat produktif, mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, maka besarnya

angka mencapai 2 - 3 kali KDB. Pada umumnya keadaan ini terjadi pada pusat kota (pusat perdagangan) dengan arahan ketinggian bangunan maksimal 3 lantai dan lainnya maksimal 2 lantai.

Jelasnya Pengaturan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Pengaturan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) lihat Tabel 3.9-1.

TABEL 3.9-1

RENCANA PENGATURAN BANGUNAN KOTA KEDUNGPRING TAHUN 2005/2006

No.	Jenis Kegiatan	KDB	KLB	Tinggi Bangunan
1.	Perdagangan	0,6 - 0,8	0,6 - 2,0	1 - 3
2.	Perkantoran	0,4 - 0,7	0,4 - 1,8	1 - 3
3.	Fasilitas Umum	0,4 - 0,6	0,4 - 1,0	1 - 2
4.	Perumahan	0,4 - 0,7	0,4 - 1,2	1 - 2
5.	Rekreasi/Taman/Lap. Gr.	< 0,4	< 0,4	1

Sumber: Penetapan Rencana

3.9.3 Pengaturan Garis Sempadan

Untuk mencapai tertib pengaturan ruang fisik Kota IKK Kedungpring, selain diatur oleh KDB, KLB, dan Ketinggian bangunan yang diperbolehkan untuk setiap penggunaan masing-masing BWK yang direncanakan, pengaturan Garis Sempadan, pun merupakan salah satu pengaturan bangunan lebih lanjut. Pengaturan Garis sempadan disesuaikan dengan fungsi jalan, yaitu:

- Damaja: lebar perkerasan ditambah dengan lebar bahu jalan sempai saluran.
- Damaja: Daerah yang dibatasi oleh pagar rumah dengan pagar rumah yang ada di seberangnya.
- Damaja: daerah yang dibatasi oleh tritis rumah dengan tritis rumah yang ada di seberangnya.

Jadi pengaturan Garis sempadan di kawasan rencana, akan disesuaikan dengan fungsi jaringan jalan.

3.10 Rencana Pengembangan Sistem Transportasi

Rencana pengembangan sistem transportasi secara garis besar terdiri atas dua aspek, yaitu rencana sistem sirkulasi transportasi dan rencana pengembangan prasarana transportasi. Dalam kaitannya dengan pengembangan kota IKK Kedungpring, maka tujuan perencanaan sistem transportasi kota adalah untuk memudahkan hubungan antar bagian-bagian wilayah kota secara murah, aman dan lancar. Sehingga akan menunjang sirkulasi kegiatan penduduk yang dapat memberikan manfaat ganda pada sektor perekonomian kota IKK Kedungpring.

Konsep dasar rencana pengembangan sirkulasi transportasi di kota IKK Kedungpring adalah seperti yang telah diungkapkan pada bagian sebelumnya, yaitu bahwa semua bagian wilayah dapat dijangkau oleh jaringan transportasi secara efisien dan efektif.

Rencana pengembangan prasarana transportasi kota IKK Kedungpring meliputi peningkatan fungsi jaringan jalan yang sudah ada, pembuatan jalan baru, pembangunan dan pengembangan Sub terminal, penyediaan Halte, dan penyediaan tempat-tempat parkir khususnya di pusat perdagangan.

Peningkatan fungsi jaringan jalan diprioritaskan pada jalan yang menghubungkan antar pusat BWK (Bagian Wilayah Kota) dan pusat BWK dengan pusat kota, serta jalan alternatif.

Pembangunan jalan baru di bagian utara dan selatan direncanakan sebagai konsekuensi pengembangan kota dan pengalihan volume lalu lintas regional agar tidak melalui pusat kota. Sehingga arus lalu lintas di kawasan ini tidak terlalu padat. Peningkatan jalan ini sebagai alternatif pengembangan jaringan jalan regional harus terkait dengan perencanaan lokasi Sub terminal yang akan direncanakan.

Pembuatan jalan baru ini diusahakan untuk tidak memotong wilayah terbangun, hal ini berkaitan dengan investasi bagi pembebasan tanah untuk pembangunan jaringan baru. Disamping itu juga perlu diperhatikan dimensi geometrik jalan harus sesuai dengan persyaratan teknik lalu lintas.

Fungsi jaringan jalan di kota IKK Kedungpring direncanakan terdiri dari :

- Jalan Lokal Primer/Arteri Sekunder : Jalan ini mempunyai fungsi menghubungkan antar kecamatan namun berfungsi pula dalam struktur ruang kawasan rencana sebagai jalan Arteri Sekunder.
- Jalan Kolektor Sekunder : adalah jalan-jalan yang menghubungkan Pusat SWK dengan pusat Lingkungan, atau pusat Lingkungan dengan pusat Lingkungan.
- Jalan Lokal Sekunder : adalah jalan-jalan yang menghubungkan pusat lingkungan dengan lingkungan perumahan, atau lingkungan perumahan yang satu dengan yang lainnya.

Fungsi jalan yang ada tersebut dibedakan dimensi geometriknnya sesuai dengan Undang-undang nomor 13 tahun 1980 dan

Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 1935. Rencana Pengembangan jaringan jalan di kota IKK Kedungpring dapat dilihat pada Gambar III-7 (*Rencana Pengembangan Jaringan Jalan*) dan Gambar III-8 (*Rencana Struktur Jaringan Jalan*).

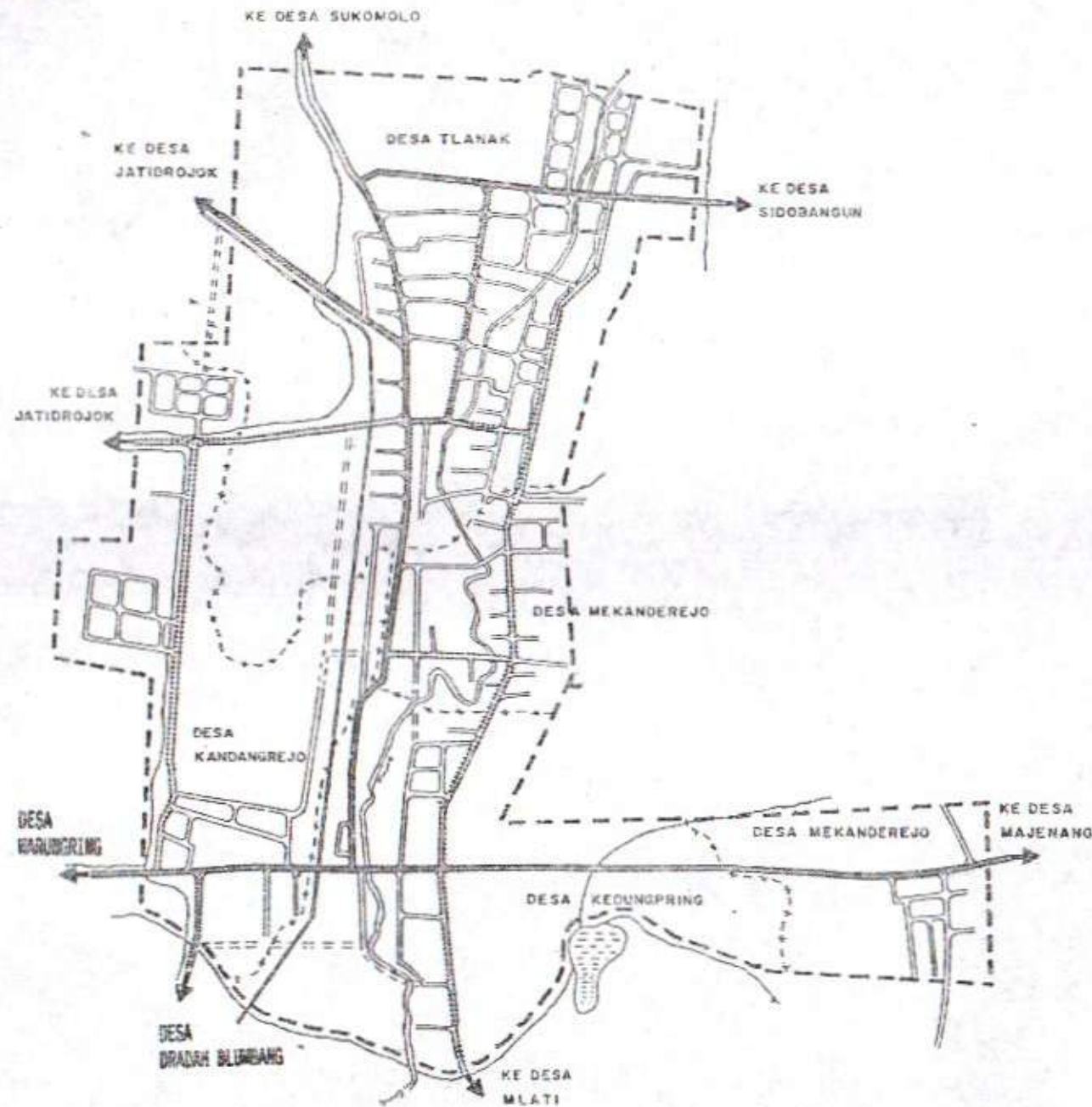
Untuk mengefisienkan sirkulasi lalu lintas angkutan umum di kota IKK Kedungpring diperlukan pengaturan pola route angkutan umum. Adapun Arah, Route angkutan umum dan lokasi Sub terminal/Areal Parkir Kendaraan (APK) dan Halte yang direncanakan di kota IKK Kedungpring di dalam melayani kebutuhan perkembangan di kota IKK Kedungpring sampai dengan akhir tahun perencanaan, dapat dilihat pada Gambar III-9 (*Rencana Pola Perangkutan dan Fasilitas Transport*).

3.11 Rencana Pengembangan Utilitas Kota

Sejalan dengan perkembangan Kota IKK Kedungpring dan peranannya pada tahun mendatang, dituntut adanya peningkatan pelayanan utilitas kota. Rencana pengembangan utilitas kota terdiri dari perencanaan pengadaan pelayanan air minum, rencana sistem penyaluran air buangan, pengelolaan sampah dan perencanaan pengembangan jaringan listrik.

3.11.1 Air Bersih

Sistem perpipaan air bersih yang ada sekarang di kota IKK Kedungpring dikelola oleh PDAM dan belum menjangkau seluruh Bagian Wilayah Kota, sehingga pada masa yang direncanakan dapat melayani kebutuhan air bersihnya penduduk kota IKK Kedungpring.



PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN 1985/1986 - 2005/2006

PETA RENCANA
PENGEMBANGAN
JARINGAN JALAN

KETERANGAN :

- BATAS KOTA
- +--+ BATAS DESA
- ===== JARINGAN JALAN
- ==>==>==> REL KERETA API
- ~~~~~ SUNGAI
- WADUK
- [Pattern] PENYESUAPAN LEBAR JALAN
- [Pattern] PENINGKATAN KUALITAS JALAN TAHAP SATU
- [Pattern] PENINGKATAN KUALITAS JALAN TAHAP DUA
- [Pattern] ALTERNATE JALAN BARU

SUMBER : HASIL RENCANA



GAMBAR : III - 7

DIGAMBAR :

DIPERIKSA :



SKALA
1:15000



PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN 1985/1986 - 2005/2006

PETA RENCANA STRUKTUR JARINGAN JALAN

KETERANGAN:

- BATAS KOTA
- - - BATAS DESA
- JARINGAN JALAN
- REL KERETA API
- SUNGAI
- WADUK

- JALAN ARTERI SEKUNDER /
LOKAL PRIMER
- JALAN LOKAL PRIMER
- JALAN KOLEKTOR SEKUNDER
- JALAN LOKAL SEKUNDER
- ALTERNATIF JALAN BARU

- A. DAWASA
- B. DAMIA
- C. DAMAJA

SUMBER : HASIL RENCANA



GAMBAR : III - 8

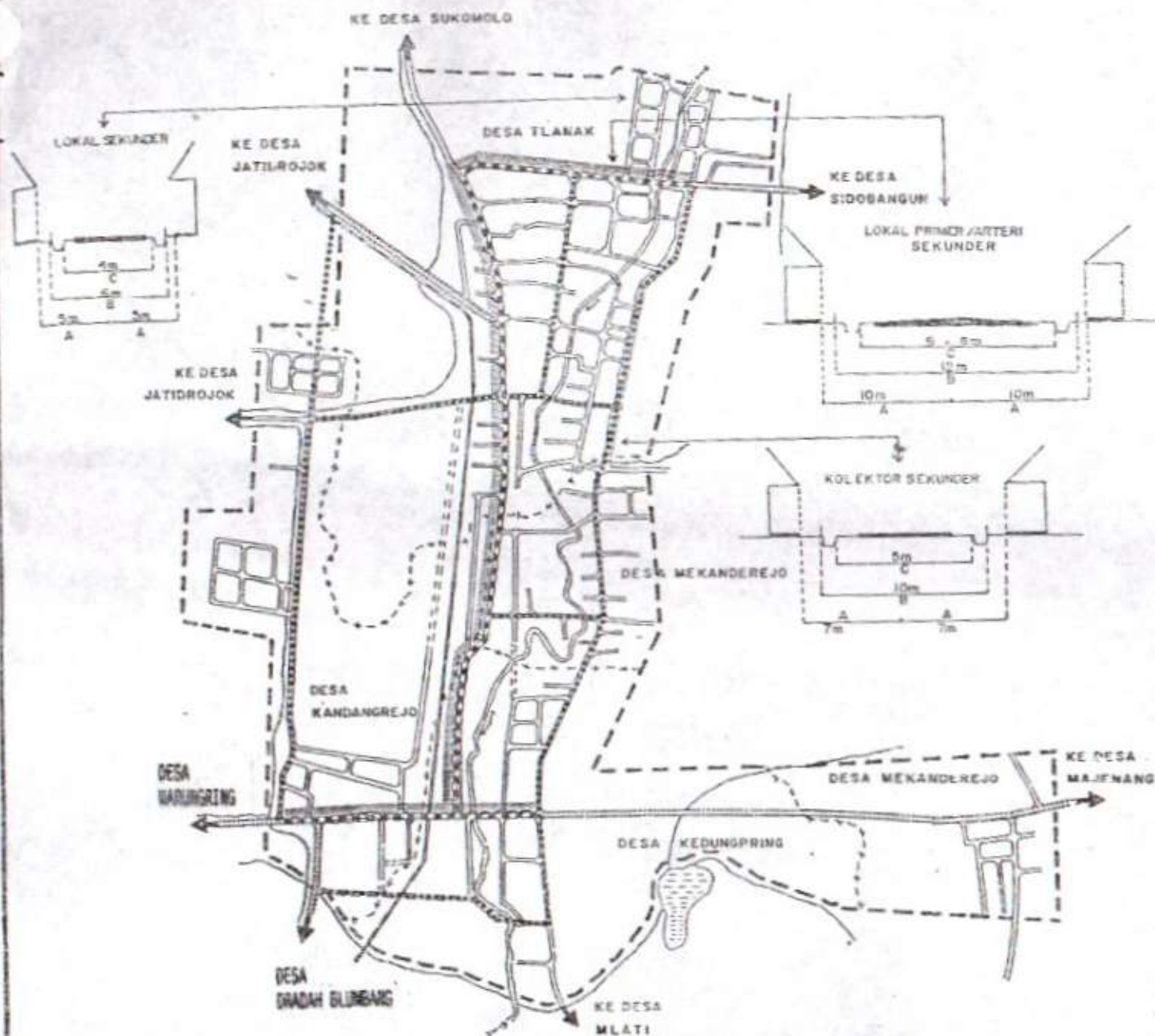
DIGAMBAR :

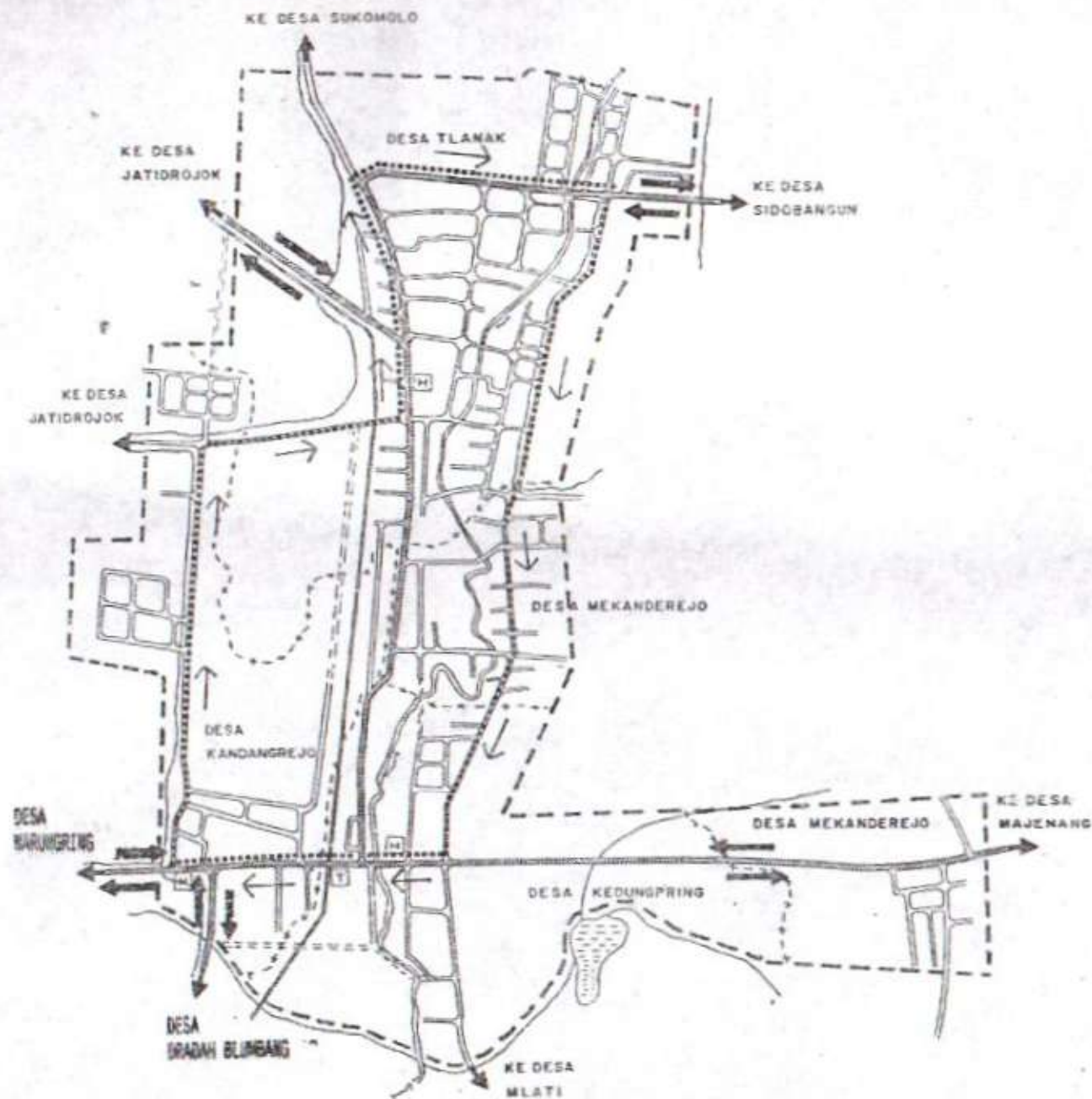
DIPERIKSA :



UTARA

SKALA
1 : 15000





PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN 1995/1996 - 2005/2006

PETA RENCANA
POLA PERANGKUTAN
DAN FASILITAS TRANSPORT

KETERANGAN :

- BATAS KOTA
- - - - - BATAS DESA
- ===== JALAN
- REL KERETA API
- ~~~~~ SUNGAI
- ▲ WADUK
- ANGKUTAN DALAM KOTA
- ===== ANGKUTAN LUAR KOTA
- T SUB TERMINAL
- H HALTE

SUMBER : HASIL RENCANA



GAMBAR : 111 - 9

DIGAMBAR : [Signature]

DIPERIKSA :



SKALA
1:15000

kebutuhan air bersih untuk berbagai keperluan sampai dengan tahun 2005/2006 adalah :

- Tahun 1995/1996 = 12.609 liter/detik
- Tahun 1998/1999 = 13.172 liter/detik
- Tahun 2003/2004 = 13.535 liter/detik
- Tahun 2005/2006 = 13.993 liter/detik

Salah tujuan pengembangan pelayanan air bersih pada tahun 2005/2006, serta penyediaan air bersih bagi seluruh penduduk yang mendapat pelayanan kesehatan, maka diperlukan pengembangan air saluran distribusi air bersih di kota IKK Kedungpring.

Berdasarkan hal tersebut di atas rencana pengadaan pelayanan air bersih di wilayah Kota IKK Kedungpring tergantung kepada :

1. Tingkat ekonomi daerah.
2. Pertimbangan ekonomi dalam hal pengadaan jaringan distribusi (pengalihan investasi dan nilai tambah yang didapat).
3. Tingkat kebutuhan air minum penduduk.
4. Pertimbangan aspek teknis perencanaan.
5. Koordinasi antar instansi terkait.

Dengan pertimbangan di atas, maka kebijaksanaan rencana pengadaan pelayanan air bersih di wilayah Kota IKK Kedungpring adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan jaringan distribusi air minum/jaringan perpipaan.
2. Pengembangan sistem pelayanan dengan kran umum disamping pelayanan dengan sambungan langsung. Hal ini akan memberi keuntungan, karena penduduk yang akan dilayani oleh jaringan

air minum akan lebih banyak jika dilayani hanya dengan cara sambungan langsung.

3. Kualitas air yang akan di distribusikan kepada konsumen harus berkualitas sesuai dengan persyaratan air minum yang berlaku.

Di dalam pengembangan dan pembangunan utilitas air bersih di Kota IKK Kedungpring terutama ditujukan untuk keperluan Rumah Tangga (sifat umum) diluar kebutuhan rumah tangga, dan pemadam kebakaran.

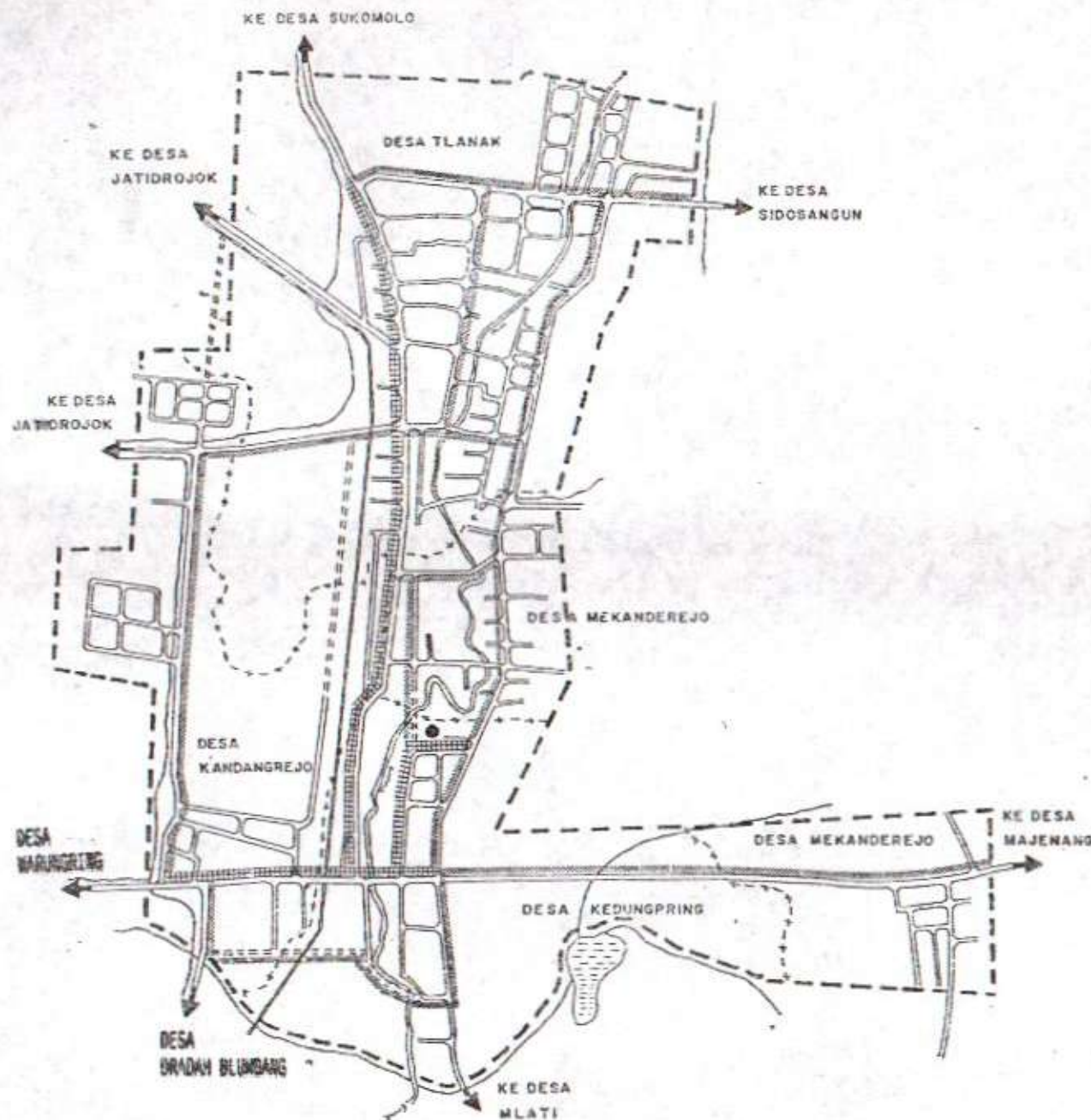
Berdasarkan tujuan di atas serta hasil analisis kebutuhan air bersih di kota IKK Kedungpring sampai dengan tahun 2005/2006, maka arahan pengembangan sistem jaringan air bersih di Kota IKK Kedungpring dapat dilihat pada Gambar III-10 (*Rencana Pengembangan Jaringan Air Bersih*).

3.11.2 Penyaluran air buangan

Perencanaan penyaluran air buangan yang akan dibahas dalam bagian ini adalah meliputi :

1. Penyaluran limbah air bekas (air kotor), yaitu penyaluran limbah yang berasal dari rumah tangga maupun fasilitas lainnya seperti industri, perkantoran dan lain-lain.
2. Penyaluran limbah air hujan, yaitu penyaluran limpasan air hujan yang jatuh ketanah dan tidak dimanfaatkan lagi.

Dalam pengembangan rencana ini adalah untuk mendukung debit air buangan yang terjadi sampai tahun 2005/2006, dimana diperkirakan debit air buangan di Kota IKK Kedungpring adalah :



**PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN 1995/1996 - 2005/2006**

**PETA RENCANA
PENGEMBANGAN
JARINGAN AIR BERSIH**

KETERANGAN :

- BATAS KOTA
- - - - - BATAS DESA
- ===== JARINGAN JALAN
- +—+—+— REL KERETA API
- ~~~~~ SUNGAI
- ▲ MADUK
- ===== JARINGAN TRANSMISI
- ===== JARINGAN DISTRIBUSI

SUMBER : HASIL RENCANA



GAMBAR : III - 10

DIGAMBAR :

DIPERIKSA :



SKALA

1:15000

- Tahun 1995/1996 = 10,247 liter/detik
- Tahun 1998/1999 = 10,538 liter/detik
- Tahun 2003/2004 = 10,828 liter/detik
- Tahun 2004/2006 = 11,119 liter/detik
- *Penyaluran air bekas*

Mengingat kondisi air tanah di Kota IKK Kedungpring relatif dangkal, maka perencanaan untuk menerapkan sistem substitusi untuk penyaluran atau pembuangan air bekas cukup efektif.

Penerapan sistem lain yang juga cukup menguntungkan adalah pengadaan saluran air buangan yang diusahakan oleh penduduk kota secara berkelompok dan pembangunan saluran induk yang disediakan oleh pemerintah. Saluran ini harus terkoneksi dengan sungai yang mengalir di Bagian Wilayah Kota karena tidak memberikan dampak negatif terhadap ekosistem sungai dan sekitarnya.

Air Buangan rumah tangga di Kota IKK Kedungpring, perencanaan saluran air buangan dapat disatukan dengan saluran air hujan/drainase yang akan direncanakan (setelah dipilah terlebih dahulu/dibuatkan resapan).

- *Penyaluran air hujan (drainase).*

Limpasan air hujan yang ada di Kota IKK Kedungpring perlu penanganan khusus yaitu dengan penyediaan saluran-saluran pembuangan. Hal ini disebabkan kondisi topografi kota yang relatif datar, sehingga limpasan air hujan dapat tergenang di lokasi-lokasi tertentu. Selain itu pematuan air hujan yang terencana dengan sistem drainase yang baik dapat mencegah

erosi akibat aliran air, mencegah kerusakan bangunan lainnya seperti jalan, perumahan, bangunan-bangunan penting lainnya. Dengan demikian pengadaan saluran drainase didasarkan atas pertimbangan :

1. Besarnya kerugian yang mungkin terjadi akibat genangan air hujan.
2. Derajat nilai bangunan.
3. Biaya pembangunan sistem drainase.

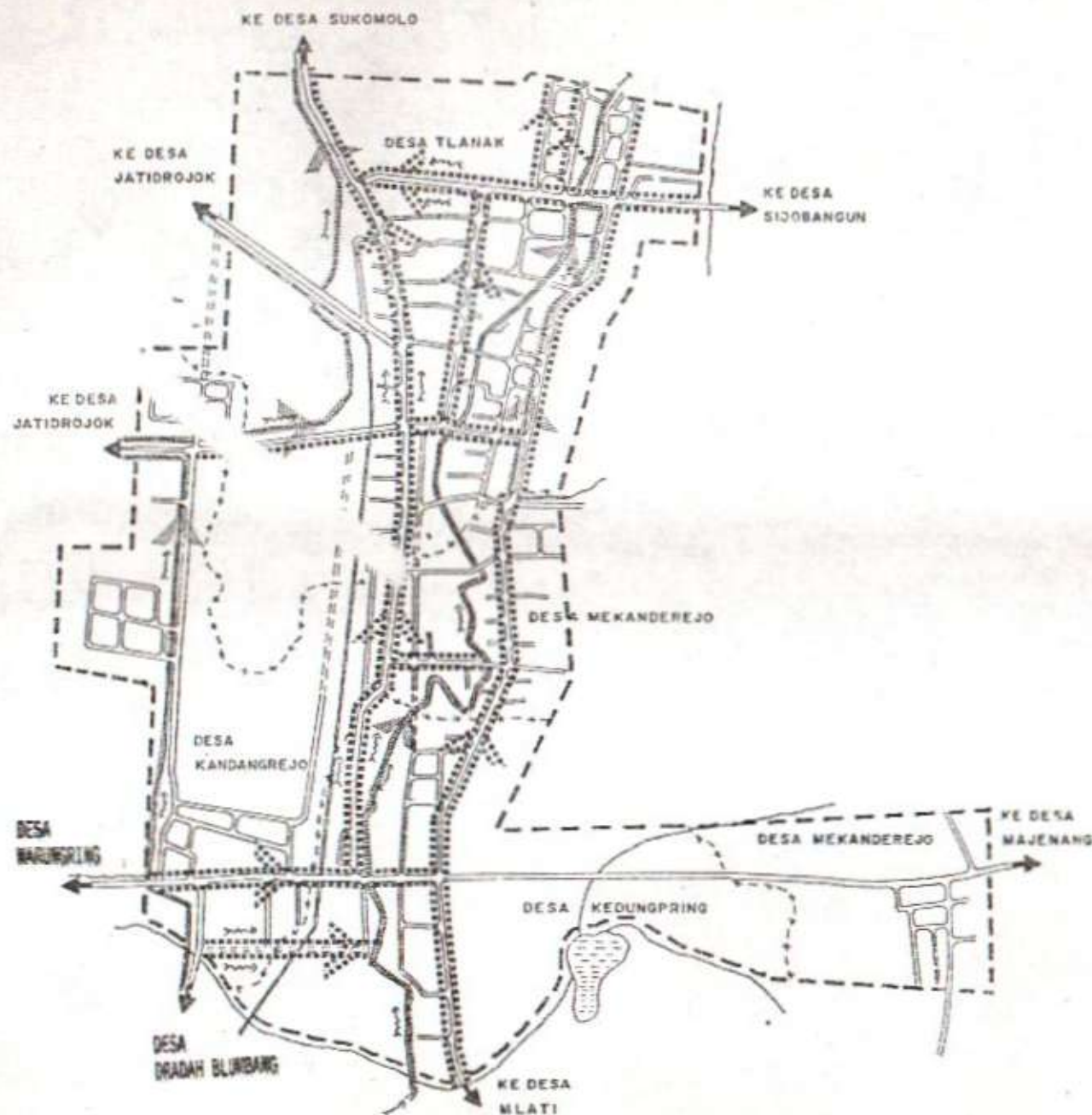
Dari berbagai pertimbangan tersebut, kawasan-kawasan yang perlu mendapat prioritas dalam perencanaan sistem drainase adalah seperti terlihat pada Gambar III - 11 (*Rencana Saluran Drainase*).

3.11.3 Pengelolaan sampah

a. *Sistem pengelolaan sampah.*

Pengelolaan sampah di Kota IKK Kedungpring mulai dari pengumpulan hingga pembuangan, dilakukan oleh perorangan. Hal ini akan menimbulkan masalah terutama jika lahan pembuangan yang diusahakan secara individu itu mulai terbatas, sehingga kecenderungan untuk membuang sampah di sembarang tempat menjadi lebih besar.

Untuk mengatasi hal di atas, pengelolaan sampah di Kota IKK Kedungpring sudah harus ditangani oleh dinas/lembaga kebersihan kota bersama-sama organisasi masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN KEDUNGPRING
TAUN 1995/1996 - 2005/2006

PETA RENCANA SALURAN DRAINASE

KETERANGAN :

- BATAS KOTA
- - - - - BATAS DESA
- ===== JALURAN JALAN
- +—+—+— REL KERETA API
- ~~~~~ SUNGAI
- WADUK
- ===== SALURAN PRIMER (UTAMA)
- SALURAN SEKUNDER
- ===== SALURAN TERSIER

SUNGER : HASIL RENCANA



GAMBAR : III - 11

DIGAMBAR : *[Signature]*

DIPERMSA :



SKALA
1:15000

Pengelolaan sampah mulai dari pengumpulan sampah, pengangkutan hingga pembuangannya harus ditangani secara terpadu dan terencana.

Tempat pembuangan sementara dan akhir yang ada sekarang diusahakan secara individu harus sudah diarahkan kepada pembuangan akhir yang terpusat di satu lokasi. Hal ini akan sangat erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat dan estetika kota.

b. *Timbulan sampah.*

Sampah yang dihasilkan di Kota IKK Kedungpring adalah spesifik sesuai dengan keadaan kota IKK Kedungpring sendiri, tetapi dalam penentuan proyeksi jumlah sampah digunakan acuan hasil studi di beberapa kota di Indonesia yang disesuaikan dengan keadaan Kota Kedungpring saat ini maupun masa datang. Sampah yang dihasilkan di Kota IKK Kedungpring berasal dari berbagai sumber timbulan sampah, antara lain :

1. Rumah tangga yaitu sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga sehari-hari.
2. Fasilitas perdagangan : toko, pasar.
3. Sumber timbulan sampah lainnya seperti : fasilitas hiburan, perkantoran dan jalan.

Perkiraan produksi sampah untuk seluruh sumber timbulan dalam perkembangannya diperkirakan tidak mengalami perubahan, maka perkiraan kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dapat dilihat pada Tabel 3.11 - 1.

TABEL : 3.11-1

KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA KEDUNGPRING TAHUN 1995/1996 - 2005/2006

No	T a h u n	Penduduk	M3/Hari	TPS	Gerobak	Truk
1	1995/1996	11.841	23,68	6	2	1
1	1998/1999	12.177	24,35	6	2	1
2	2003/2004	12.512	25,62	6	2	1
2	2003/2004	12.645	25,79	6	2	1

Sumber : Buku Analisis

c. *Distribusi aliran sampah.*

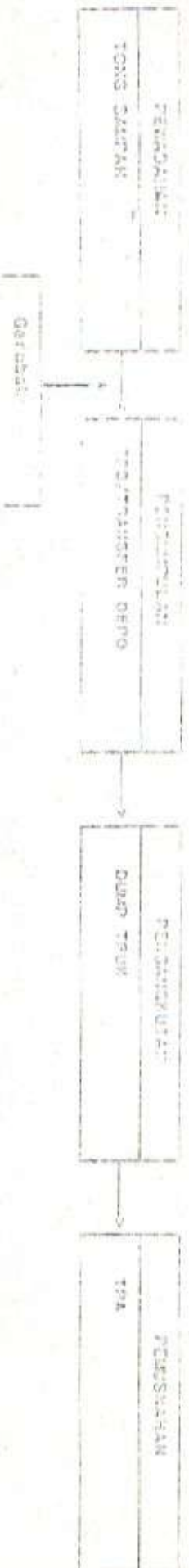
Sesuai dengan rencana pengelolaan sampah oleh dinas kebersihan yang dilakukan secara terpadu bersama organisasi masyarakat, maka distribusi aliran sampah yang ada sekarang mengalami perubahan dikarenakan adanya tahap pengumpulan dan pengangkutan sampah ke tempat pembuangan.

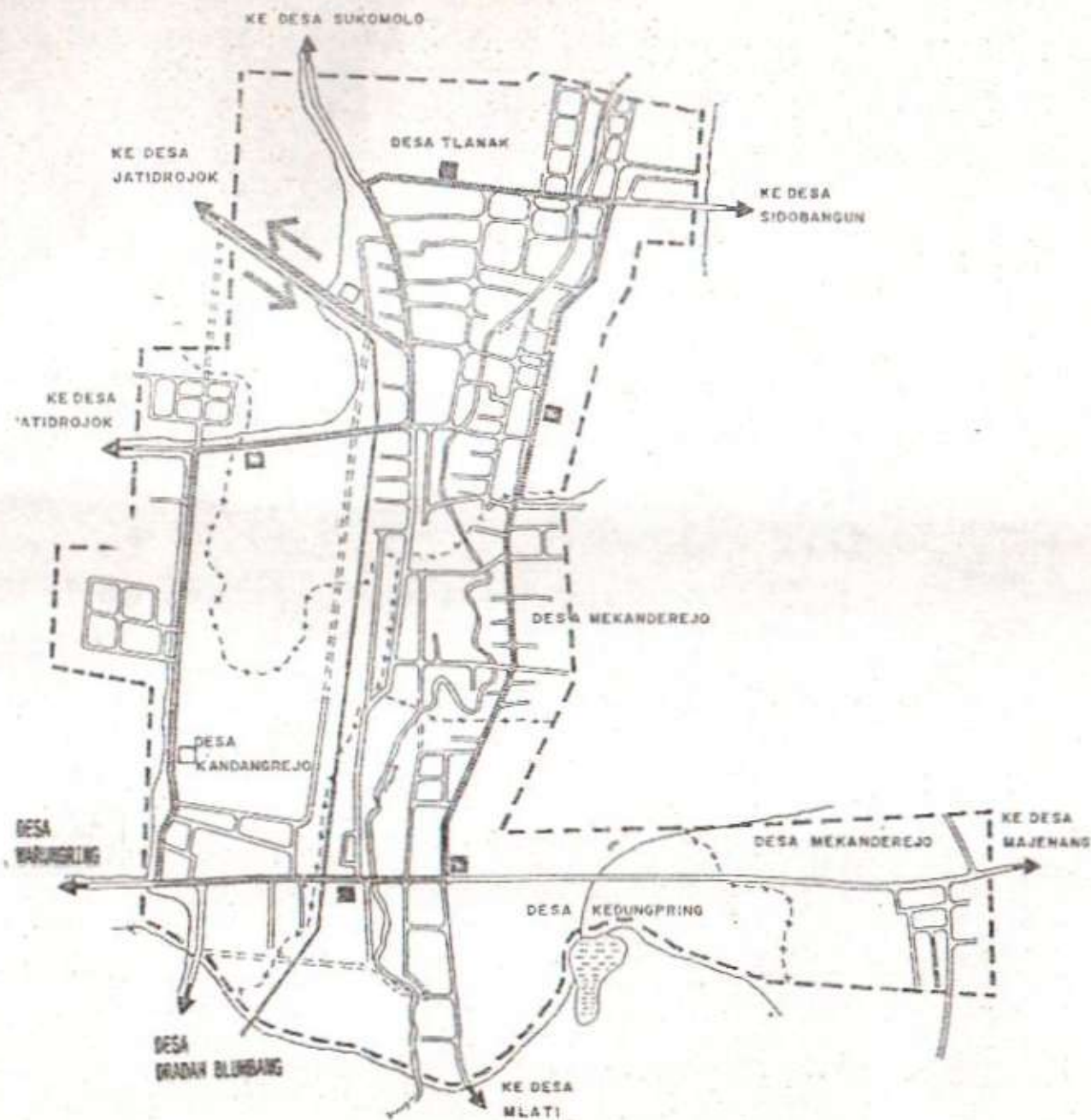
Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dijadikan satu dengan TPA Babat, sedangkan pengangkutan dari TPS (Tempat Pembuangan Sementara) ke TPA dilakukan oleh suatu lembaga/dinas yang akan dibentuk dalam pengelolaan sampah di kota IKK Kedungpring (SWP II).

Diagram distribusi aliran sampah yang direncanakan dapat dilihat pada Gambar III-12 (*Diagram Pengelolaan Sampah*).

Sedangkan rencana route angkutan persampahan dapat dilihat pada Gambar III-13 (*Rencana Sistem Pembuangan Sampah*).

GAMBAR : III - 12.
DIAGRAM PENGELOLAAN SAMPAH





RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN 1995/1996 - 2005/2006

PETA RENCANA SISTEM PEMBUANGAN SAMPAH

PETER SANDAN :

-  BATAS KOTA
 BATAS DESA
 JERONGKAP JALAN
 REL KERATA API
 SUNGAI
 MASUK
 ROUTE PEMBUANGSAMPAH
 TEMPAT PEMBUANGSAMPAH SEMENTARA (TPS)
 TPA JADI SATU DENGAN TPA BABAT

SUMBER : HASIL RENCANA



GAMBAR : III - 13

DIGAMBAR : *Yakut*

ESPERIENZA : 2



SPALA

1:15000

3.11.4 Rencana pengembangan jaringan listrik

Sumber tenaga listrik untuk wilayah Kota IKK Kedungpring diperoleh dari sumber daya PLN dan untuk saluran ke rumah-rumah di distribusikan dengan menggunakan trafo distribusi. Jumlah kebutuhan tenaga listrik sampai tahun 2005/2006 di Kota IKK Kedungpring diperkirakan adalah sebagai berikut :

- Tahun 1995/1996 = 0,40 MVA
- Tahun 1998/1999 = 0,55 MVA
- Tahun 2000/2001 = 0,62 MVA
- Tahun 2005/2006 = 0,69 MVA

Usaha-usaha pengembangan listrik di kota IKK Kedungpring adalah sebagai berikut :

- Menselaraskan usaha - usaha pelayanan listrik dengan pengembangan perumahan.
- Pengaturan sistem distribusi.
- Meningkatkan daya dengan menambah trafo-trafo distribusi.
- Memberikan pelayanan secara merata pada warga yang belum terlayani.

Arahan pengembangan jaringan listrik di Kota IKK Kedungpring berdasarkan kebutuhan tenaga listrik yang disesuaikan dengan pola pengembangan perumahan dapat dilihat pada Gambar III-14 (*Rencana Pengembangan Jaringan Listrik*).

3.11.5 Rencana Pengembangan Jaringan Telepon

Pengembangan pelayanan telekomunikasi telepon diutamakan terutama untuk kegiatan pemerintahan, industri, perdagangan,

jasa dan kegiatan lain dengan intensitas tinggi, karena intensitas komunikasinya dengan kegiatan lain relatif tinggi.

Rencana pola pelayanan jaringan telepon pada dasarnya tergantung pada peningkatan permintaan sambungan dan kemampuan Satuan Sambungan (SS) Sentral Telepon. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan jaringan telepon perlu adanya koordinasi dengan pihak Perumtel. Dengan adanya perkembangan penduduk, maka kebutuhan akan adanya utilitas telekomunikasi tentunya sangat dibutuhkan. Apabila Satuan Sambungan (SS) terbatas, tentunya pengadaan telepon umum (Wartel/Box Telepon) sangatlah membantu kebutuhan masyarakat untuk hubungan telekomunikasi lokal maupun interlokal.

Arahan lokasi-lokasi yang diperlukan bagi pengadaan Wartel adalah kota IKK Kedungpring minimal diperlukan sebuah Wartel, sedangkan setiap satu unit SWK membutuhkan sebuah Box Telepon umum. Jelasnya, lihat Gambar III-15 (*Rencana Jaringan Telepon*).

3.12 Rencana Pemanfaatan Air Baku

Rencana pemanfaatan air baku meliputi rencana pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk melayani kebutuhan akan air bersih penduduk Kota IKK Kedungpring.

3.12.1 Rencana Pemanfaatan Air Permukaan

Air permukaan yang ada di Kota IKK Kedungpring dan sekitarnya berupa air sungai dan rawa, serta air dari saluran irigasi. Ditinjau dari kualitas air permukaan tersebut, hanya

dapat digunakan untuk mengairi tanaman, baik tanaman produktif maupun tanaman tidak produktif, karena kualitas air sungai yang ada cukup rendah atau tidak memenuhi syarat sebagai air minum. Jika akan digunakan sebagai penyediaan air bersih/minum, maka perlu adanya pengolahan air (water treatment), baik secara fisik, kimia maupun biologi agar memenuhi syarat sebagai air bersih/minum, dengan biaya yang cukup besar. Ditinjau dari debitnya, air sungai yang ada relatif kecil dan tergantung musim, sehingga dapat dikatakan kurang jika dimanfaatkan untuk mengairi sawah dan tanaman yang ada di Kota IKK Kedungpring dan Sekitarnya.

3.12.2 Air Tanah

Air tanah yang ada Kota IKK Kedungpring mempunyai kedalaman rata-rata sekitar 6 - 8 m di bawah permukaan tanah. Kualitas air tanah di Kota IKK Kedungpring dapat dikatakan cukup memenuhi persyaratan sebagai air bersih/minum, namun selayaknya perlu dilakukan uji laboratorium terlebih dahulu.

3.13 Rencana Sistem Fasilitas Kota

Pengembangan Kota IKK Kedungpring sampai akhir tahun perencanaan (2005/2006) tentunya membutuhkan fasilitas dan utilitas yang menunjang tumbuh dan berkembangnya kota. Kebutuhan fasilitas dan utilitas tersebut diperkirakan berdasarkan standar kebutuhan fasilitas yang bersumber dari buku Petunjuk Perencanaan Kawasan Perumahan Kota dari Departemen Pekerjaan Umum.

Kebutuhan utilitas di pihak lain diperkirakan berdasarkan standar yang umum dipergunakan oleh PSKT/IUIDP. Standar kebutuhan tersebut membutuhkan masukan jumlah penduduk sebagai komponen utama untuk mengkalikulasi kebutuhan fasilitas dan utilitas.

Fasilitas-fasilitas umum yang akan dihitung kebutuhan jumlah dan ruangnya adalah :

- fasilitas perumahan
- fasilitas pendidikan
- fasilitas perdagangan
- fasilitas kesehatan
- fasilitas peribadatan
- fasilitas rekreasi & olah raga dan kebudayaan
- fasilitas ruang terbuka hijau
- fasilitas pelayanan umum

Kebutuhan jumlah dan luasan masing-masing fasilitas umum dihitung berdasarkan standar penyediaan fasilitas umum dari Departemen Pekerjaan Umum yang dituangkan dalam buku Petunjuk Perencanaan Kawasan Perumahan Kota. Standar tersebut bersifat umum, dalam arti hanya menyangkut komponen jenis, jumlah, dan luasan ruang yang dibutuhkan sementara komponen hirarki belum dibicarakan. Untuk lebih aplikatifnya, maka pada standar penyediaan fasilitas umum perkotaan tersebut ditambahkan informasi mengenai hirarki fasilitas umum yang dibagi dalam tiga kategori sebagai berikut :

- Fasilitas umum yang memiliki jangkauan pelayanan skala kota dan Regional (Kecamatan),

- Fasilitas umum yang memiliki jangkauan pelayanan skala bagian wilayah kota.
- Fasilitas umum yang memiliki jangkauan pelayanan skala lingkungan/lokal.

Untuk lebih jelasnya, penyediaan fasilitas dan ruang di kota Ikk kedungpring dapat dilihat kembali pada Tabel 3.7-1 dan 3.7-2. Rencana sebaran fasilitas umum di kota kedungpring dapat dilihat pada Gambar III - 16 (Rencana Sebaran Fasilitas Umum).

BAB IV
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IKK KEDUNGPRING

4.1 Wilayah Perencanaan

Wilayah perencanaan Kota IKK Kedungpring yang telah dijabarkan dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota adalah seluruh wilayah kota dengan luas 414,86 Ha yang terbagi menjadi 2 BWK, 1 BWK pusat kota dan 1 BWK sub pusat kota dengan luas masing-masing bagian wilayah kota adalah sebagai berikut:

- BWK A (Pusat Kota) dengan luas 219,43 Ha.
- BWK B (Sub Pusat Kota) dengan luas 195,43 Ha.

4.2 Rumusan Kebijakan Dasar BWK

Berdasarkan pengertian Rencana Detail Tata Ruang Kota menurut Petunjuk Penyusunan Rencana Kota Permendagri No 2 tahun 1987, Kepmendagri No 59 tahun 1988 dan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No 650/607/201.3/89 menjelaskan bahwa Rencana Detail Tata Ruang Kota merupakan *tindakan lanjut dan pendalaman materi* dari Rencana Umum Tata Ruang Kota, untuk itu materi Rencana Detail Tata Ruang kota yang akan disusun rumusan kebijaksananya merupakan pendalaman dari rumusan kebijaksanaan

di dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota IKK Kedungpring sampai dengan tahun 2005/2006.

4.2.1 Penentuan Fungsi Bagian Wilayah Kota.

Seperti telah dijelaskan dalam buku analisis, bahwa Kota IKK Kedungpring direncanakan akan dibagi ke dalam 2 (dua) Bagian Wilayah Kota (BWK) dengan pusatnya masing-masing.

Berdasarkan arahan rencana struktur tata ruang dan penggunaan lahan yang direncanakan pada tahun 2005/2006, fungsi masing-masing bagian wilayah kota di Kota IKK Kedungpring adalah:

A. BWK-A (Pusat Kota).

Fungsi BWK ini adalah sebagai pusat pengembangan perdagangan, jasa, pemerintahan regional dan sub terminal. Sesuai dengan fungsi-fungsi tersebut, maka komponen-komponen ruang BWK A ini, meliputi:

- Komponen-komponen Ruang Utama:

- a. Kawasan pertokoan/jasa/pasar.
 - b. Kawasan perkantoran.
 - c. Kawasan sub terminal.
 - d. Lingkungan industri dan pergudangan.
- Komponen ruang penunjang:

- a. Kawasan perumahan.
- b. Kawasan pendidikan.
- c. Ruang terbuka hijau/taman/rekreasi.
- d. Jaringan transportasi.

B. BWK B.

Fungsi BWK B adalah sebagai kawasan perumahan dan pelayanan umum.

Komponen-komponen BWK ini meliputi:

- Komponen Ruang Utama adalah Kawasan Perumahan.
- Komponen Ruang Penunjang:
 - a. Fasilitas pelayanan umum.
 - b. Ruang terbuka/taman dan olah raga.
 - c. Jaringan transportasi.

4.2.2. Penentuan Struktur Bagian Wilayah Kota.

Seperti telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya, bahwa fungsi-fungsi Bagian Wilayah Kota yang telah direncanakan untuk Wilayah Kota IKK Kedungpring dalam aplikasinya terdapat struktur ruang kota tercermin dalam rencana penggunaan lahannya.

Struktur Bagian Wilayah Kota dilakukan dengan jalan melihat BWK sebagai suatu susunan dari lokasi-lokasi kegiatan penduduknya.

Berdasarkan pendekatan di atas, maka struktur ruang Bagian Kota yang direncanakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Bagian Wilayah Kota merupakan satu bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

- Pengelompokan kegiatan yang paling beragam dan paling padat saat ini terdapat kawasan pusat kegiatan kota.

Untuk mengurangi mengelompokkan kegiatan tersebut maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan di wilayah perencanaan di

lokasikan menyebar secara merata di seluruh bagian wilayah perencanaan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

Adapun kriteria yang dipergunakan sebagai landasan dalam pengarahannya lokasi komponen-komponen BWK ini adalah :

- Hubungan fungsional antar BWK dan antar komponen-komponen ruang yang direncanakan
- Orientasi lokasi komponen-komponen utama dan penunjang setiap BWK.
- Memperkirakan dampak pengalokasian komponen ruang terhadap keterpaduan struktur ruang kota pada umumnya dan struktur ruang BWK khususnya.
- Mempertimbangkan pada struktur jaringan jalan menurut fungsinya untuk melayani komponen-komponen ruang tersebut.

Dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pengarahannya alokasi komponen-komponen ruang BWK di Kota IKK Kedungpring dapat mencerminkan keterpaduan ruang yang serasi.

Adapun optimasi struktur ruang bagian wilayah Kota yang dituju meliputi :

- Mendistribusikan fasilitas pelayanan ke seluruh bagian wilayah Kota sehingga beban pelayanan pusat kota yang semakin sarat akan kegiatan dapat dikurangi.
- Peningkatan prasarana dan sarana transportasi antar BWK dan sehingga dapat terjalin hubungan fungsional yang kompak antar BWK dan Kota IKK Kedungpring secara keseluruhan.

- Peningkatan dan pengembangan fasilitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan skala pelayanannya
- Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang ada pada kawasan-kawasan yang sesuai dengan fungsi kegiatan yang diarahkan.
- Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan utilitas kota yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan kota Kedungpring dan kegiatan lainnya di Setiap BWK.
- Mengatur perkembangan kegiatan yang terjadi agar tidak menyimpang dari arahan struktur yang telah ditetapkan.

4.2.3 Penentuan Jenis dan Intensitas Prasarana dan Sarana Utama

Yang dimaksud sarana dan prasarana utama disini adalah sarana dan prasarana yang berfungsi untuk melayani seluruh penduduk wilayah perencanaan dan penduduk yang ada di luar wilayah perencanaan atau fasilitas dengan skala pelayanan kota atau bagian wilayah yang lebih luas. Pengembangan sarana dan prasarana utama ini meliputi pengembangan jenis pelayanan dari sarana dan prasarana kota yang sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan penduduk yang mendukungnya.

Tujuan dari pengembangan jenis sarana dan prasarana pelayanan adalah untuk mencapai optimasi pelayanan antara masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan penyediaan fasilitas pelayanan tersebut.

Fasilitas pelayanan yang dimaksud meliputi fasilitas sosial ekonomi yang terdiri dari:

- Fasilitas Sosial, yaitu fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olahraga, serta perumahan.
- Fasilitas ekonomi yang meliputi fasilitas perdagangan dan fasilitas keuangan.

Selain fasilitas-fasilitas tersebut, juga diperlukan pengembangan prasarana kota, yang meliputi fasilitas transportasi, jaringan listrik, jaringan air bersih, saluran pembuangan air limbah dan saluran pembuangan air hujan (drainase) dan sampah.

4.2.4 Kepadatan Penduduk.

Kebijakan pengembangan penduduk masing-masing BKK perlu diperhatikan mengingat penduduk merupakan subyek dan obyek pembangunan.

Berdasarkan kebijaksanaan kepadatan penduduk RUTK Kota IKK Kedungpring diatur berdasarkan kebijaksanaan persebaran penduduk masing-masing BKK adalah:

- Tingkat kepadatan 28 jiwa/ha untuk BKK A.
- Tingkat kepadatan 35 jiwa/ha untuk BKK B.

Dari usulan tingkat kepadatan tersebut, maka untuk daya tampung penduduk di setiap BKK ditentukan pada Tabel 4.2-1.

TABEL: 4.2-1 DAYA TAMPUNG SETIAP BKK TAHUN 2005/2006

BKK	LUAS BKK (Ha)	DAYA TAMPUNG PENDUDUK (jiwa)
A	219,43	6.046
B	195,43	6.800
Total	414,86	12.848

Sumber : Buku Analisis

4.2.5 Pengembangan Fasilitas dan Utilitas

Pengembangan fasilitas dan utilitas tergantung dari kebutuhan penduduk wilayah perencanaan akan fasilitas dan utilitas tersebut. Pengembangan jenis fasilitas dan utilitas kota secara lebih terinci adalah sebagai berikut:

a. Fasilitas Perdagangan

Pengembangan fasilitas perdagangan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan orang memenuhi kebutuhannya. Untuk itu perlu dikembangkan sub-sub pusat baru yang nantinya diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat-pusat lingkungan. Pusat-pusat lingkungan ini selain terdiri dari fasilitas perdagangan juga dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas lain, sehingga nantinya dapat menjadi orientasi suatu kawasan.

b. Industri dan Perdagangan

Pengembangan kegiatan industri dan perdagangan untuk menarik investor yang akan mengembangkan kegiatan industri dan perdagangan pada masa yang akan datang sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan, dengan memperhatikan jenis dan lokasi yang ada.

c. Fasilitas Perumahan

Pengembangan fasilitas perumahan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan perumahan dan perbaikan kondisi perumahan itu sendiri. Pengembangan perumahan dengan menambah jumlah rumah dilakukan sekaligus dengan mengatur penyebarannya di wilayah perencanaan, sedangkan perbaikan kondisi

- Fasilitas Sosial, yaitu fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olahraga, serta perumahan.
- Fasilitas ekonomi yang meliputi fasilitas perdagangan dan fasilitas keuangan.

Selain fasilitas-fasilitas tersebut, juga diperlukan pengembangan prasarana kota, yang meliputi fasilitas transportasi, jaringan listrik, jaringan air bersih, saluran pembuangan air limbah dan saluran pembuangan air hujan (drainase) dan sampah.

4.2.4 Kepadatan Penduduk.

Kebijakan pengembangan penduduk masing-masing BKK perlu diperhatikan mengingat penduduk merupakan subyek dan obyek pembangunan.

Berdasarkan kebijaksanaan kepadatan penduduk RUTRA Kota IKK Kedungpring diatur berdasarkan kebijaksanaan persebaran penduduk masing-masing BKK adalah:

- Tingkat kepadatan 28 jiwa/ha untuk BKK A.
- Tingkat kepadatan 35 jiwa/ha untuk BKK B.

Dari usulan tingkat kepadatan tersebut, maka untuk daya tampung penduduk di setiap BKK ditentukan pada Tabel 4.2-1.

TABEL: 4.2-1 DAYA TAMPUNG SETIAP BKK TAHUN 2005/2006

BKK	LUAS BKK (Ha)	DAYA TAMPUNG PENDUDUK (jiwa)
A	219.43	6.046
B	195.43	6.800
Total	414.86	12.846

Sumber : Buku Analisis

4.2.5 Pengembangan Fasilitas dan Utilitas

Pengembangan fasilitas dan utilitas tergantung dari kebutuhan penduduk wilayah perencanaan akan fasilitas dan utilitas tersebut. Pengembangan jenis fasilitas dan utilitas kota secara lebih terinci adalah sebagai berikut:

a. Fasilitas Perdagangan

Pengembangan fasilitas perdagangan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk akan pemenuhan kebutuhannya. Untuk itu perlu dikembangkan sub-sub pusat baru yang nantinya diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat-pusat lingkungan. Pusat-pusat lingkungan ini selain terdiri dari fasilitas perdagangan juga dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas lain, sehingga nantinya dapat menjadi orientasi suatu kawasan.

b. Industri dan Perdagangan

Pengembangan kegiatan industri dan perdagangan untuk menarik investor yang akan mengembangkan kegiatan industri dan perdagangan pada masa yang akan datang sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan, dengan memperhatikan jenis dan lokasi yang ada.

c. Fasilitas Perumahan

Pengembangan fasilitas perumahan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan perumahan dan perbaikan kondisi perumahan itu sendiri. Pengembangan perumahan dengan menambah jumlah rumah dilakukan sekaligus dengan mengatur penyebarannya di wilayah perencanaan, sedangkan perbaikan kondisi

perumahan selain memperbaiki kondisi rumah juga memperbaiki kondisi lingkungan.

d. Fasilitas Pendidikan

Pengembangan fasilitas pendidikan ditujukan untuk mendukung kebijaksanaan pendidikan. Selain fasilitas pendidikan formal juga fasilitas pendidikan keterampilan dan keanggotaan.

e. Fasilitas Kesehatan

Pengembangan fasilitas kesehatan ditujukan untuk melayani seluruh penduduk wilayah perencanaan maupun penduduk di sekitar wilayah perencanaan. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan pelayanan kesehatan yang ada dengan meningkatkan jumlah kualitas petugas kesehatan dan meningkatkan mobilitasnya. Peningkatan jumlah petugas kesehatan dilakukan dengan menambah tenaga medis, seperti dokter umum, dokter spesialis, bidan, ahli gizi, perawat, paramedis, dan tenaga lainnya.

f. Fasilitas Peribadatan

Pengembangan fasilitas peribadatan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan fasilitas peribadatan sesuai dengan skala pelayanannya dan meningkatkan kondisi fasilitas yang sekarang.

g. Fasilitas Transportasi

Pengembangan fasilitas transportasi meliputi pengembangan jaringan jalan, dan prasarana penunjang lainnya. Pengembangan jaringan jalan mencakup perluasan jaringan jalan, pengembangan jalan baru, peningkatan kondisi jaringan jalan dan sub terminal.

h. Jaringan Listrik

Pengembangan jaringan listrik ditujukan selain untuk meningkatkan kapasitas/daya pasang, juga mengembangkan jaringan distribusinya mengikuti arah perkembangan yang diusulkan.

i. Jaringan Air Bersih

Pengembangan jaringan air bersih ditujukan untuk pengadaan air bersih dan pembangunan jaringan distribusinya. Pengadaan air bersih dilakukan oleh suatu badan sehingga kualitas air dapat dikendalikan, sedangkan pembangunan jaringan distribusinya dilakukan secara bertahap sejalan dengan pengembangan kawasan terbangun dan disesuaikan dengan kemampuan membangun.

j. Saluran pembuangan air limbah/kotor

Pembuangan air limbah/kotor dilakukan sesuai dengan kemampuan membangun.

k. Saluran Pembuangan Air Hujan (Drainase)

Pengembangan saluran pembuangan air hujan dilakukan dengan mengikuti perkembangan jaringan jalan. Selain itu, mengingat intensitas penggunaan ruang sebagian kawasan masih akan sangat rendah, saluran pembuangan air hujan pada kawasan-kawasan ini masih dapat mengandalkan saluran alam.

4.3 Rencana Detail Tata Ruang Kota IKK Kedungpring

Sebagai upaya untuk mencapai hasilguna yang lebih nyata dalam pelaksanaan pembangunan kota, maka suatu Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) yang masih bersifat pedoman umum, perlu dilanjutkan oleh Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK). Dengan

demikian RDIRK merupakan pendalaman materi dari RUTRK, sehingga sifatnya lebih operasional dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kota.

Rencana Detail Tata Ruang Kota akan memuat ketentuan-ketentuan mengenai penetapan fungsi bagian-bagian wilayah kota yang pada hakikatnya merupakan pengarahannya lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi ataupun lingkungan permukaan dengan karakteristik tertentu. Adapun sasaran utama RDIRK Kota IKK Kedungpring adalah:

1. Mengarahkan pembangunan Kota IKK Kedungpring dengan lebih tegas dalam upaya pengendalian, pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik untuk masing-masing bagian wilayah kota secara terukur, baik kuantitas maupun kualitas.
2. Memberikan kemudahan bagi aparat pengelola pembangunan kota dalam mengendalikan pelaksanaan pembangunan kota melalui pemberian ijin rencana, IMB sesuai dengan ketentuan perencanaan yang berlaku.
3. Membantu penyusunan Rencana Teknis dan menyusun program-program pembangunan kota jangka menengah maupun jangka pendek pada masing-masing BWK yang diprioritaskan pengembangannya.

4.3.1 Indikasi Pembagian Unit-unit Lingkungan BWK berdasarkan RUTRK IKK Kedungpring, serta pembagian wilayah Kota IKK Kedungpring menjadi 2 Bagian Wilayah Kota (BWK), yaitu satu BWK sebagai pusat kota (BWK A) dan satu sub pusat kota yaitu (BWK B). Dengan pembagian kota tersebut agar dicapai

struktur kota sesuai dengan tingkat hierarki perkotaan, maka perlu adanya pembagian wilayah yang lebih kecil yaitu unit lingkungan di masing-masing BWK yang telah direncanakan.

Adapun dasar-dasar yang dipakai dalam penentuan adalah:

- Jumlah penduduk yang diperhitungkan sampai dengan akhir tahun perencanaan (tahun 2005/2006), yaitu sebesar 12.846 jiwa.
- Struktur jaringan jalan pola penyebaran pemukiman, untuk menentukan batasan fisik yang jelas.
- Luas dan bentuk wilayah perencanaan ialah untuk mempertimbangkan efektivitas pelayanan sosial.
- Karakteristik fisik, untuk mempertimbangkan pengembangan tata guna lahan dan pola jaringan jalan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka wilayah perencanaan dibagi ke dalam 2 BWK (Bagian wilayah Kota), serta beberapa unit lingkungan (neighbourhood unit), yaitu:

- BWK A terdiri dari empat unit lingkungan yaitu UL-1, UL-2, UL-3 dan UL-4.

- BWK B terdiri dari tiga unit lingkungan yaitu UL-1, UL-2 dan UL-3.

Penentuan unit lingkungan dalam perencanaan ini adalah dimaksudkan untuk menentukan batas wilayah pelayanan bagi fasilitas pelayanan sosial terhadap sejumlah penduduk penduduk tertentu. Dalam RUTRK dengan kedalaman RUTRK Kota IKK Kedungpring ini, penduduk pendukung sampai skala unit lingkungan adalah 1.000-3.500 jiwa, dapat dilihat pada Gambar IV-1 dan Gambar IV-2 (Pembagian Unit lingkungan dan Pusat Pelayanan BWK).



PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

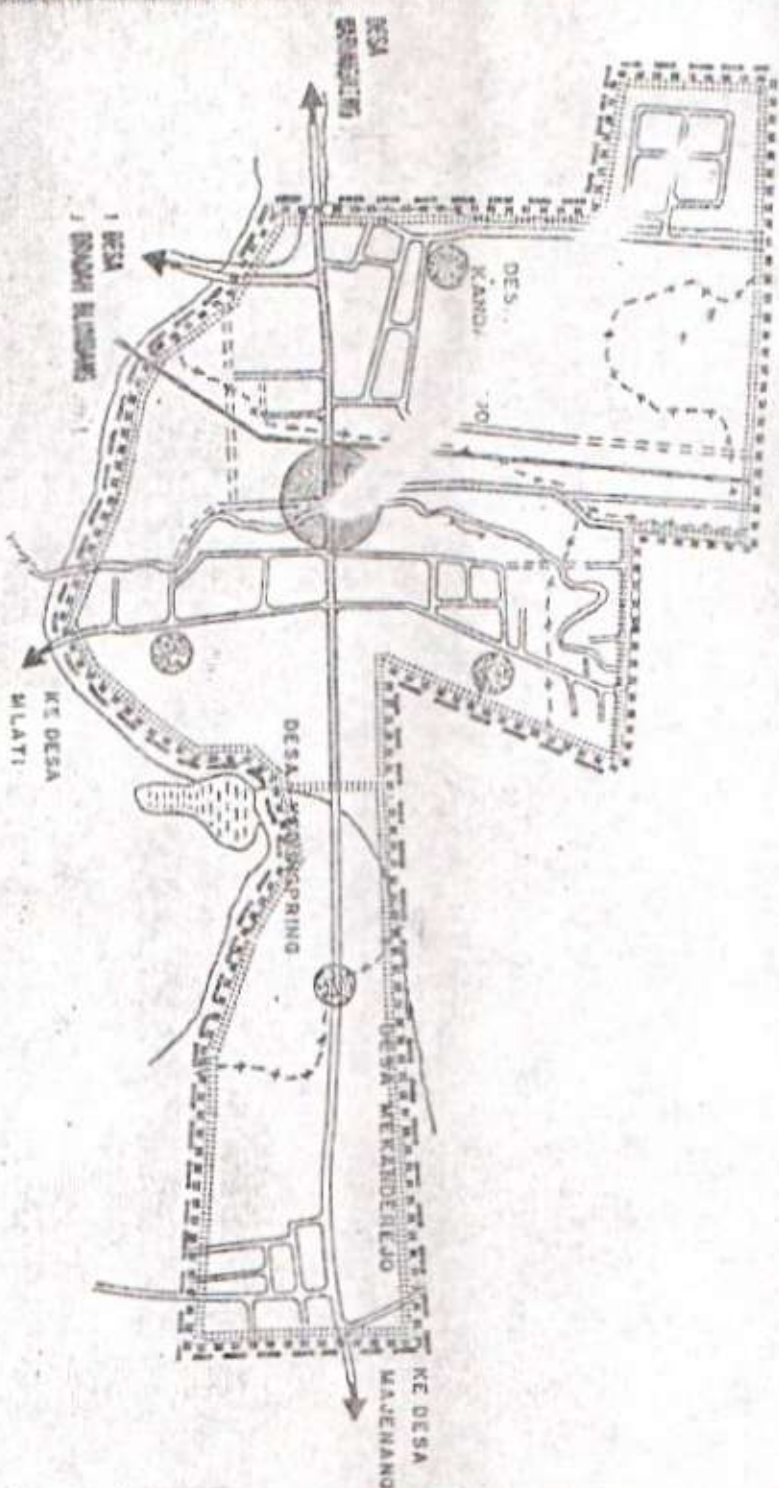
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
- RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
- RENCANA KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN 1995/1996 - 2005/2006

PETA RENCANA
UNIT LINGKUNGAN DAN
PUSAT PELAYANAN BKK - A

KE TEBAYAN :

- BATAK KOTA
- - - - - BATAS DESA
- ===== JALANAN JALAN
- KAL. KERTAS API
- ~~~~~ SIKAM
- ~~~~~ UNGK

- BATAS BKK (E-ASAM KAL. KERTAS API)
- PUSAT BKK
- BATAS UNIT LINGKUNGAN
- PUSAT BKK



SARAFI: MOKA FONGKON



SKALA
1:12500



PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN 1995/1996 - 2005/2006

PETA RENCANA
UNIT LINGKUNGAN DAN
PUSAT PELAYANAN BWK- B

KETERANGAN :

- BATAS KOTA
- - - - - BATAS DESA
- ===== JALINAN JALAN
- RIL KERETA API
- ~~~~~ SUNGAI
- ▲ MADUK
- [] BATAS BWK (DARI WILAYAH KOTA)
- [●] PUSAT BWK
- [] BATAS UNIT LINGKUNGAN
- [●] PUSAT UNIT

SUMBER : HASIL RENCANA



GAMBAR : N-2

DIGAMBAR :

DIPERIKSA :



SKALA

1:13000

4.3.2 Rencana Kepadatan Penduduk

Sesuai dengan arahan yang tertuang di dalam RUIRK IxK

Kedungpring tahun 2005/2006, serta hasil analisis bagi daya tampung dan distribusi penduduk masing-masing BWK yang diarahkan bagi kawasan perencanaan tahun 2005/2006, yaitu:

- Tingkat kepadatan 28 jiwa/ha untuk BWK A.
- Tingkat kepadatan 35 jiwa/ha untuk BWK B.

Bagi rencana kepadatan penduduk yang diarahkan pada masing-masing BWK tersebut, maka daya tampung penduduk adalah:

- BWK-A jumlah penduduk 6.048 jiwa
- BWK-B jumlah penduduk 6.800 jiwa

Distribusi penduduk masing-masing BWK tersebut akan dise-

barikan ke dalam 7 UL (Unit Lingkungan) yang direncanakan, di masing-masing Unit Lingkungan tersebut mempunyai pusat pelayanan dengan skala pelayanan Unit Lingkungan. Distribusi penduduk dan kepadatan yang diarahkan pada masing-masing Unit Lingkungan di kawasan perencanaan, dapat dilihat pada Tabel 4.3-1, Gambar IV-3 dan Gambar IV-4 (Rencana Distribusi Kepadatan Penduduk BWK).

4.3.3 Rencana Pemanfaatan Ruang Bagian Wilayah Kota

Dalam rangka mencapai sasaran pengembangan Kota IxK

Kedungpring yang lebih efisien serta pemerataan perkembangan antar bagian wilayah kota, maka tata ruang kawasan perencanaan telah dibagi beberapa bagian wilayah kota dengan pusat masing-masing, serta mempunyai fungsi sesuai dengan potensi yang

dimilikinya.

TABEL : 4.3-1

KEPADATAN PENDUK DI UL Masing-masing BWK Tahun 2005/2006

BWK	Unit Lingkungan	Luas BWK (ha)	Jumlah Penduduk (jiwa)	KEPADATAN PENDUK (jiwa/ha)
A	A-1	60.500	1.700	28
	A-2	34.100	1.500	44
	A-3	70.680	1.600	23
	A-4	54.350	1.248	23
	Jumlah	219.430	6.048	28
B	B-1	54.610	3.300	61
	B-2	76.770	2.500	32
	B-3	62.120	1.000	16
	Jumlah	193.430	6.800	35

Sumber : Hasil Penelitian Rencana

Dengan berpedoman kepada arahan yang ditetapkan di dalam rencana distribusi daya tampung penduduk, serta potensi perwilayan yang dimiliki oleh masing-masing bagian wilayah kota, maka rencana pengembangan tata ruang dicerminkan di dalam arahan penggunaan disediakan ruang untuk masing-masing komponen kegiatan yang akan ditempatkan pada masing-masing Bagian Wilayah Kota. Jenisnya dapat dilihat pada Gambar IV-5 dan Gambar IV-6 (Rencana Struktur Kegiatan BWK).

4.3.3.1 Pemanfaatan Ruang untuk Masing-masing Peruntukan pada

Tiap BWK

Rencana pemanfaatan ruang ini meliputi rencana sebaran dan luas masing-masing jenis penggunaan lahan pada masing-masing BWK. Hal ini didasarkan oleh rencana struktur ruang, kebutuhan ruang dan hubungan fungsional antar kegiatan.



PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN 1995/1996 - 2005/2006

PETA RENCANA DISTRIBUSI
KEPADATAN PENDUDUK
BWK-A

KETERANGAN :



A = LUS UNIT LINGKUNGAN (Ha)
B = JUMLAH PENDUDUK (JAW)
C = KEPADATAN PENDUDUK (JAW/ Ha)

SUMBER : HASIL REKONSTRUKSI

GAMBAR : N-2

DIGAMBAR :

DIPERIKSA :



SKALA

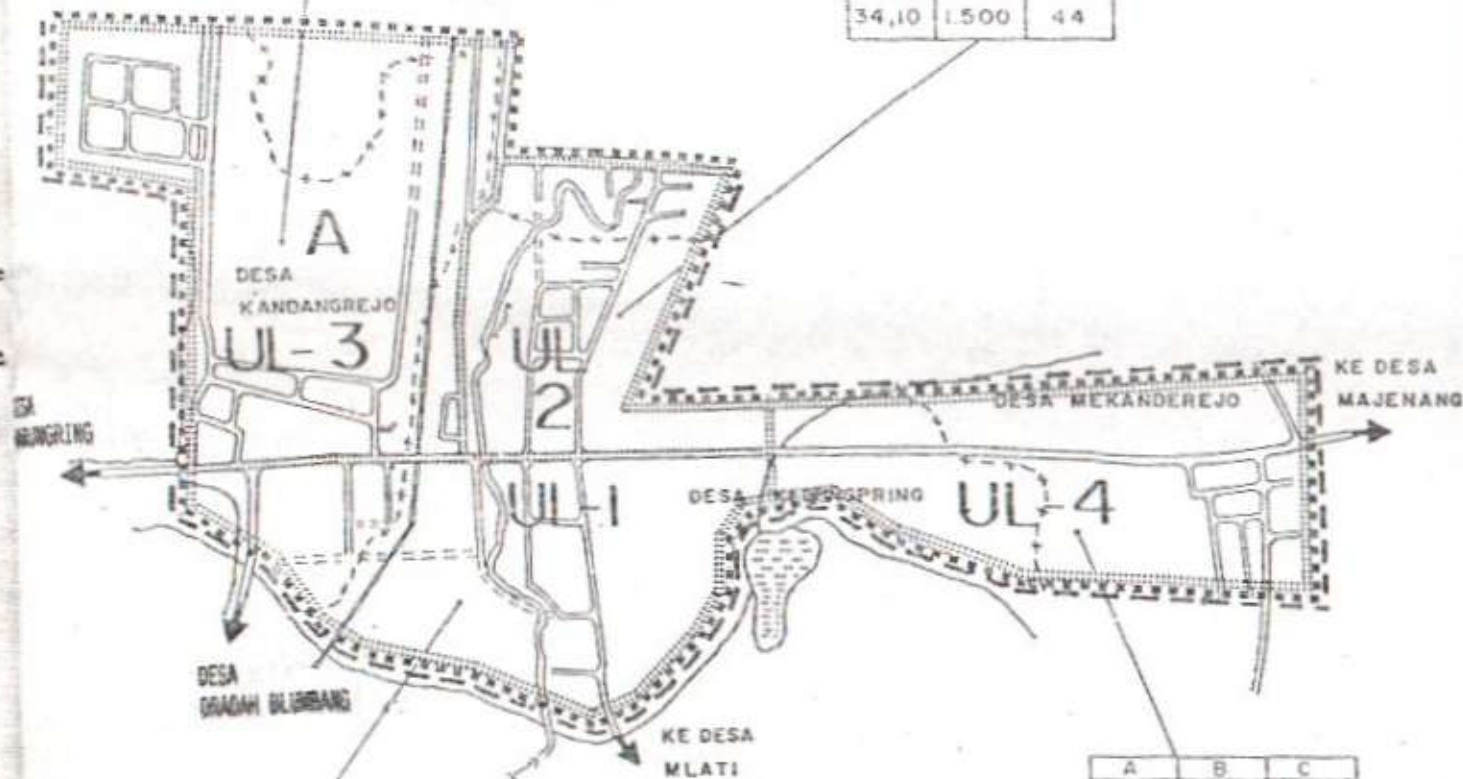
1:13500

A	B	C
70,68	1.600	23

A	B	C
34,10	1.500	44

A	B	C
54,35	1.248	23

A	B	C
50,30	1.700	28





PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN KEDUNGPIPING
TIRAN 1995/1996 - 2005/2006

PETA RENCANA DISTRIBUSI
KEPADATAN PENDUDUK
BIVK-B

LEGENDA :



A = LINGKUP LINGKUNGAN (LSL)
B = JUMLAH PENDUDUK (JMN)
C = KEPADATAN PENDUDUK (JMN/HA)

SUMBER : HASIL RENCANA

CAMPAIAN : 1/4"

DIGAMBAR : :

CONTOH : :

SKALA

1:12500

UTARA





**PEMERINTAH KABUPATEN
LAMONGAN
DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN KEDUNGPRING
T/M 1995/1996 - 2005/2006

**PETA RENCANA
STRUKTUR KEGIATAN KOTA
BWK-A**

KETERANGAN :

- BATAS KOTA
- - - - - BATAS DESA
- == JALINAN JALAN
- REL KERETA API
- SUNGAI
- WADUK

F1 KEGIATAN PRIMER

1. PASAR/PERAGANGAN GROSIR
2. INDUSTRI/GUDANG

F2 KEGIATAN SEKUNDER

1. PERKANTORAN
2. PENDIDIKAN
3. PERUMAHAN DAN JOM
4. PERIBADATAN
5. OPEN TEMPLE/ALUNGG, SELEP POOL, MINISTRI KEC/BRAN BANGUNAN
6. RESIDENSI
7. PARKIRAN OLEK/KELOMPOKAN LAMAM
8. LERANGAN OLAK RAGI DAN RESENSI

SARBER : HUKU RENCANA

GAMBAR : N-5 ;

DICANDAR :

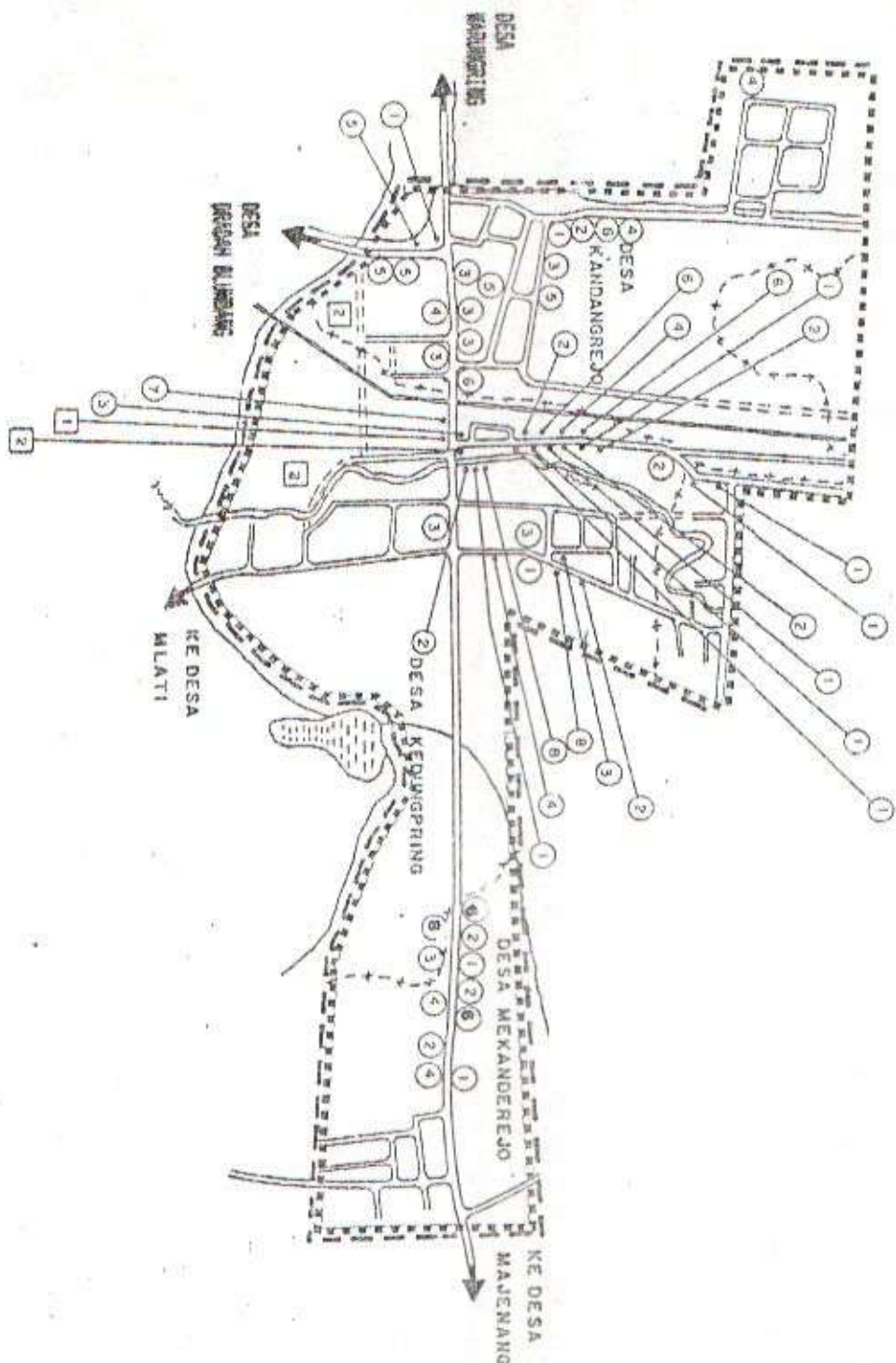
DIPERIKSA :

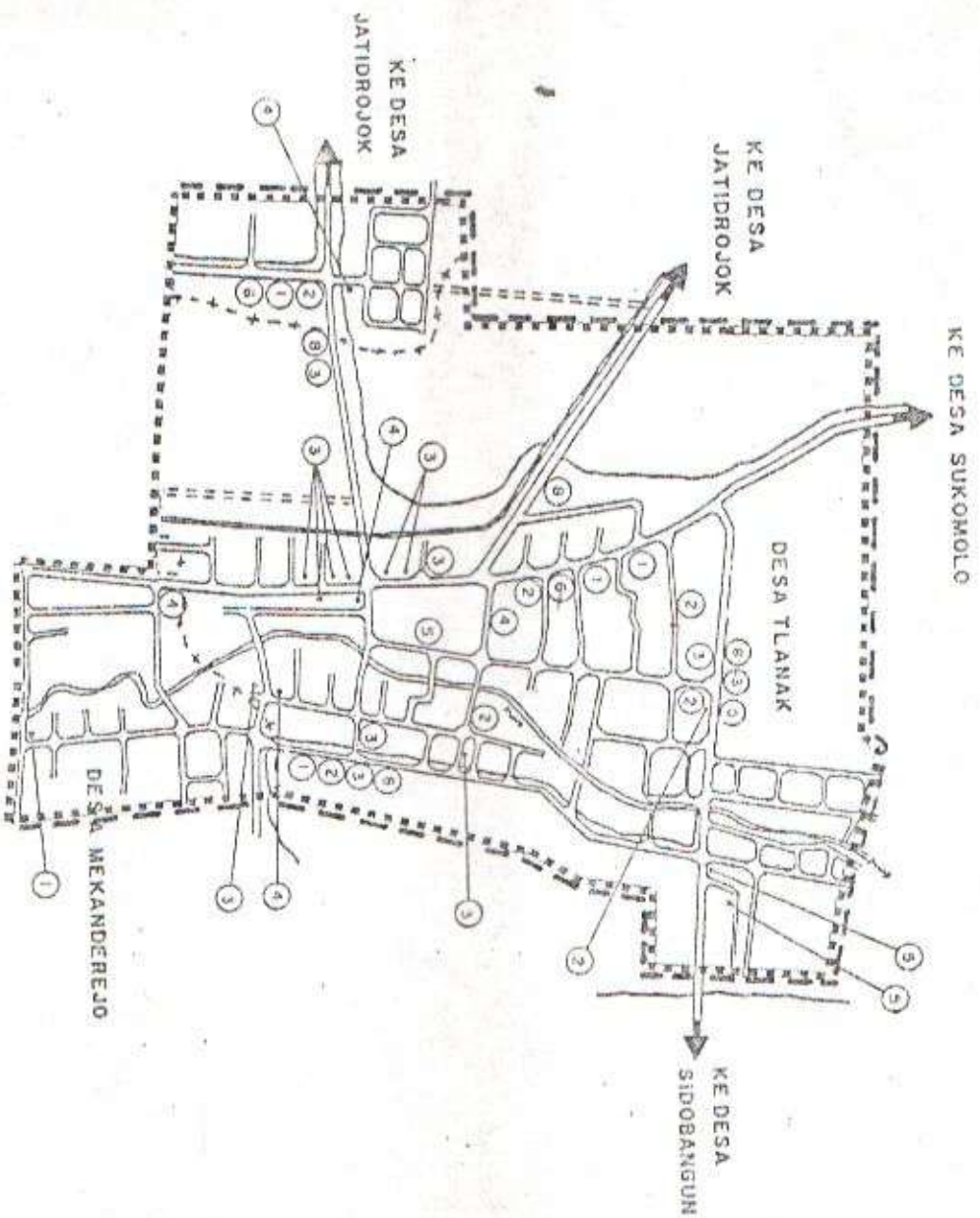
SKALA



UTARA

1 : 13000





F1 KEGIATAN PRIMER

1. PASIR/PERMANGGIR GROSSIR
2. INDUSTRI/OLAH

F2 KEGIATAN SEKUNDER

1. PERTANIAN
2. PERIKANAN
3. PENGOLAHAN DAN KASA
4. PENGOLAHAN
5. ORCA TERBUKA/OLAH, SELEP PAOL
6. INDUSTRI KECIL/BAHAN BAKAR
7. KESERATAN
8. PENGALAN OLEH/PERMANGGIR LINDAM
9. PERMANGGIR OLAH PASIR DAN REDRESI

SUMBER: HASIL REKONSTRUKSI

DAFTAR : 5-5

DIKEMBAR : 5-5

DIPERIKSA : 5-5

SKALA



UTARA

1 : 12000

Fungsi kegiatan yang terdapat di wilayah perencanaan berdasarkan rencana struktur ruang wilayah perencanaan yang telah ditetapkan menekankan pada kegiatan perdagangan, perkantoran, perumahan, kesehatan, dan pendidikan, pelayanan umum, dan ruang terbuka. Semua kegiatan tersebut memiliki skala pelayanan tertentu. Kebutuhan/persediaan ruang bagi komponen-komponen tersebut di atas diperhitungkan untuk tahun 2005/2006 menunjukkan bahwa persediaan/kebutuhan ruang untuk perumahan merupakan kebutuhan yang paling besar. Agar lebih jelas, untuk kebutuhan masing-masing penggunaan lahan dapat dijelaskan pada masing-masing rencana pemanfaatan/persediaan ruang berikut ini.

A. Fasilitas Pendidikan

Pertimbangan-pertimbangan dalam pendistribusian fasilitas pendidikan adalah:

- Skala dan jangkauan pelayanan efektif tiap-tiap fasilitas pendidikan terdiri dari skala pelayanan lokal, kota atau regional
- Tingkat aksesibilitas, terutama dalam kaitannya dengan sistem jaringan jalan yang akan diterapkan.
- Penempatan fasilitas pendidikan ada saat ini. Artinya, tetap perlu dilakukan optimasi pemanfaatan fasilitas yang telah ada.
- Apabila terdapat data distribusi fasilitas pendidikan eksisting yang kurang tepat, maka diasumsikan bahwa distribusi fasilitas pendidikan eksisting proporsional dengan distribusi penduduknya.

Fasilitas pendidikan yang memiliki skala lingkungan/Unit Lingkungan adalah Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar. Sedangkan Sekolah Lanjutan Pertama dan Sekolah Lanjutan Atas merupakan fasilitas dengan tingkat pelayanan kota/regional.

Fasilitas pendidikan dengan skala pelayanan regional/kota direncanakan akan dialokasikan pada BWK-A (Pusat Kota), sedangkan fasilitas pendidikan yang lainnya didistribusikan merata di segala bagian wilayah kota.

B. Fasilitas Kesehatan

Pertimbangan-pertimbangan dalam pendistribusian fasilitas kesehatan, adalah:

- Skala pelayanan, yaitu perbedaan antara fasilitas dengan skala pelayanan regional/kota dengan skala pelayanan lingkungan/BWK.
- Fasilitas dengan skala pelayanan regional/kota adalah Puskesmas dan Apotik. Sedangkan fasilitas dengan skala pelayanan lingkungan adalah Puskesmas pembantu/BKIA, Praktek dokter dan Poliklinik.
- Rencana peruntukannya terutama mengatur penempatan fasilitas kesehatan dengan skala pelayanan BWK yang baru. Sedangkan untuk fasilitas dengan skala pelayanan regional diusahakan untuk mengikuti pola yang sudah ada.
- Karena terbatasnya data distribusi fasilitas kesehatan eksisting, maka distribusinya diasumsikan proporsional dengan distribusi penduduk.

C. Fasilitas Peribadatan

Fasilitas peribadatan yang akan direncanakan khususnya fasilitas peribadatan bagi pemeluk agama Islam sebagai agama dari sebagian besar penduduk di kawasan rencana akan dicangkupan akan menjadi salah satu ciri khas kota Kedungpring.

Adapun arahan pengembangan fasilitas peribadatan ini akan disesuaikan secara hirarki masjid, yaitu:

- Untuk seluruh kota, ditentukan masjid utama sebagai focal point atau face of city selain Alun-alun kota.
- Pada hierarki di bawahnya, ditentukan satu BKK dilayani minimal oleh satu masjid jami.
- Untuk masjid kecil dan langgar, jumlah kebutuhannya disesuaikan dengan jumlah penduduk.
- Ketentuan-ketentuan di atas tidak berlaku untuk sub-sub wilayah kota yang padat, fasilitas peribadatannya disesuaikan dengan tingkat kepadatan penduduk yang harus dilayani.
- Jika terdapat data distribusi fasilitas-fasilitas peribadatan yang tidak lengkap, maka diasumsikan bahwa distribusi fasilitas peribadatan eksisting proporsional dengan distribusi penduduknya. Sedangkan kriteria-kriteria penempatannya, adalah:
- Aksesibilitas, terutama dikaitkan dengan sistem jaringan jalan yang akan diterapkan.
- Skala dan jangkauan pelayanan efektif tiap-tiap fasilitas.
- Untuk fasilitas peribadatan bagi pemeluk agama lainnya, jumlah penempatannya dan pendiriannya akan disesuaikan dengan jumlah yang akan mememanfaatkannya.

D. Fasilitas Perdagangan

Pertimbangan-pertimbangan dalam pendistribusian fasilitas-fasilitas perdagangan dan jasa, adalah:

- Adanya skala pelayanan yang berbeda, yaitu skala pelayanan lokal (perdagangan eceran) dan skala pelayanan regional (perdagangan grosir).
- Optimalisasi dan pengaturan pemanfaatan yang sudah ada, yaitu perdagangan grosir ditempatkan pada kawasan yang mudah utuh dan utuh daerah belakang (hinterland). Sedangkan perdagangan eceran ditempatkan pada pusat BKK dan lingkungan.
- Pedoman arahan yang telah ditetapkan dalam RUK.

Sekaligus melengkapi pertimbangan-pertimbangan di atas beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu:

- Pada dasarnya, kebutuhan ruang untuk kegiatan perdagangan sulit untuk ditentukan melalui pendekatan standar-standar perencanaan yang lazim dikenal.
- Kebutuhan ruang untuk kegiatan perdagangan, ditentukan oleh intensitas interaksi perdagangan antara pedagang dan pembeli yang terjadi, skala pelayanan dan lain-lain.

Dengan demikian kebutuhan ruang merupakan kebutuhan sekunder bagi kegiatan-kegiatan perdagangan karena sifatnya hanya untuk mewujudkan kebutuhan primer, yaitu terjadinya interaksi antara pedagang dan pembeli.

Dari pengamatan lapangan dan analisis kecenderungan jumlah fasilitas perdagangan dan jasa di kawasan rencana sempat tahun 2005/2006 telah mencukupi, atau paling tidak hanya perlu

dilakukan sedikit penanaman, pengaturan dan pendistribusian yang lebih merata agar japat menjangkau seluruh lapisan masyarakat membutuhkan.

Adapun bentuk pengaturan yang dapat dilakukan, misalnya adalah pengaturan tentang skala pelayanan sesuai dengan rencana peruntukannya, fasilitas perdagangan yang terletak pada kawasan tertentu dimungkinkan untuk berkembang menjadi perdagangan grosir, sedangkan yang berlokasi pada kawasan tertentu lainnya, dibatasi hanya untuk perdagangan eceran.

Fasilitas perdagangan yang memiliki skala lingkungan adalah pertokoan kecil yaitu toko yang menjual barang-barang keperluan sehari-hari di setiap pusat BKK dan Unit Lingkungan.

E. Fasilitas Rekreasi dan Olah Raga

Pada dasarnya penyebaran/pemenuhan fasilitas rekreasi dan

olah raga ini direncanakan terdapat di BKK dan Unit Lingkungan. Demikian pula halnya dengan jenisnya, untuk setiap unit lingkungan direncanakan akan terdapat fasilitas rekreasi, olah raga, dan lapangan terbuka.

F. Fasilitas Pemerintahan/Perkantoran

Ada tiga hal yang menjadi pertimbangan dalam penentuan penempatan fasilitas pemerintahan, yaitu:

- Pemisahan antara fasilitas pemerintahan Kecamatan, Tingkat desa dan fasilitas pemerintahan tingkat RW. Fasilitas pemerintahan regional penempatannya diusahakan untuk mendekati jalan regional (jalan raya utama), sedangkan bagi desa, penempatannya

ditekan pada kawasan yang mendekati pusat BKK untuk etas-

- Penempatan fasilitas yang telah ada sampai saat ini dan yang akan dilaksanakan selanjut mungkin diprioritaskan menurut akan dilaksanakan yang telah ada, sepanjang perubahan tersebut secara prinsip tidak mengganggu.

- Pola peruntukan fasilitas pemerintahan secara makro, mengikuti pola yang telah ditetapkan dalam RUTK serta kebijaksanaan pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

G. Fasilitas Kebudayaan dan Kesenian

Fasilitas ini dipersiapkan untuk menunjang segala aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan yang berhubungan dengan kebudayaan dan kesenian. Fasilitas ini meliputi Balai pertemuan, gedung serba guna dan gedung kesenian.

H. Perumahan

Kebutuhan lahan untuk perumahan ini di estimasikan dengan mengasumsikan proporsi jumlah penduduk wilayah perencanaan dan type luas kapling yang ada di kawasan perumahan, dimana terdapat dari kebutuhan lahan untuk perumahan dengan luas kapling > 500m² yang ditujukan untuk kelompok pemukiman pendapatan tinggi dan kelompok pemukiman tingkat pendapatan rendah, untuk golongan pendapatan menengah dan kelompok pemukiman dengan tingkat pendapatan sedang dengan kebutuhan luas kapling perumahan 400 - 500 m², dan untuk golongan pendapatan rendah dan kelompok pemukiman tingkat pendapatan tinggi dengan lahan < 300 m².

luas kebutuhan ruang untuk perumahan masing-masing BKK ditentukan berdasarkan rencana distribusi penduduk wilayah perencanaan tahun 2005/2006 dan struktur ruang wilayah perencanaan yang telah disusun.

1. Kuburan, Ruang Terbuka dan Transportasi/Jaringan Jalan

- Kuburan.

Untuk pemenuhan kebutuhan fasilitas kuburan di kawasan rencana, beberapa kriteria yang dipergunakan sebagai berikut:

1. Memanfaatkan kawasan potensial (yang cocok untuk kuburan), dengan mengambil daerah yang berdasarkan rencana peruntukan lahan dialokasikan untuk tidak dibangun.

2. Mengoptimalkan fasilitas yang sudah ada, dengan jalan mempertahankan fasilitas yang sudah ada dan menyiapkan lahan baru untuk perluasannya dalam batas-batas tertentu. Alokasi fasilitas kuburan ini di kawasan rencana tidak secara tegas ditunjukkan dalam gambar Rencana Tata Guna Lahan, namun bagi fasilitas kuburan yang telah ada di kawasan dengan intensitas kegiatan cukup tinggi sebaiknya tidak dikembangkan di lokasi yang bersangkutan.

Selain mempertimbangkan kedua kriteria tersebut diatas faktor yang juga perlu diperhatikan dalam pengalokasian fasilitas ini adalah jaraknya terhadap pemukiman penduduk.

- Jalur Hijau dan Ruang Terbuka Hijau.

Yang dimaksud dengan jalur hijau dan ruang terbuka hijau, disini adalah daerah-daerah yang perlu untuk dijaga kelestariannya.

Untuk kawasan rencana, kawasan-kawasan yang perlu dijaga adalah kawasan kiri kanan sungai, industri dan taman kota.

- Transportasi/Jaringan Jalan.

Rencana persediaan dan pemanfaatan ruang untuk fasilitas transportasi ini adalah untuk melancarkan pergerakan antara satu bagian wilayah dengan bagian wilayah yang lainnya bagi pengembangan jaringan jalan dan pendukung pergerakan.

Untuk mendapatkan pelayanan transportasi optimum di kawasan rencana, persediaan ruang bagi kebutuhan ini adalah 15-25% dari total penggunaan ruang kawasan.

Untuk jelasnya mengenai rencana pemanfaatan ruang dapat dilihat pada Tabel 4.3-3 sampai Tabel 4.3-5, serta pada Gambar IV-7 dan Gambar IV-8 (Rencana Penggunaan Lahan BKK).

4.3.3.2 Ketentuan-ketentuan/persyaratan Kegiatan Penunjang Fungsi Utama BKK

Untuk mencapai hasil yang optimal didalam pemanfaatan ruang kota untuk kegiatan penunjang di setiap BKK, maka ketentuan dan persyaratan bagi setiap kegiatan penunjang setiap BKK adalah :

- Setiap kegiatan penunjang yang akan dan berada setiap BKK pusat kota harus dapat mendukung fungsi dan peranan BKK yang bersangkutan di Kota Kedungpring.

- Setiap kegiatan yang akan dikembangkan harus terjamin dengan adanya kepastian hukum bagi masyarakat terhadap tanah dan bangunan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

- Lokasi peruntukan kegiatan harus bebas dari banjir, pencemaran dan kemudahan untuk pelayanan fasilitas dan utilitas, sehingga tercapai tingkat kualitas lingkungan hidup yang sehat.

4.3.4 Rencana Sistem Transportasi

Rencana Pengembangan sistem transportasi akan terdiri dari tiga aspek, yaitu rencana pengembangan prasarana transportasi, rencana pengembangan sarana transportasi dan rencana pengembangan fasilitas transportasi.

- Prasarana Transportasi:

Prasarana transportasi yang dimaksud meliputi jaringan jalan, pengembangan jaringan jalan baru, peningkatan jaringan baik struktur maupun kualitas, serta rencana geometrik jalan.

- Sarana Transportasi:

Sarana transportasi yang dimaksud yaitu meliputi sarana angkutan umum beserta pelayanannya.

- Fasilitas Transportasi:

Fasilitas transportasi berupa pangkalan kendaraan umum (sub terminal), halte, dan perlengkapan jalan.

A. Rencana Pengembangan Jaringan Jalan.

Berdasarkan rencana Umum Tata Ruang Kota dan rencana peruntukan lahan yang akan dikembangkan di kawasan rencana, dimana di kawasan perencanaan ini akan terjadi pergeseran kegiatan, maka kebutuhan akan prasarana jaringan jalan meningkat pula.

Pergeseran ini akan membutuhkan pengembangan, sehingga untuk merencanakan jaringan jalan pada wilayah perencanaan

tersebut. Perencanaan jaringan jalan yang akan dikembangkan meliputi pembuatan jaringan jalan dan perbaikan kondisi jalan yang ada sekarang.

Rencana pembuatan jaringan jalan di wilayah perencanaan khususnya di unit-unit lingkungan di masing-masing BWH, dimaksudkan untuk mempertinggi aksesibilitas penduduk wilayah perencanaan, serta mendukung rencana peruntukan kegiatan yang telah dirumuskan.

Pertimbangan yang diambil dalam merencanakan jaringan jalan baru ini adalah dengan dirasakan kurangnya pemenuhan kebutuhan akan prasarana jaringan jalan yang dapat menampung lalu lintas yang ditimbulkan oleh kegiatan pemukiman dan kegiatan lainnya, misalnya industri/peredagangan, perdagangan, pemukiman dan lain-lain untuk masa mendatang.

Rencana peningkatan jalan yang ada di wilayah perencanaan dimaksudkan untuk memperlancar pergerakan lalu lintas di wilayah perencanaan. Selain itu juga dimaksudkan agar pemakai jasa dapat bergerak cepat, aman, dan menyenangkan.

Adapun prioritas jaringan jalan yang direncanakan untuk di perbaiki pada wilayah perencanaan adalah jalan-jalan yang mempunyai tingkat kepentingan bagi perekonomian kota/kegiatan penduduk. Tingkat kepentingan yang dimaksud adalah bahwa jalan-jalan tersebut merupakan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh penduduk untuk mobilitas kegiatannya, sehingga dirasakan penting

TABEL : 4.3-3
KEBUTUHAN PENYEDIAAN FASILITAS DAN RUANG D: TIAP BWK, KOTA KEDUNGPRING TAHUN 2005/2006

Jenis Fasilitas	Jumlah Penduduk (jiwa)	Standart Kebutuhan (Ha)	Kebutuhan Fasilitas Kota					
			BWK A		BWK B		KOTA	
			Kebu- tuhan (unit)	Luas Lahan (Ha)	Kebu- tuhan (unit)	Luas Lahan (Ha)	Kebu- tuhan (unit)	Luas Lahan (Ha)
A. Fasilitas Pendidikan								
- Taman Kanak-kanak	4.280	0.120	4	0.480	4	0.480	8	0.960
- Sekolah Dasar	8.560	0.150	9	1.350	11	1.650	20	3.000
- Sekolah Lanjutan Pertama	4.840	1.600	3	8.000	3	8.000	10	16.000
- Sekolah Lanjutan Atas	4.730	1.700	3	8.500	3	2.500	10	17.000
B. Fasilitas Kesehatan								
- Puskesmas	30.000	0.120	1	0.000	1	0.120	1	0.120
- Puskesmas Pembantu	6.000	0.035	1	0.060	1	0.060	1	0.120
- Tempat Praktek Dokter	10.000	0.035	1	0.070	1	0.105	1	0.175
- Apotik	10.000	0.030	1	0.060	1	0.090	1	0.150
- Poli Klinik	10.000	0.060	2	0.120	3	0.180	5	0.300
C. Fasilitas Peribadatan								
- Masjid Kota	30.000	0.175	1	0.175	1	0.175	1	0.175
- Masjid	5.000	0.075	1	0.075	1	0.075	1	0.150
- Langgar	1.000	0.050	1	0.300	6	0.300	12	0.600
D. Fasilitas Perdagangan								
- Gerai	250	0.075	1	0.075	1	0.000	1	0.075
- Warung	500	0.010	24	0.240	27	0.270	51	0.510
- Pertokoan (BWK)	5.000	0.015	12	0.180	13	0.195	25	0.375
- Pertokoan + Pasar	30.000	0.120	1	0.120	1	0.120	1	0.240
E. Fasilitas rekreasi dan OR								
- Jasa Perdagangan	1.350	1.350	1	1.350	1	0.000	1	1.350
- Tempat bermain	250	0.025	24	0.600	27	0.675	51	1.275
- Taman & OR	1.500	0.125	4	0.500	4	0.500	8	1.000
- Taman & Lapangan OR	30.000	0.600	1	2.400	1	0.600	1	2.400
F. Perkantoran								
- PA/UL	1.500	0.020	4	0.080	3	0.060	7	0.140
- BmK	5.000	0.400	1	0.400	1	0.400	1	0.800
- Kecamatan	30.000	1.400	1	1.400	1	0.400	1	1.400
- Setingkat Kecamatan/Desa	1.000	1.000	1	0.500	1	0.500	1	1.000
G. KUDAYATI								
- Balai Pertemuan (BWK)	5.000	0.500	1	0.500	1	0.000	1	0.500
- GSG (BWK)	5.000	0.040	1	0.040	1	0.040	2	0.080
- GSG	30.000	0.100	1	0.100	1	0.100	1	0.200
- Kesenian	30.000	0.200	1	0.200	1	0.000	1	0.200
H. Perumahan								
- Blok	30.000	0.300	1	0.300	1	0.300	1	0.300
- Perumahan	30.000	0.200	1	0.200	1	0.000	1	0.200
I. KADILING Besar								
- KADILING Sedang	0.050	0.050	151	7.550	170	8.500	321	16.050
- KADILING Kecil	0.030	0.030	453	18.120	510	20.400	963	38.520
J. Industri/Perdagangan	10.000	1.020	907	27.210	1.020	30.630	1.927	57.810
K. Ruang Terbuka Hijau	0.400	0.400	1	1.000	1	1.000	1	10.000
L. Transportasi	2.56	15-23 Km	1	9.072	1	10.200	1	19.272
				25.782		23.505		49.287
KEBUTUHAN LAHAN (Ha)			128.909		117.700		240.434	
LAHAN CADANGAN/PERTANIAN TEKNIS (Ha)			90.521		77.730		168.426	
LUAS LAHAN (Ha)			219.430		195.430		414.860	

Sumber : Hasil perhitungan Rencana

TABLE 4-3-4

KEBUTUHAN PENYEDIAAN FASILITAS DAN RUANG DI SWK A, KOTA KEDUNGPRING TAHUN 2005/2006

Jenis Fasilitas	Jumlah Penduduk Perkotaan (Jawa)	Standard kebutuhan (m ²)	Kebutuhan Fasilitas Kota										
			Blok A		UL-1		UL-2		UL-3		UL-4		
			Kebu- tuan (unit)	Luas lahan (Ha)	Kebu- tuan (unit)	Luas lahan (Ha)	Kebu- tuan (unit)	Luas lahan (Ha)	Kebu- tuan (unit)	Luas lahan (Ha)	Kebu- tuan (unit)	Luas lahan (Ha)	
A. Fasilitas Pendidikan													
- Taman Kanak-kanak	A	0.120	4	0.480	2	0.240	1	0.120	1	0.120	1	0.120	1
- Sekolah Dasar	B	0.150	9	1.350	2	0.300	2	0.300	2	0.300	2	0.300	2
- Sekolah Lanjutan Pertama	C	1.000	5	8.500	1	1.600	1	1.600	1	1.600	1	1.600	1
- Sekolah Lanjutan Atas	D	4.700	5	8.500	1	1.700	1	1.700	1	1.700	1	1.700	1
B. Fasilitas Kesehatan													
- Puskesmas		0.120	1	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0
- Puskesmas Pembantu		0.060	1	0.060	0	0.000	0	0.060	0	0.060	0	0.060	0
- Tempat Praktek Dokter		0.035	2	0.070	0	0.000	0	0.035	0	0.035	0	0.035	0
- Apotik		0.030	2	0.060	0	0.000	0	0.030	0	0.030	0	0.030	0
- Poli Klinik		0.060	2	0.120	0	0.000	0	0.060	0	0.060	0	0.060	0
C. Fasilitas Perbaikan													
- Masjid Kota		0.175	1	0.175	1	0.175	1	0.000	0	0.000	0	0.000	0
- Masjid		0.075	1	0.075	0	0.000	0	0.075	0	0.075	0	0.075	0
- Langgar		0.050	6	0.300	1	0.050	1	0.050	1	0.050	1	0.050	1
- Gereja		0.075	1	0.075	0	0.000	0	0.075	0	0.075	0	0.075	0
D. Fasilitas Perdagangan													
- Warung		0.010	24	0.240	6	0.060	6	0.060	6	0.060	6	0.060	6
- Toko		0.015	12	0.180	3	0.045	3	0.060	3	0.045	3	0.045	3
- Per tokoan (Bak)		0.120	1	0.120	0	0.000	0	0.120	0	0.120	0	0.120	0
- Per tokoan + Pasar		1.350	1	1.350	1	1.350	1	0.000	0	0.000	0	0.000	0
- Jasa Perdagangan		1.500	1	1.500	1	1.500	1	0.000	0	0.000	0	0.000	0
E. Fasilitas rekreasi dan OR													
- tempat bermain		0.025	24	0.600	6	0.150	6	0.200	6	0.150	6	0.150	6
- Taman & OR		0.125	4	0.500	1	0.125	1	0.125	1	0.125	1	0.125	1
- Taman & Lapangan OR		0.600	1	0.600	0	0.000	0	0.600	0	0.600	0	0.600	0
- Taman & Lapangan OR		2.400	1	2.400	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0
F. Perkantoran													
- Rm/UL		0.020	4	0.080	1	0.020	1	0.020	1	0.020	1	0.020	1
- Bnk		0.400	1	0.400	0	0.000	0	0.400	0	0.400	0	0.400	0
- Kecamatan		1.400	1	1.400	0	0.000	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
- Selingkat Kecamatan/Desa		1.000	1	0.500	0	0.000	0	0.500	0	0.500	0	0.500	0
- Kantoran Swasta		0.500	1	0.500	0	0.000	0	0.500	0	0.500	0	0.500	0
G. Fasilitas Perumahan													
- Gedung Perumahan (Bak)		0.040	1	0.040	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0
- GSK (Bak)		0.100	1	0.100	0	0.000	0	0.100	0	0.100	0	0.100	0
- GSK		0.200	1	0.200	0	0.000	0	0.200	0	0.200	0	0.200	0
- Keseniran		0.300	0	0.300	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0
- Bioskop		0.200	1	0.200	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0
H. Perumahan													
- Kading Besar		0.050	151	7.550	43	2.150	1.850	40	2.000	2.000	2.000	31	
- Kading Sedang		0.040	453	18.120	128	5.120	4.480	120	4.800	4.800	4.800	93	
- Kading Kecil		0.030	907	27.210	255	7.650	6.750	225	7.200	7.200	7.200	187	
I. Industri/perdagangan		10.000	1	10.000	1	10.000	0.000	240	0.000	0.000	0.000	0.000	
J. Kiburan/balokan		0.400	1	1.000	1	2.550	2.250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
K. Ruang terbuka hijau		15 m ² /pdk	15	25.752	8.711	8.711	5.703	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	
L. Transportasi		15-25% KD.											
KEBUTUHAN LAHAN (Ha)			128.909		43.556		28.513		27.325		29.640		
LAHAN CADANGAN/PERTAMILAN TENNIS (Ha)			90.521	*	16.744		5.598		43.355		24.710		
LUAS LAHAN (Ha)			219.430		60.300		34.100		70.680		54.350		

Sumber : Hasil perhitungan Rencana

TABEL : 4.3-5
KEBUTUHAN PENYEDIAAN FASILITAS DAN RUANG DI BWK B, KOTA KEDUNGPRING TAHUN 2005/2006

Jenis Fasilitas	Jumlah Penduduk (jiwa)	Standart (Ha)	Kebutuhan Fasilitas Kota					
			BWK B		UL-1		UL-2	
			Kebu- tuhan (unit)	Luas Lahan (Ha)	Kebu- tuhan (unit)	Luas Lahan (Ha)	Kebu- tuhan (unit)	Luas Lahan (Ha)
A. Fasilitas Pendidikan								
A. Taman Kanak-kanak	4.280	0.120	4	0.480	3.500	0.240	4	0.120
B. Sekolah Dasar	8.940	0.150	11	1.650	3.500	0.750	4	0.300
C. Sekolah Lanjutan Pertama	4.840	1.500	5	9.000	3.200	3.200	1	1.500
D. Sekolah lanjutan Atas	4.730	1.700	5	8.500	3.400	3.400	1	1.200
B. Fasilitas Kesehatan								
Puskesmas	30.000	0.120	1	0.120	0.000	0.000	1	0.000
Puskesmas Pembantu	6.000	0.060	1	0.060	0.000	0.000	1	0.000
Tempat Praktik Dokter	10.000	0.035	1	0.105	0.035	0.035	1	0.035
Apotik	10.000	0.030	1	0.030	0.000	0.000	1	0.030
Poliklinik	10.000	0.060	1	0.180	0.060	0.060	1	0.060
C. Fasilitas Peribadatan								
Masjid Kota	30.000	0.175	1	0.175	0.175	0.175	1	0.175
Masjid	5.000	0.075	1	0.075	0.000	0.000	1	0.000
Gereja	1.000	0.050	1	0.050	0.000	0.000	1	0.000
D. Fasilitas Perdagangan								
Warung	250	0.010	27	0.270	13	0.130	10	0.100
Toko	300	0.015	13	0.195	13	0.090	15	0.075
Pertokoan (BWK)	5.000	0.120	1	0.120	0.000	0.000	1	0.120
Pertokoan + pasar	30.000	1.350	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Jasa Perdagangan	1.500	1.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
E. Fasilitas rekreasi dan OR								
Tempat bermain	250	0.025	27	0.675	13	0.325	6	0.200
Taman & OR	1.300	0.125	4	0.500	1	0.250	1	0.125
Taman & Lapangan OR	5.000	0.600	1	0.600	0.000	0.000	0.000	0.000
Taman & Lapangan OR	30.000	2.400	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
F. Perkantoran								
BWK/UL	1.500	0.020	3	0.060	1	0.020	0.020	0.020
Kecamatan	5.000	0.400	1	0.400	0.000	0.000	0.000	0.000
Setingkat Kecamatan/Desa	30.000	1.400	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Perkantoran Swasta	0.500	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
G. Kebudayaan								
Balai Pertemuan (BWK)	5.000	0.040	1	0.040	0.000	0.000	0.000	0.000
GSG (BWK)	5.000	0.100	1	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000
GSG	30.000	0.200	1	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000
Kesenian	30.000	0.300	1	0.300	0.000	0.000	0.000	0.000
Bioskop	30.000	0.200	1	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000
H. Perumahan								
Kapurang Besar	0.050	0.050	170	8.500	83	4.150	62	3.100
Kapurang Sedang	0.040	0.040	510	20.400	248	9.920	187	7.480
Kapurang Kecil	1.020	1.020	1	1.020	495	14.820	375	11.250
I. Industri/perdagangan								
Kuburan/makam	0.400	0.400	1	1.000	0.000	0.000	1	1.000
E (4)	0.400	0.400	1	1.000	0.000	0.000	1	1.000
J. Ruang terbuka hijau	2.56	15 m ² /pddk	15	23.505	10	4.950	9	3.750
K. Transportasi								
15-25% Kd.								
KEBUTUHAN LAHAN (Ha)			117.700		53.819		45.700	
LAHAN CADANGAN/PERTANIAN TEKNIS (Ha)			77.730		0.721		33.070	
LUAS LAHAN (Ha)			195.430		54.540		78.770	
Sumber : Hasil perhitungan Rencana							19.125	
							43.995	
							62.120	

PENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
PENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN KEDJUNGPRING
Tahun 1985/1996 - 2005/2005

FACULTY CHAIRMAN:

100-443874-70001

RESEARCH

FOR THE EDITOR

7000070200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

780606254/JASNA



9 780106 248724

+

065886700

2001. 02. 28

11/10/2007 11:10:00 AM

INSTITUTION

800-850-8500

111

CHAPTER : 10-7

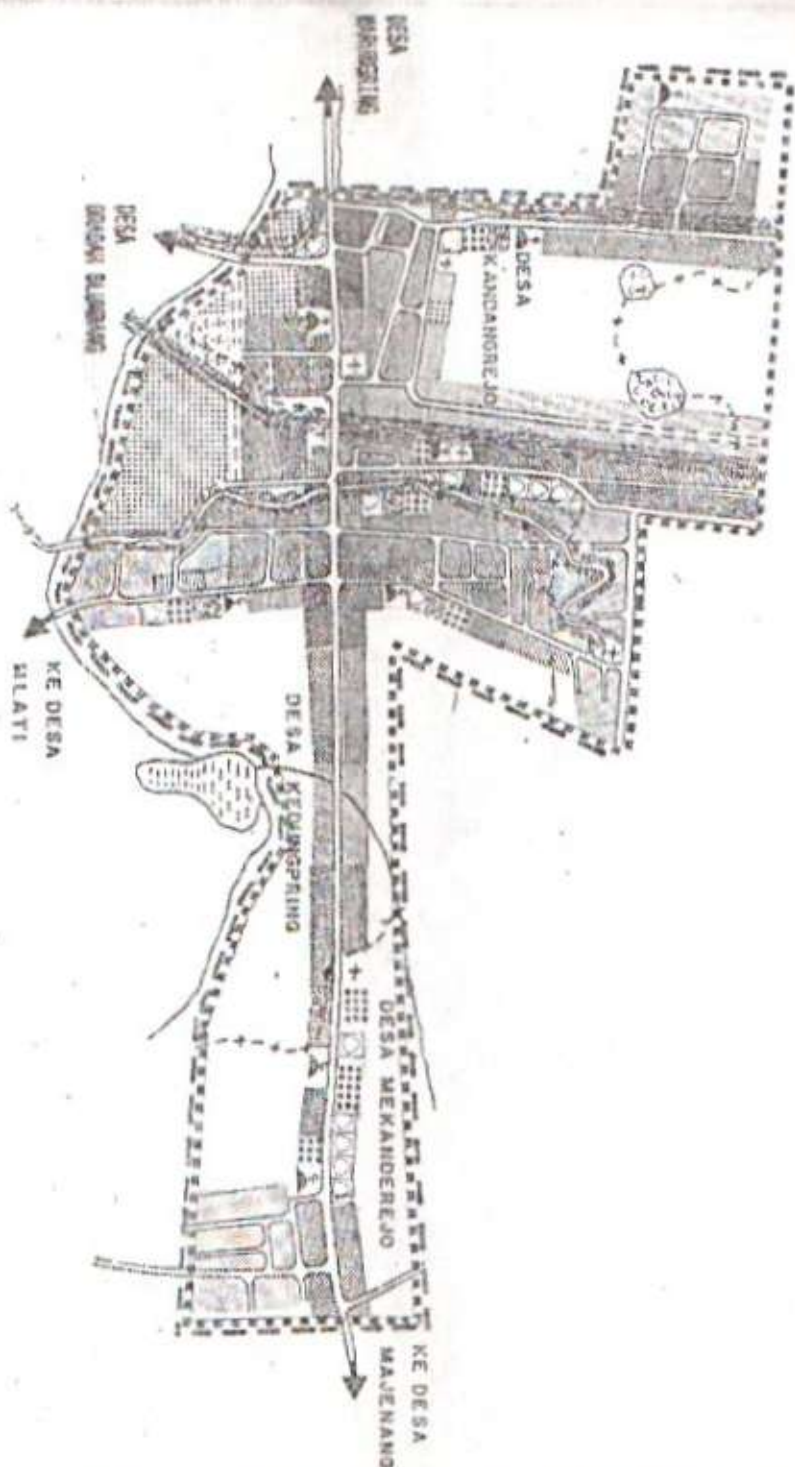
PROBATION : *Open*

VOLUME 20

205 JUL 1985

1:13000

UTAH



RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
JURUKOTA KEKAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN 1995/1996 - 2005/2006

SEE THE ROAD

--- 96725 WOT A
--- 4 - 4 BATES 065 A

[illegible][illegible][illegible]

44788-0000

中國銀行
交通銀行
建設銀行
農業銀行
郵政儲蓄
中央信託
財政部
國庫券

中華民國二十六年一月一日

0000007001185A

7827821

1000

1000

11/11/2014 11:11:11 AM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible]

LAWRENCE PETERSON

SUBJECT: HAZARDOUS WASTE

$$N = 0$$

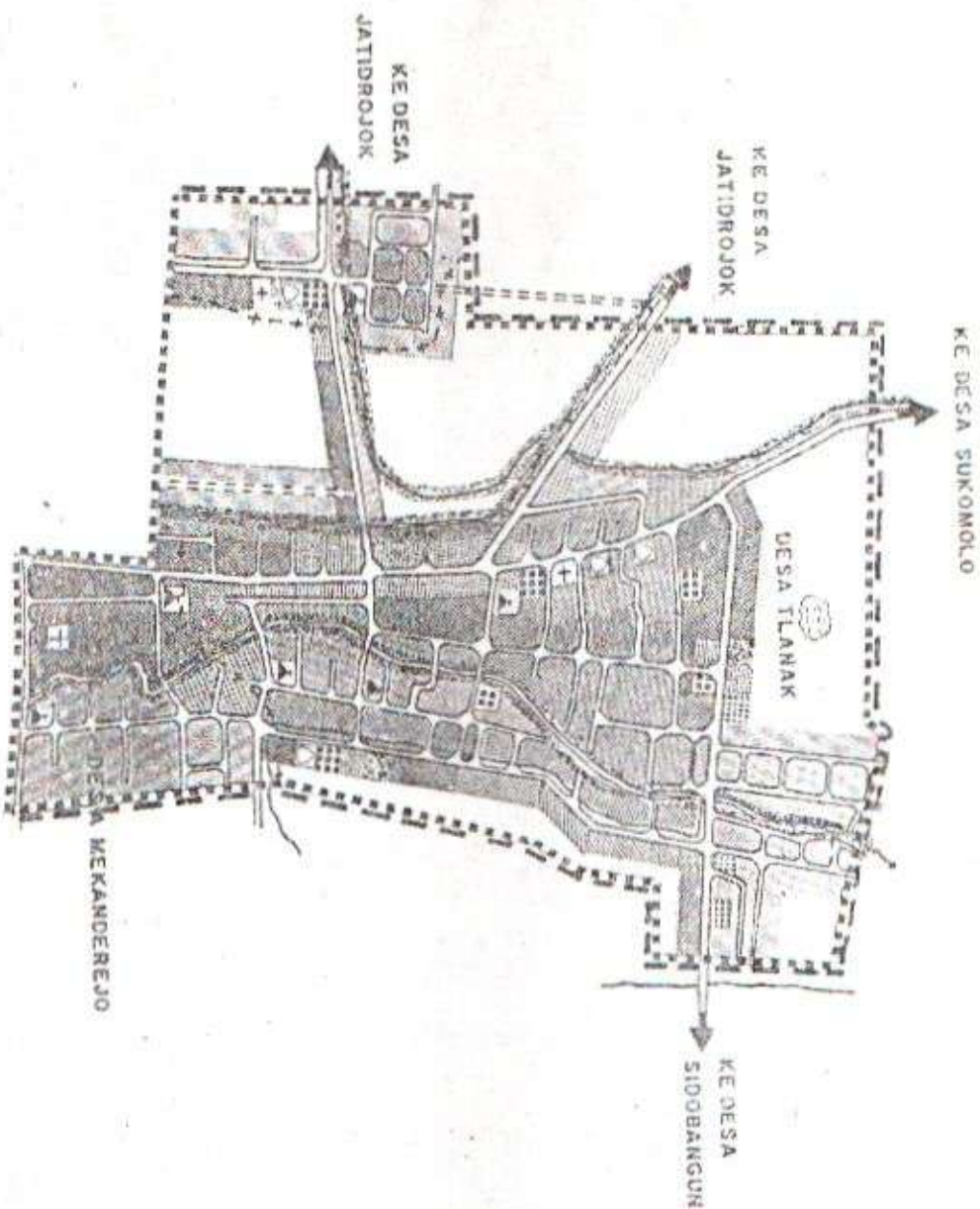
ORGANIZATION : *University of*

СРЕДНАТА : _____

CONCLUSIONS

C
= 1
7
10
20

1:12060



untuk diperbaiki. Jalan-jalan tersebut adalah jalan-jalan yang menghubungkan antara kawasan perumahan dengan kegiatan lainnya, misalnya perdagangan, perkantoran, pusat pelayanan dan sebagainya. Selain itu juga jalan-jalan yang menghubungkan satu lingkungan perumahan ke lingkungan perumahan lainnya.

B. Rencana Pengembangan Fungsi Jalan

Untuk mengoptimalkan peranan jaringan jalan yang ada di kawasan rencana, maka diperlukan pembagian fungsi dari masing-masing jalan yang akan dikembangkan. Hal ini disebabkan masih belum jelasnya fungsi-fungsi jaringan jalan yang ada di kawasan rencana tersebut pada saat ini. Jaringan jalan pada hakekatnya mempunyai peranan masing-masing sesuai dengan fungsinya. Fungsi jalan yang akan direncanakan di Kawasan Rencana terdiri dari klasifikasi sebagai berikut:

- Jalan Primer, meliputi jalan lokal, jalan ini mempunyai fungsi menghubungkan Pusat Pengembangan dengan kota-kota disekitarnya, namun berfungsi pula dalam struktur ruang kawasan rencana sebagai jalan yang menghubungkan antar BKK.
- Jalan Arteri Sekunder, adalah jalan-jalan yang menghubungkan pusat kota dengan pusat BKK, atau pusat BKK dengan Pusat BKK.
- Jalan Kolektor Sekunder, adalah jalan-jalan yang menghubungkan Pusat BKK dengan pusat Unit Lingkungan, atau pusat Unit Lingkungan dengan pusat Unit Lingkungan.
- Jalan Lokal Sekunder, adalah jalan-jalan yang menghubungkan pusat Unit Lingkungan dengan pusat lingkungan, atau pusat lingkungan dengan pusat lingkungan.

Masing-masing fungsi jalan yang akan direncanakan mempunyai ukuran geometrik yang berbeda pula. Untuk mengetahui rencana pengembangan fungsi jalan dan ukuran geometrik jaringan jalan yang akan direncanakan, dapat dilihat pada Gambar IV-9 dan Gambar IV-10 (*Rencana Struktur Jaringan Jalan*).

C. Rencana Pengembangan Sarana Transportasi

Berdasarkan hasil rencana peruntukan lahan di kawasan rencana yang tertuang di dalam RUTK, dan penelaahannya di dalam ROPK yang tertuang dalam rencana penggunaan lahan tahun 2005/2006 adanya rencana sub terminal pada (BKK-A), maka pengembangan sarana transportasi perlu dikembangkan untuk mendukungnya.

Faktor-faktor yang perlu diperlengkapi di dalam pengaturan route lalu lintas adalah:

- Angkutan umum dan rute yang direncanakan dapat mengantisipasi pergerakan penduduk dari pemukiman ke tempat kerja, fasilitas, dan lain sebagainya.
- mengatur agar adanya angkutan umum dalam kota tersebut serta sistem route yang direncanakan agar tidak sempat menjatuhkan adanya kawasan-kawasan yang rawan akan persoalan lalu lintas.

D. Rencana Pengembangan Fasilitas Transportasi

Selain dari pada prasarana dan sarana transportasi yang dikembangkan, beberapa fasilitas lain yang perlu dikembangkan adalah sub terminal dan shelter/halte.

pengembangan sub terminal ini diperlukan untuk pangkalan kendaraan umum baik dari luar kota, antar kota atau dalam kota sendiri, hal ini untuk pelancaran arus transportasi lalu lintas.



PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

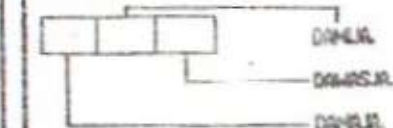
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN 1995/1996 - 2005/2006

PETA RENCANA
STRUKTUR JARINGAN JALAN
BWK-A

KETERANGAN :

- BATAS KOTA
- - - - - BATAS DESA
- ===== JARINGAN JALAN
- +—+—+— REL KERETA API
- ~~~~~ SUNGAI
- ▲ MADUK

- ===== JALAN ARTERIAL SEKUNDER /
LOKAL PRIMER
- ===== JALAN LOKAL PRIMER
- ===== JALAN KOLEKTOR SEKUNDER
- ===== JALAN LOKAL SEKUNDER
- ===== ALTERNATIF JALAN DARU



SUMBER : HASIL RENCANA



DAMBA : 4-9

DIGAMBAR : *Prabu*

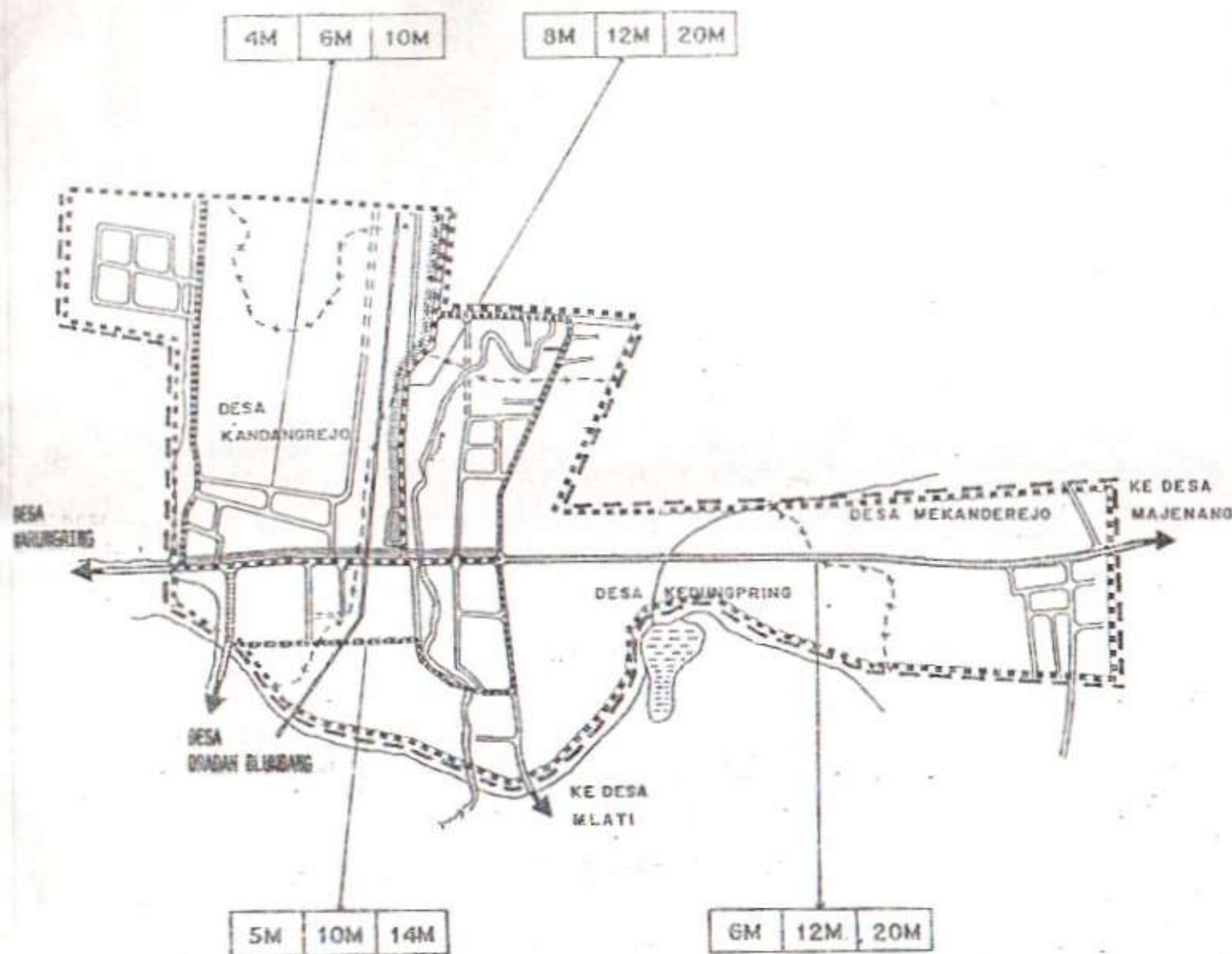
DIPERIKSA :

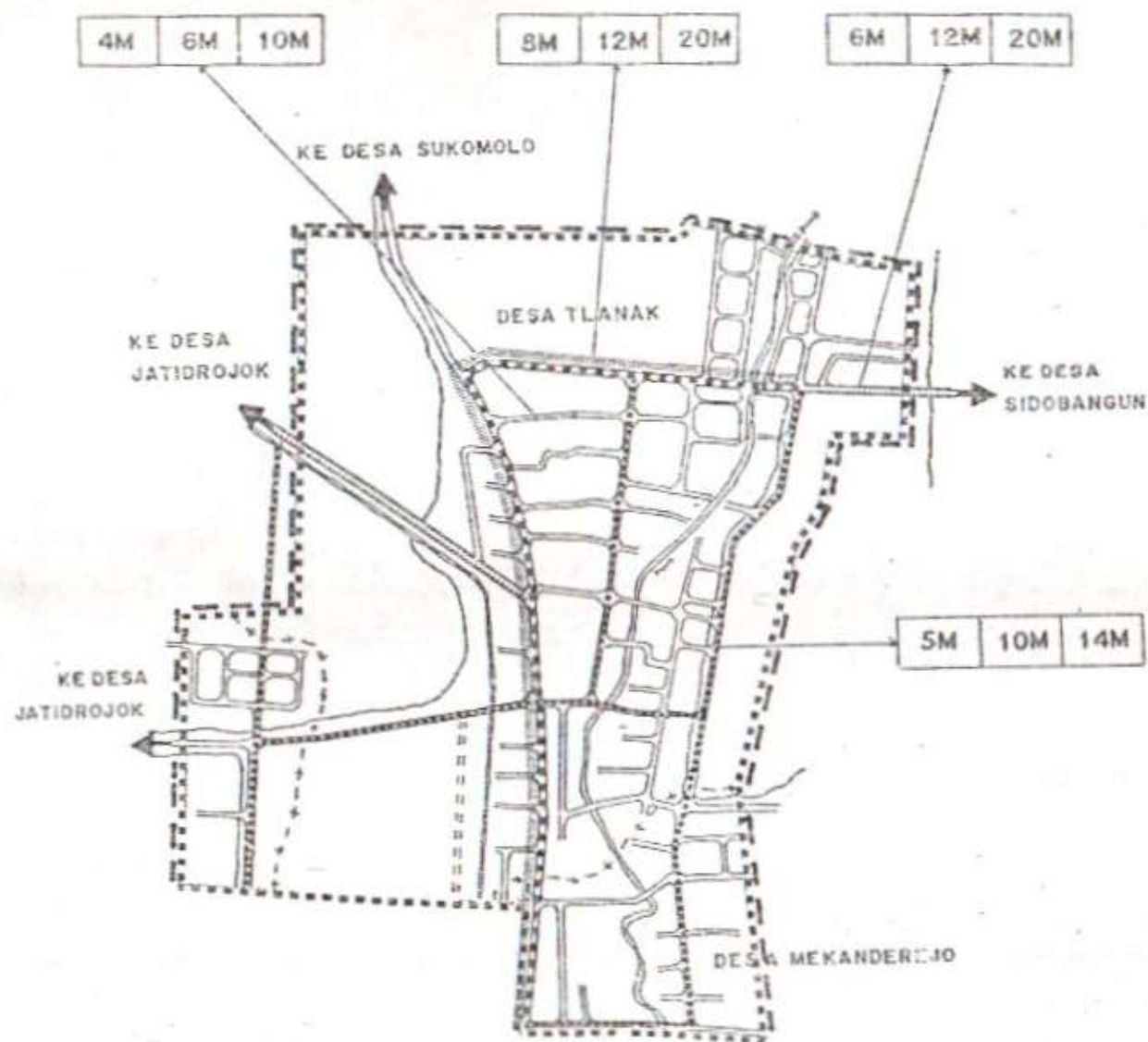


UTARA

SKALA

1:13000





PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN 1995/1996 - 2005/2006

PETA RENCANA
STRUKTUR JARINGAN JALAN
BWK-B

KETERANGAN :

- KATAS KOTA
- - - - - BATAS DESA
- ===== JARINGAN JALAN
- REL KERETA API
- ~~~~~ SUNGAI
- ▲ WADUK

- ===== JALAN ARTERI SEKUNDER /
LOKAL PRIMER
- JALAN LOKAL PRIMER
- JALAN KOLEKTOR SEKUNDER
- JALAN LOKAL SEKUNDER
- ALTERNATIF JALAN BARU

- DAHLIA
- DAWISJAL
- DAHLIA

SUMBER : HASIL RENCANA



GAMBAR : 10

DIGAMBAR : [Signature]

DIPERIKSA :



UTARA

SKALA
1 : 13000

pengembangan Shelter/halte diperlukan agar penumpang angkutan kota/pedesaan yang akan berganti modus angkutannya tidak melakukan kegiatannya di sembarang tempat, melainkan pada tempat-tempat tertentu yaitu shelter/halte.

Alokasi untuk fasilitas ini pada lokasi-lokasi yang dipandang penting, seperti Pusat kota, pusat pemerintahan dan pusat kegiatan yang lainnya.

E. Fasilitas Jalan

Untuk mencapai fungsi jalan yang optimal (aman, nyaman, menyenangkan) diperlukan fasilitas/komponen jalan yang pada hakekatnya merupakan bagian dari unsur landsekap kota. Komponen/fasilitas jalan tersebut direncanakan untuk mencapai manfaat:

- Fungsi keamanan dan kenyamanan:

- a. Jalur pejalan kaki
- b. Lampu penerang jalan
- c. Halte Angkutan umum
- d. Rambu Lalu lintas
- e. Tempat penyebrangan
- f. Gardu Polisi
- g. Fire Hidrant.

- Fungsi Pelengkap :

- a. Box telepon
- b. bis surat
- c. Tempat sampah
- d. Tempat duduk
- e. Bak tanaman

f. Pompa bensin

h. Papan Reklame.

4.3.5 Rencana Sistem Utilitas

Sistem Utilitas Kota di setiap Bagian Wilayah Kota yang akan direncanakan meliputi rencana jaringan air minum, penyaluran air kotor/buangan, rencana jaringan listrik, telepon, dan Pengelolaan Sampah.

Didalam perencanaan sistem utilitas ini tentunya tidak akan terlepas dari sistem utilitas kota Kedungpring secara keseluruhan.

A. Rencana Sistem Jaringan Air Bersih

Di dalam pengembangan dan pembangunan utilitas air bersih di kawasan rencana terutama ditujukan untuk keperluan:

1. Rumah tangga (kebutuhan domestik) yaitu kebutuhan rumah tangga untuk keperluan mandi, masak, minum dan mencuci.
2. Kebutuhan non domestik, yaitu kebutuhan di luar rumah tangga terutama untuk berbagai aktivitas seperti:
 - Perkantoran
 - Fasilitas-fasilitas dan aktivitas perkantoran, dan
 - Keperluan pemadam kebakaran.

Sejalan dengan perkembangan Kota IKK Kedungpring dan dikaitkan dengan fungsi masing-masing SWK yang direncanakan, maka peningkatan pelayanan air bersih mutlak dilakukan. Sistem pendistribusian air bersih yang dikelola oleh PDAM masih belum

Keseluruhan kawasan rencana, sehingga perlu pengembangan untuk melayani kebutuhan air bersih di seluruh bagian wilayah kota.

Perencanaan peningkatan jaringan air bersih tidak terlepas dari berbagai pembatas, dan yang perlu diperhatikan adalah:

1. Faktor Teknis, dikaitkan dengan kondisi topografi kota.
2. Faktor Finansial, dikaitkan dengan pengkajian investasi dan nilai tambah yang didapat.
3. Faktor Kemampuan Ekonomi Daerah.
4. Koordinasi antar instansi terkait.

Dengan memperhatikan pembatas dan dikaitkan dengan fungsi masing-masing BWK yang ada, maka rencana pengembangan jaringan air bersih beserta tingkat pelayanannya adalah sebagai berikut:

BWK-A.

Mengingat fungsi BWK-A sebagai kawasan pusat kota, di mana sebagian besar kegiatan kota terpusat di wilayah ini, maka ketersediaan utilitas air bersih yang mencukupi mutlak diperlukan. Pelayanan air bersih untuk BWK-A pada saat ini belum mencukupi kebutuhan dalam segi kuantitatif maupun daerah pelayanannya, untuk itu perlu penambahan jaringan pipa untuk menaah daerah pelayanan.

Cara pelayanan air bersih akan didominasi oleh cara sambungan langsung tetapi tidak tertutup kemungkinan pelayanan dengan kran-kran umum untuk kawasan padat dan kawasan kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

BWK-B.

Fungsi BWK-B yang direncanakan sebagai kawasan perumahan, di mana pada saat ini masih belum keseluruhan dijangkau fasilitas pelayanan air bersih. Sedangkan kawasan perumahan yang ada di BWK ini didalam kebutuhan air bersihnya sebagian diperoleh dari sumber Air Sumur dan Pompa.

Untuk mempersiapkan kawasan ini sebagai areal pengembangan perumahan sesuai dengan fungsi wilayah yang direncanakan, maka di BWK ini perlu dipersiapkan pelayanan air bersih dengan membangun jaringan distribusi baru. Pelayanan dilakukan dengan sambungan langsung dan tidak menutup kemungkinan dengan kran umum untuk kawasan perumahan dengan tingkat kepadatan tinggi.

Pengembangan sistem distribusi Air bersih di kota Inx kedurpring dan setiap Bagian Wilayah Kota khususnya, perlu dilengkapi dengan alat pelengkap dengan memperhatikan/memasang unit-unit pelengkap pada jaringan pipa distribusi air bersih dan pembenahan jaringan pipa sesuai dengan fungsinya masing-masing. Misalnya, Pipa Induk (Pipa Transmisi) untuk menghantarkan air dari lokasi sumber air ke titik akhir sebelum digunakan.

- Pipa Distribusi (Pipa Cabang) untuk menghantarkan air dari titik akhir pipa Transmisi menuju titik pembagi pada konsumen.
- Pipa Service untuk menghantarkan air dari pipa Distribusi menuju sambungan halaman rumah (meteran).
- Pipa Percil untuk menghantarkan air dari pipa service menuju kran-kran air untuk pemakaian sehari-hari.

Adapun Unit-unit Pelengkap Pipa Distribusi yang dibutuhkan

antara lain:

1. Valve, berfungsi untuk mengatur tekanan dan mengontrol aliran

air. Pemasangannya dilakukan pada setiap cabang pipa, pada

tempat-tempat yang tinggi dalam jaringan pipa ditempatkan se-

belum air vent valve, pada jalur pipa yang relatif datar de-

ngan jarak setiap 1-3 km, pada tempat-tempat rendah ditempatkan

kan sebelum blow off.

2. Air Vent Valve, berfungsi untuk mengeluarkan udara dalam pipa

dan memasukkan tekanan udara bila tekanan dalam pipa menjadi

negatif. Pemasangannya pada tempat-tempat tertinggi dalam ja-

lur pipa.

3. Blow off, berfungsi untuk mengeluarkan air bila sedang mem-

perbaiki pipa. Pemasangannya pada tempat-tempat terendah dari

jalur pipa.

4. Fire Hydrant, berfungsi untuk menyediakan air bila terjadi

kebakaran.

5. Mainhoie, berfungsi untuk memudahkan pemasangan, pemeriksaan/

pemeliharaan dan perbaikan pipa. Pemasangannya pada setiap

jarak 300-500 m jalur pipa.

6. Anker Blok, berfungsi bila jalur pipa yang buntu atau pada

saat arah aliran pipa berganti atau diameter pipa berubah.

Untuk mengetahui rencana jaringan air bersih tiap RW di

kota Kedungpring tahun 2005/2006, lihat pada Gambar IV-11 dan

Gambar IV-12 (Rencana Jaringan Air Bersih).

B. Rencana Penyaluran Air Buangan

Rencana penyaluran air buangan meliputi penyaluran air bu-

kas (limbah), dan penyaluran timbunan air hujan (drainase).

A. Rencana penyaluran air hujan (Drainase)

Dilihat dari kondisi topografi kota, pematusan air hujan se-

cara alami perlu mendapat perhatian, namun demikian pengon-

duksi air hujan perlu dilakukan dengan pertimbangan:

1. Aliran air deras akan dapat merusak bangunan-bangunan yang

dilalui, seperti jalan, dan bangunan lainnya.

2. Mengingat di kawasan rencana terdapat saluran yang cukup

dapat diandalkan, maka penyaluran dan pembuangannya diru-

mpkan diarahkan pada titik-titik pembuangan (out let)

yang bermuara di saluran yang ada.

3. Pengadaan saluran drainase yang baik akan meningkatkan ke-

lestika kota dan kesehatan masyarakat.

Wilayah kota yang diprioritaskan untuk pengadaan saluran

drainase adalah RW-A. Kebijaksanaan ini diambil mengingat

pada wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah dengan intensi-

stas kegiatan yang relatif besar dibandingkan dengan wilayah

RW-3.

Saluran Drainase dapat dibuat di kiri dan kanan jalan, dan

dapat merupakan saluran terbuka dan tertutup yang aliran air-

nya menuju ke saluran pembuangan secara gravitasi.

Syarat-syarat pembuatan Saluran Drainase yang direncanakan

antara lain:



PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN 1955/1956 - 2005/2005

PETA RENCANA
JARINGAN AIR BERSIH
BWK-A

NEUROSCIENCE

- EATAS EOTA
EATAS CESA
JANISCA NOLM
NEL TERTIA CPT
TUMOR
MAJOR
- JANISCA TUMORS
JANISCA DISTRICTS

SPECT-HS-A POLYMER



UTAH

SMOLA
1:13000



PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
KOTA KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHAP 1995/1996 - 2005/2006

PETA RENCANA
JARINGAN AIR BERSIH
BWK-B

PETERANGAN :

- BATAS KOTA
- - - - BATAS DESA
- ===== JALURAN JALAN
- TEL. KAWAHI
- ~~~~~~ SUNGAI
- ▲ WADUK
- [---] JARINGAN TRANSISI
- [---] JARINGAN DISTRIBUSI

SUMBER : HASIL RENCANA



GAMBAR : N - 12
DOKUMEN :
DIPERIKSA :



UTARA

SKALA
1 : 13000



1. Pembuatan saluran harus lebih rendah dari badan jalan, agar air dapat mengalir dengan lancar dari arah samping kiri dan kanan jalan.
 2. Saluran mempunyai kriteria kedalaman antara 0,75-1,00 M dengan lebar (garis tengah) antara 0,75-1,50 M.
 3. Saluran harus dijaga jangan sampai tersumbat oleh sampah yaitu dengan cara membersihkan secara rutin dan adanya disiplin diri untuk tidak membuang sampah pada saluran.
- Pemilihan saluran terbuka dan tertutup tergantung dari situasi dan kondisi kawasan, misalnya untuk kawasan perkotaan padat dan saluran harus memotong jalan, maka saluran yang digunakan sebaiknya saluran tertutup.
- Untuk mengetahui rencana jaringan drainase setiap bagian wilayah kota, lihat pada Gambar IV-13 dan Gambar IV-14 (*Rencana Jaringan Drainase*).
- h. *Rencana penyaluran air bekas.*
- Sistem Pengelolaan air bekas (limbah) terdiri dari bermacam-macam antara lain:
1. Sistem Cemplung dengan bak terbuka.
 2. Sistem Septic Tank dengan bidang resapan
 3. Sistem Jaringan Air kotor tanpa pengolahan.
 4. Sistem Jaringan Air kotor dengan pengolahan.
- Adapun Keuntungan dan Kerugian masing-masing sistem tersebut di atas dapat dilihat pada Tabel 4.3-6. Untuk mengetahui kriteria pemilihan sistem yang dipergunakan berdasarkan air tanah yang ada, dapat dilihat pada Tabel 4.3-7.

Sistem Pengolahan Air Kotor dengan menggunakan Septic Tank dapat dilaksanakan dengan cara individu atau kelompok/ kolektif yaitu dengan membuat satu buah bangunan septic tank untuk 4, lima atau 20 orang. Untuk kawasan permukiman padat terutama sekitar pusat kota yang tidak mempunyai lahan terbuka dapat digunakan sistem Saluran Air Kotor Tanpa Pengolahan.

TABEL: 4.3-6

KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN SISTEM PENOLAHAN AIR LIMBAH

No	Keuntungan	Kerugian
1.	-memenuhi estetika lingkungan -tidak membutuhkan pengolahan -ekonomis -tidak perlu pengurasan	-volume yang ditampung terbatas -perlu kontrol muka air -memerlukan biaya waktu pemakain
2.	-memenuhi estetika lingkungan -tidak membutuhkan pengolahan -ekonomis -tidak membutuhkan lahan luas	-volume yang ditampung terbatas -perlu kontrol muka air -memerlukan pengolahan -air kotor terbatas hasil kakus saja
3.	-memenuhi estetika lingkungan -tidak membutuhkan pengolahan -ekonomis -tidak waktu pemakaian lebih lama	-perlu kontrol muka air -memerlukan pengolahan -air kotor terbatas hasil kakus saja -memerlukan lahan agak luas untuk pengolahan
4.	-memenuhi estetika lingkungan -tidak membutuhkan lahan -tidak perlu pengurasan -volume air kotor tidak terbatas dapat direncanakan sampai tahap akhir -biaya operasi murah -tidak mencemari badan air -tidak memerlukan air limbah industri tingkat sedang -hasil akhir dapat digunakan kembali sebagai pupuk atau pakan ternak (ikan)	-memerlukan pengolahan -biaya investasi mahal -memerlukan pengolahan

Sumber : Rencana



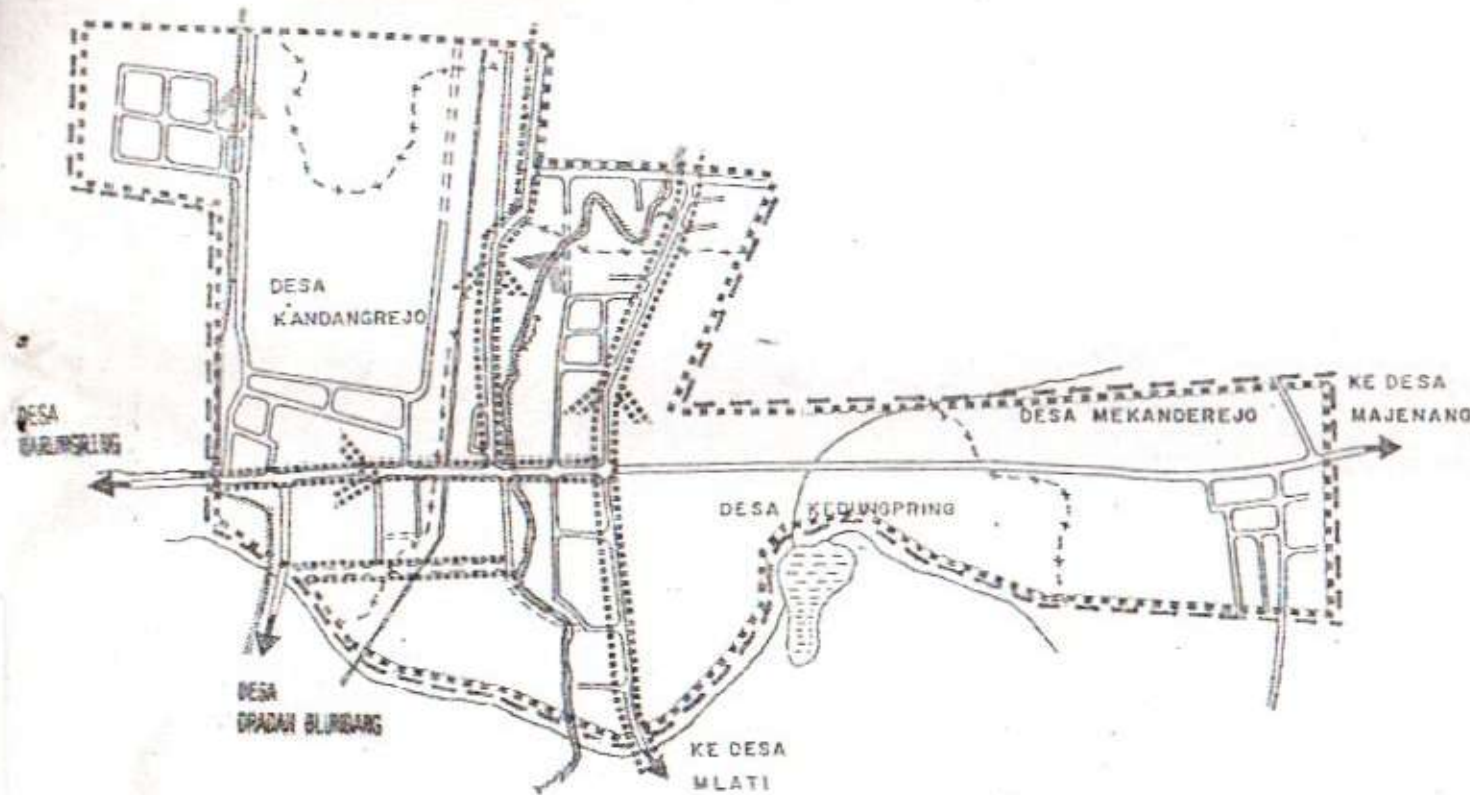
**PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN 1955/1956 - 2005/2006**

**PETA RENCANA
JARINGAN DRAINASE
BWK-A**

PETERANGAN :

- BATAS KOTA
- + - + - BATAS DESA
- ==== JALURAN JALAN
- RIL KERETA API
- ~~~~ SUNGAI
- ▲ WADUK
- ===== SALURAN PRIMER (UTAMA)
- SALURAN SEKUNDER
- ===== SALURAN TERSEKUT



SUMBER : HASIL RENCANA



GAMBAR : IV - 10

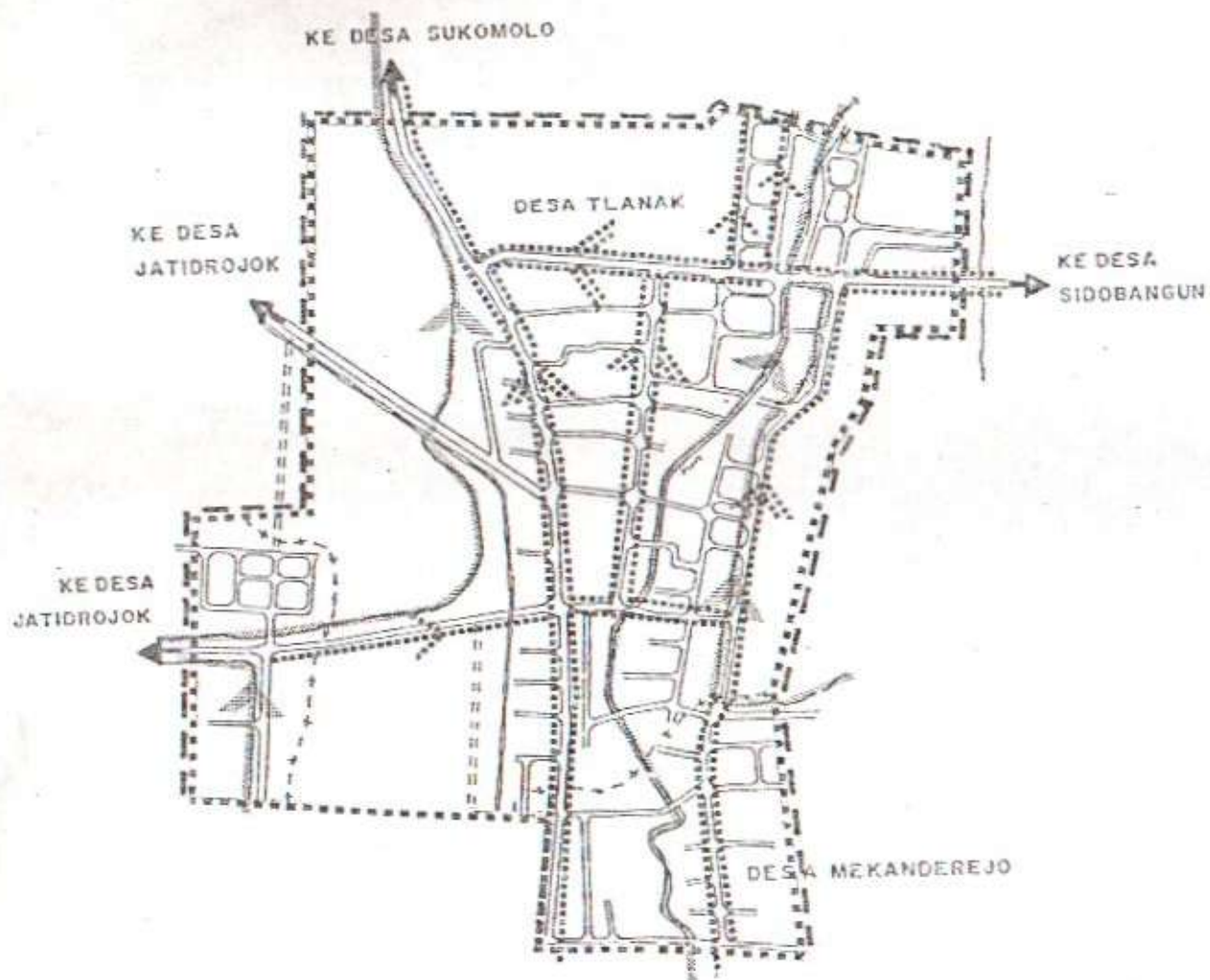
DIGAMBAR :

DIPERIKSA :



UTARA

SKALA
1 : 13000



PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN 1995/1996 - 2005/2006

PETA RENCANA
JARINGAN DRAINASE
DWK-B

KETERANGAN :

- BATAS KOTA
- + - + - BATAS DESA
- ===== JARINGAN JALAN
- RAL KERETA API
- ~~~~~ SUNGAI
- ▲ MADUK

- ===== SALURAN PRIMER (UTAMA)
- SALURAN SEKUNDER
- ===== SALURAN TERSIER

SUMBER : HASIL RENCANA



GAMBAR : N - 14

DIGAMBAR :

DIPERIKSA :



UTARA

SKALA

1 : 13000

TABEL: 4.3-7

KRITERIA PEMILIHAN SISTEM BERDASARKAN KONDISI AIR TANAH

Kondisi Air Tanah	Air Mudah Diperoleh	Air Sulit Diperoleh
Tanah mudah menyerap air	Septik Tank dan bidang resapan	Septik Tank tanpa bidang resapan
Tanah sulit menyerap air	Septik Tang dan bidang resapan	Kakus Kompos

Sumber : Rencana

Pemakaian Sistem Pengolahan Air Kotor perpipaan (Ritoo) lambat laun akan digunakan. Karena adanya pertambahan jumlah penduduk maka akan bertambah pula dengan lahan terbuka yang lambat laun akan beralih fungsi menjadi perumahan sehingga pemakaian sistem Septik Tank tidak mungkin dibuat lagi karena akan mengganggu sumber air (jarak minimal adalah 10 m).

Dengan adanya sistem Penbuangan Air Buangan yang baik dan teratur diharapkan angka kematian dan nifsi kesakitan dapat ditekan lebih rendah.

Air buangan (limbah) yang dihasilkan di kawasan rencana sebagian besar berasal dari rumah tangga yaitu buangan dari WC, dapur serta air buangan dari kamar cuci.

Dengan kondisi air tanah relatif tinggi pengembangan sistem septic tank dan cubluk dapat diterapkan. Septic tank yang dibuat dapat dipakai secara perorangan maupun bersama-sama (komunal) dan ukurannya dapat disesuaikan dengan pelayanannya.

Mengingat penggunaan septic tank memerlukan lahan yang cukup terutama untuk bidang resapan dan tangki itu sendiri, maka bagi daerah yang padat pembangunannya dilakukan melalui sistem perorangan terlebih dahulu kemudian baru dialihkan ke sistem septic tank komunal.

Agar sistem pembuangan ini berfungsi dengan baik maka secara periodik yaitu 2 sampai 3 tahun sekali, harus diadakan dari tangki septic tank harus dikeluarkan.

C. Rencana pengembangan Jaringan Listrik.

Berdasarkan kondisi utilitas listrik yang ada di kawasan rencana yang telah mampu melayani kebutuhan daya listrik bagi penduduk, maka rencana pengembangan jaringan listrik ini diarahkan kepada:

- Pengembangan jaringan baru seiring dengan pengembangan kawasan pemukiman yang direncanakan.
- Peningkatan pelayanan terhadap kebutuhan daya bagi penerangan jalan, khususnya jalan-jalan pada lingkungan perumahan.

Arahan pengembangan utilitas listrik di kawasan rencana terdiri dari:

- Sumber Daya: Sumber daya yang direncanakan diperoleh dari PLN dengan pertim-bangan relatif stabil, namun disarankan bagi kegiatan yang membutuhkan daya besar untuk menggunakan sumber dari swasta.
- Sistem Distribusi: Sistem distribusi jaringan listrik dengan menggunakan Saluran Udara dengan Tiang Beton untuk kawasan mixed use, sedangkan

untuk kawasan baru sangat disarankan untuk menggunakan

jaringan kabel tanah apabila memungkinkan.

Pengembangan jaringan listrik untuk tiap bagian wilayah kota, dapat dilihat pada Gambar IV-15 dan Gambar IV-16 (Rencana

Jaringan Listrik).

D. Pengembangan Jaringan Telekomunikasi.

Pengembangan pelayanan telekomunikasi telepon diutamakan

terutama untuk kegiatan pemerintahan, perdagangan, jasa dan ke-

giatan lain dengan intensitas tinggi, karena intensitas komu-

kasiya dengan kegiatan lain relatif tinggi.

Rencana pola pelayanan jaringan telepon pada dasarnya ter-

gantung pada peningkatan permintaan sambungan. Dengan demikian

pelaksanaan pembangunan jaringan telepon perlu adanya koordinasi

dengan pihak Perumtel. Dengan adanya perkembangan penduduk, maka

kebutuhan akan adanya utilitas telekomunikasi tentunya sangat

dibutuhkan. Apabila Satuan Sambungan (SS) terbatas, tentunya pe-

ngadaan telepon umum (Wartel/Box Telepon) sangat membantu ke-

butuhan masyarakat untuk hubungan telekomunikasi.

Arahan lokasi-lokasi yang diperlukan bagi pengadaan Wartel

adalah tiap RW minimal diperlukan sebuah Wartel, sedangkan

setiap unit lingkungan membutuhkan sebuah Box Telepon umum.

Untuk mengetahui rencana pengembangan jaringan telepon selisat

bagian wilayah kota, dapat dilihat pada Gambar IV-17 dan Gambar

IV-18 (Rencana Jaringan Telepon).

E. Rencana Sistem Pengelolaan Sampah.

Sampah adalah suatu produk/ hasil dari kegiatan manusia dan alam yang tanpa pengolahan tertentu menjadi tidak berguna dan dapat menurunkan tingkat kesehatan lingkungan. Sampah ter-

diri dari antara lain:

1. Menurut Fasa : - sampah cair (limbah)

- sampah padat

- sampah gas dan campurannya (asap, debu)

2. Menurut Komposisi Organik dan An-Organik:

- sampah organik

- sampah an-organik

- sampah organik dan an-organik

3. Menurut Sifat Penguraian dari Mikroorganisme:

- gerbage (mudah terurai)

- rubbish (sulit terurai)

4. Menurut Sifat Bakar:

- combustible (mudah terbakar)

- non combustible (sulit terbakar)

5. Menurut Sifat Pecah:

- putrescible (mudah pecah)

- non putrescible (sulit pecah)

Sampah yang akan dibahas di sini adalah sampah padat. Sam-

pah padat adalah bahan buangan bukan cairan yang dihasilkan dari

aktivitas domestik, sosial, komersial dan industri.



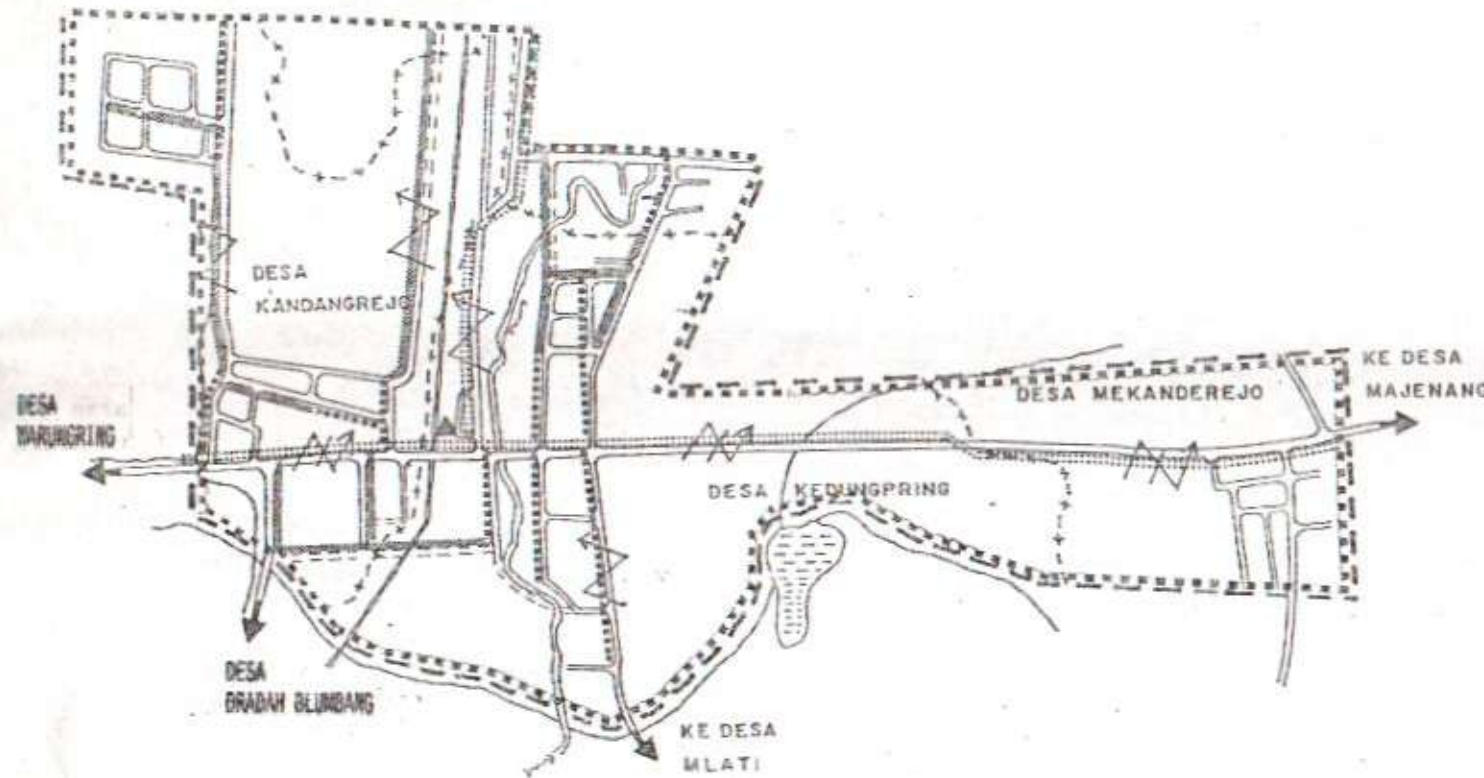
PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN 1995/1996 - 2005/2006

PETA RENCANA
JARINGAN LISTRIK
BWK-A

KETERANGAN :

- BATAS KOTA
- - - - - BATAS DESA
- ===== JALURAN JALAN
- KERETA API
- ~ ~ ~ SUNGAI
- WADUK
- SALURAN UDARA TEGANGAN MENENGAH (SUTR)
- SALURAN UDARA TEGANGAN RENDAH (SUTR) YANG ADA
- RENCANA PENGEMBANGAN SUTR



SUMBER : HASIL RENCANA



GAMBAR : N - 15 E

DIGAMBAR :

DIPERIKSA :



UTAJA

SKALA
1 : 13000



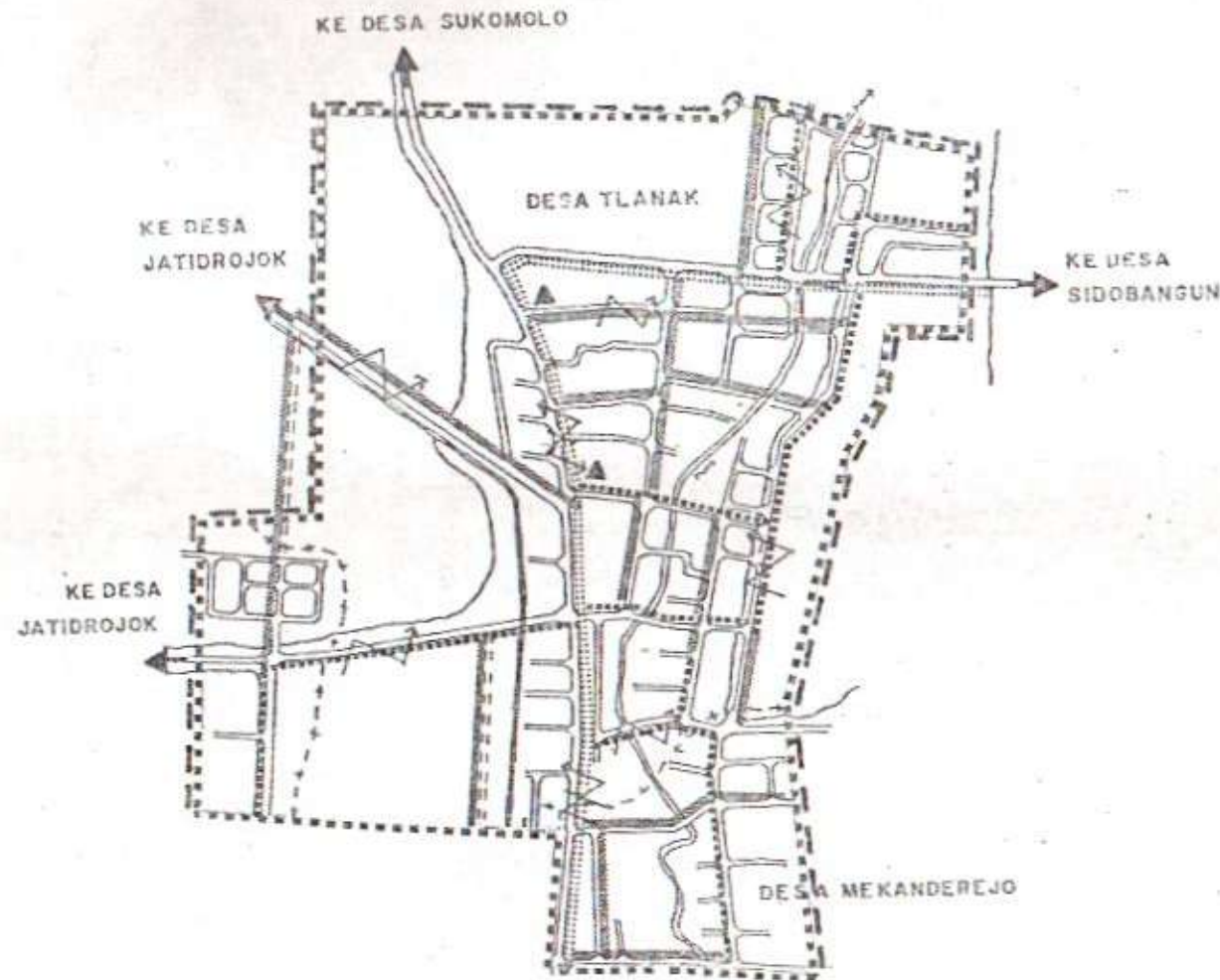
PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN 1995/1996 - 2005/2006

PETA RENCANA
JARINGAN LISTRIK
BWK-P

KETERANGAN:

- BATAS KOTA
- + - + - BATAS DESA
- ===== JALINAN JALAN
- REL KERETA API
- ~~~~~ SUNGAI
- ▲ MADUK
- SALURAN UDARA TEGANGAN MENENGAH (SUTM)
- SALURAN UDARA TEGANGAN RENDAH (SUTR) YANG ADA
- RENCANA PENGEMBANGAN SUTR



SUMBER: HASIL RENCANA



GAMBAR : 01 - 16

DIGAMBAR :

DIPERIKSA :



UTARA

SKALA

1:13000

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
- RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHAP 1955/1956 - 2005/2006

PETA PENCANA
JARINGAN TELEPON
BWA-A

KEITH A. L. GAN :

- BATAS KOTA
- + - + - BATAS DESA
 JERAMBAH DULAH
 PEL. KEKATA API
 SUNGAI
 MUNCUR
- JAWABAN TELEPON YANG BUKA
PELOMBAI PENGET. BERSEKUTUAN
JAWABAN TELEPON
- MERTIL.
- CENTRAL RURAL AREA

SUBJECT: HUSB. PENICILLIN



GAMBAR :	M - 1272
DIGAMBAR :	
DITERIMA :	



SKALA
1:130000



**PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IDUKOTA KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN 1995/1996 - 2005/2006

**PETA RENCANA
JARINGAN TELEPON
BWK-B**

- LEGENDA**
- BATAS KOTA
 - - - - - BATAS DESA
 - ===== JALINAN JALAN
 - RUL KEDUNGPRING
 - SYAMBA
 - UNDIR
 - ▲ JARINGAN TELEPON YANG RUM
 - JARINGAN POKOK JARINGAN
 - JARINGAN TELEPON
 - WARTIL



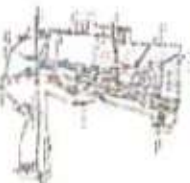
SURBER: HOKI RENCANA

GAMBAR : N - 18 E

DOKUMEN :

DISKUSI :

DISKUSI :



UTARA

SKALA
1 : 12000

Oleh karena pada umumnya sampah padat merupakan sampah bahan organik yang mudah membusuk maka sampah dapat merupakan "The Potential Risk to Health And Environment" (masalah terhadap kesehatan dan lingkungan) baik secara langsung atau tidak langsung.

Masalah terhadap kesehatan:

- Kemungkinan infeksi langsung bagi para pekerja atau pemungut sampah.
- Secara tak langsung dapat merupakan ancaman kesehatan terhadap masyarakat umum, karena berkembangnya bakteri penyakit yang dibawa oleh jalar, tikus dan lain-lain.

Masalah terhadap lingkungan:

- dari segi estetika memberikan kesan buruk dan kesan kurang bersihnya kota karena sampah berserakan dimana-mana.
 - leachet, pengotoran air permukaan atau air tanah oleh air kotor yang berasal dari sampah yang meresap kedalam tanah.
 - Udara, bau yang tidak enak dan dari hasil pembakaran sampah yang tidak sempurna.
 - Ancaman terhadap urusana lainnya, misalnya pengotoran atau pendangkalan saluran air hujan (drainase).
- Sistem Pengolahan Sampah terdiri dari:
- Sistem persampahan di Kota IKK Kedungpring pada umumnya dan kawasan rencana pada khususnya yang sampai saat ini masih belum ada penanganan khusus dari suatu lembaga atau badan khusus yang mengelolanya (Dinas Kebersihan).

Dengan bertambahnya jumlah penduduk maka akan bertambah pula jumlah sampah yang dihasilkan/dikeluarkan. Oleh karena maka diperlukan suatu sistem pembuangan sampah yang teratur dan terencana dengan baik. Yang meliputi dari sistem pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan akhir, sehingga diharapkan kemungkinan negatif yang ditimbulkan pencemaran sampah dapat diatasi.

Kedudukan-kedudukan utama dalam sistem pengolahan sampah yang teratur dan terencana dengan baik adalah:

1. Tempat penampungan sampah di rumah-rumah, pertokoan, pasar dan lain-lain (storage).
2. Gerobak tangan (handcart).
3. Tempat penampungan/pembuangan sampah sementara (transfer station).
4. Truk pengangkut sampah.
5. Tempat pembuangan sampah akhir (lokasi, teknik pengolahan).

Pengelolaan sampah yang sekarang masih dilakukan secara perorangan sudah harus diarahkan untuk di kelola secara terpadu oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, SWP II dan Kecamatan Kedungpring. Dengan memperhatikan keterbatasan kemampuan operasional dinas kebersihan yang mungkin dihadapi, maka pengelolaan sampah di Kota IKK Kedungpring ini dapat dilakukan oleh organisasi masyarakat (LKMD, RT, RW dan lainnya).

Tempat pembuangan akhir (TPA) untuk Kota Kedungpring diarahkan jadi satu dengan TPA Babat (di luar Wilayah kota).

Operasi pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga/dinas yang menangani kebersihan meliputi:

1. Pengumpulan, yaitu pengumpulan sampah dari sumber timbunannya dan ditampung di tempat penampungan sementara atau langsung ke kendaraan pengangkut sampah pada jam-jam tertentu. Operasi ini menuntut partisipasi masyarakat mengingat kondisi topografi di kawasan rencana relatif datar, maka penggunaan Gerobak Sampah dengan partisipasi masyarakat akan memudahkan pengelolaannya.
2. Pengangkutan, yaitu operasi pengangkutan sampah dari tempat pengumpulan sementara atau sumbernya ke tempat pembuangan akhir. Pengangkutan dilakukan dengan Truk pengangkut sampah yang dilengkapi penutup.
3. Pembuangan Akhir, yaitu pembuangan sampah pada lokasi pembuangan akhir dengan atau tanpa pengolahan.

Untuk mengetahui jaringan pengelolaan sampah tiap bagian wilayah kota, jalsnya dapat dilihat pada Gambar IV-19 dan Gambar IV-20 (*Rencana Sistem Pembuangan Sampah*).

4.3.6 Rencana Pengaturan Bangunan.

Rencana pengaturan bangunan ini didasari atas kebijaksanaan tentang intensitas penggunaan ruang pada masing-masing penggunaan lahan di setiap Bagian Wilayah Kota.

Rencana ini akan meliputi rencana rencana Koefisien Dasar Bangunan (KDB), ketinggian dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)).

A. Rencana Koefisien Dasar Bangunan (KDB).

Rencana Koefisien Dasar Bangunan dilandasi oleh kemampuan lahan dan pedoman penentuan KDB yang disesuaikan dengan

penggunaan bangunan dimana lokasi bangunan berada, yaitu semakin tinggi nilai lahan semakin tinggi pula intensitas pemanfaatan ruang yang ditentukan. Semakin komersial jenis kegiatannya maka akan menuntut efisiensi pemanfaatan ruangnya harus dipertinggi. Agar tidak terjadi efisiensi pemanfaatan ruang yang berlebihan, maka perlu pengendalian pemanfaatan ruang, dalam hal ini salah satu diantaranya dengan mengatur KDB.

Berdasarkan hal tersebut, maka penentuan KDB untuk masing-masing penggunaan lahan di setiap RWK pada Tabel 4.3-8.

B. Rencana Ketinggian Bangunan .

Dalam RDTK Kota IKK Kedungpring ini Rencana Ketinggian Bangunan yang diperbolehkan digunakan pula sebagai salah satu indikator didalam pengendali intensitas pemanfaatan ruang. Satuan tinggi bangunan yang digunakan dalam rencana ini adalah jumlah lantai. Semakin tinggi atau semakin banyak lantai dari suatu bangunan, maka semakin tinggi pula pemanfaatan ruangnya. Penentuan tinggi bangunan dibatasi oleh kemampuan lahan, fungsi lahan, dan faktor estetika lingkungan.

Arahan rencana ketinggian bangunan di kawasan rencana, dapat dilihat pada Tabel 4.3-9.



PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN KEDUNGPRING
Tahun 1985/1986 - 2005/2006

PETA RENCANA
SISTEM PEMBUANGAN SAMPAH
BWK-A

KETERANGAN :

--- BATAS KOTA

- - - BATAS DESA

— JALURAN JALAN

— SALURAN AIR

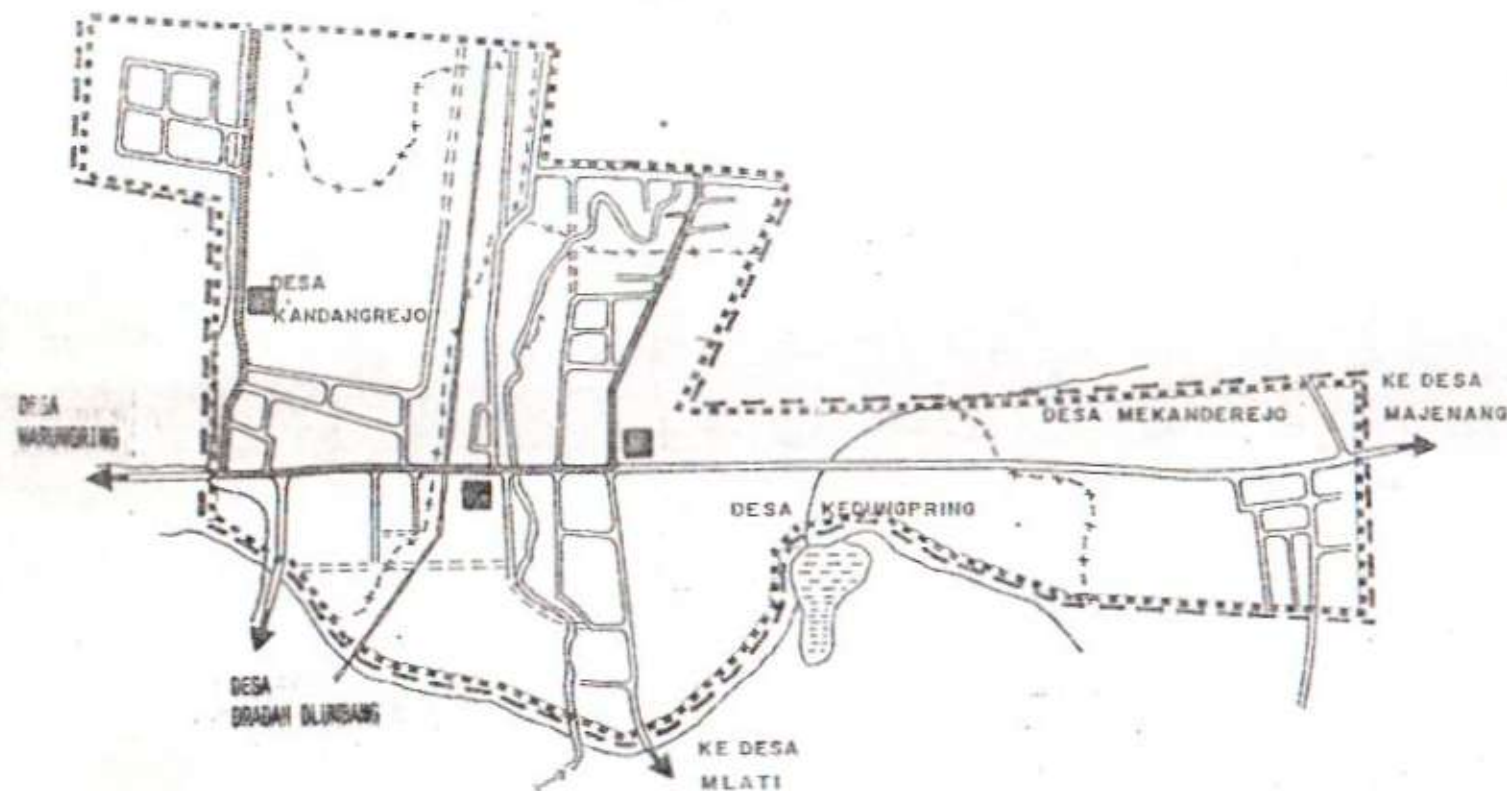
— SUNGAI

— WADUK

ROUTE PEMBUANGAN SAMPAH

TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH SEMENTARA (TPS)

TPA JADI SATU DENGAN BABAT



SUMBER : HASIL RENCANA



GAMBAR : N-13

DIGAMBAR :

DIPERIKSA :



UTARA

SKALA

1:13000



PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN 1995/1996 - 2005/2006

PETA RENCANA
SISTEM PEMBUANGAN SAMPAH
BWK-B

SUMBER : HASIL RENCANA



DIMASUK : 30 - 35 - 40

DIGAMBAR :

DIPERIKSA :



UTARA

SKALA

1:13000

TABEL 4.3-8-

RENCANA KOEFISIEN DASAR BANGUNAN KOTA KEDUNGPRING, 2005/2006

BWK/Unit Lingkungan	Indus- tri/gu- dang	KDB pada Penggunaan Lahan				
		Perd- angan & Jasa	Perkan- toran	Fasi- titas Umum	Peru- mahan	Taman/ Lap. OR Rekr.
BWK A/PK	0,4-0,6	0,6-0,8	0,4-0,7	0,4-0,6	0,5-0,7	< 0,2
UL-1		0,6-0,8	0,4-0,7	0,4-0,6	0,5-0,7	< 0,2
UL-2		0,5-0,7	0,4-0,7	0,4-0,6	0,5-0,7	< 0,2
UL-3		0,5-0,7	0,4-0,7	0,4-0,6	0,5-0,7	< 0,2
BWK B		0,5-0,7	0,4-0,6	0,4-0,6	0,5-0,7	< 0,2
UL-1		0,5-0,7	0,4-0,6	0,4-0,6	0,5-0,7	< 0,2
UL-2		0,4-0,7	0,4-0,6	0,4-0,6	0,5-0,7	< 0,2
UL-3		0,5-0,7	0,4-0,6	0,4-0,6	0,5-0,7	< 0,2

Sumber: Penetapan Rencana

TABEL 4.3-9

RENCANA KETINGGIAN BANGUNAN KOTA KEDUNGPRING, 2005/2006

BWK/Unit Lingkungan	Indus- tri/gu- dang	Ketinggian Bangunan (Lantai)				
		Perd- angan & Jasa	Perkan- toran	Fasi- titas Umum	Peru- mahan	Taman/ Lap. OR Rekr.
BWK A/PK	1	1 - 3	1 - 3	1 - 2	1 - 2	1
UL-1		1 - 3	1 - 3	1 - 2	1 - 2	
UL-2		1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	
UL-3		1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	
BWK B		1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	
UL-1		1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	
UL-2		1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	
UL-3		1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	

Sumber : Penetapan Rencana
Catatan : Tinggi bangunan diukur dari lantai dasar sampai dengan bangunan tertinggi (puncak atap), dengan perincian sebagai berikut :
- Tinggi 1 lantai = ± 7 meter
- Tinggi 2 lantai = ± 13 meter
- Tinggi 3 lantai = ± 15 meter

8. Rencana Koefisien Lantai Bangunan.

Selain Koefisien Dasar Bangunan dan ketinggian bangunan, koefisien lain yang dapat juga digunakan sebagai indikator dan pengendali intensitas pemanfaatan ruang adalah koefisien lantai bangunan (KLB), yaitu perbandingan luas lantai yang dibangun di suatu lahan tertentu terhadap luas lahan itu sendiri. KLB yang ditunjukkan dari suatu wilayah merupakan pengendali luas lantai dari satu bangunan, terutama di wilayah dengan intensitas kegiatan tinggi, seperti kawasan perdagangan, jasa komersial, dan perkantoran. Penentuan KLB dari suatu wilayah/kawasan didasarkan oleh fungsi lahan, KDB, ketinggian bangunan, dan estetika lingkungan. Biasanya KLB di tiap BWK dapat dilihat pada Tabel 4.3-10

TABEL 4.3-10

RENCANA KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN KOTA KEDUNGPRING, 2005/2006

BWK/ UL	Indus- tri/gu- dang	KLB pada Penggunaan Lahan				
		Perd- angan & Jasa	Perkan- toran	Fasi- titas Umum	Peru- mahan	Taman/ Lap. OR Rekr.
BWK A/	0,4-0,6	0,6-2,0	0,4-1,8	0,4-1,0	0,5-1,2	< 0,2
UL-1		0,5-2,0	0,4-1,6	0,4-1,0	0,5-1,2	< 0,2
UL-2		0,5-1,2	0,4-1,2	0,4-1,0	0,5-1,2	< 0,2
UL-3		0,5-1,2	0,4-0,6	0,4-0,6	0,4-1,0	< 0,2
BWK B		0,5-1,2	0,4-1,2	0,4-0,6	0,5-1,2	< 0,2
UL-1		0,5-1,2	0,4-1,2	0,4-0,6	0,5-1,2	< 0,2
UL-2	0,4-0,6	0,5-1,2	0,4-0,6	0,4-0,6	0,4-1,0	< 0,2
UL-3		0,5-1,2	0,4-0,6	0,4-0,6	0,4-1,0	< 0,2

Sumber: Penetapan Rencana

Untuk memperjelas pengaturan KDB, ketinggian dan KLB di Kota IKK Kedungpring pada tahun 2005/2006, dapat dilihat pada Gambar IV-21 dan gambar IV-22 (*Rencana Pengaturan bangunan*).

C. Rencana Pengaturan Garis Sempadan.

Adanya pengaturan sempadan bangunan ditujukan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang tertib dan teratur diseluruh wilayah kota. Disamping itu pengaturan sempadan bangunan ini menyangkut terciptanya keindahan, kenyamanan dan keamanan dengan lancarnya sirkulasi udara dan cahaya, serta terjaganya keamanan lingkungan (misalnya dari bahaya kebakaran yang merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya).
Pengaturan sempadan ini meliputi:

- pengaturan sempadan pagar, sempadan pagar yang lebarnya ditentukan dari As Jalan sampai dengan pagar bangunan (Damaja).
- pengaturan sempadan saluran, sempadan saluran yang lebarnya ditentukan dari As Jalan sampai dengan saluran (Damaja).
- Pengaturan sempadan tritis ditentukan dari As Jalan sampai dengan Tritis Bangunan (Dawaja).

Berdasarkan fungsi jalan yang ada di kawasan rencana, maka arahan penentuan garis sempadan yang disarankan di kawasan rencana dapat dilihat pada Tabel 4.3-11

Berdasarkan ketentuan diatas maka dapat ditentukan aturan sempadan bangunan (jarak antara pagar dengan tembok bangunan) untuk seluruh jenis kelompok bangunan fasilitas pada masing-masing unit lingkungan. Pengaturan sempadan bangunan tersebut

meliputi sempadan bangunan muka, sempadan bangunan samping dan sempadan bangunan belakang, dalam tabel 4.3-12.

TABEL 4.3-11 KETENTUAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN MINIMUM

No.	Kelompok Jalan	Dawaja (m)	Damaja (m)	Dawaja (m)
1.	Ateri: sekunder/tp	8	12	20
2.	Kolektor sekunder	5	10	14
3.	Lokal primer	6	12	20
4.	Lokal sekunder	4	6	10

Sumber : Penetapan

TABEL 4.3-12

PENGATURAN SEMPADAN BANGUNAN (TERBUKA)
WILAYAH KOTA KEDUNGPRING TAHUN 2005/2006

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Sempadan Muka (m)	Sempadan Belakang (m)	Sempadan Samping (m)
1.	Perumahan	2	8	1,5
2.	Pendidikan	10	12	6
3.	Kesehatan	8	10	5
4.	Peribadatan	4	20	2
5.	Perdagangan/Jasa	1	8	3
6.	Parkantoran	1	20	4
7.	Industri/Gudang	20	30	15

Sumber: Hasil Rencana



**PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
PENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN 1995/1996 - 2005/2006

**PETA RENCANA
PENGATURAN BANGUNAN
BWK-A**

KETERANGAN :

- BATAS KOTA
- - - - - BATAS DESA
- JALINAN ULAN
- REL KERETA API
- ~~~~~ SUNGAI
- ~~~~~ WADUK
- ***** BATAS UNIT LINGKUNGAN

SUMBER : HASIL REKONSTRUKSI



GAMBAR : IV - 21

DIGAMBAR :

DUPLIKASI :



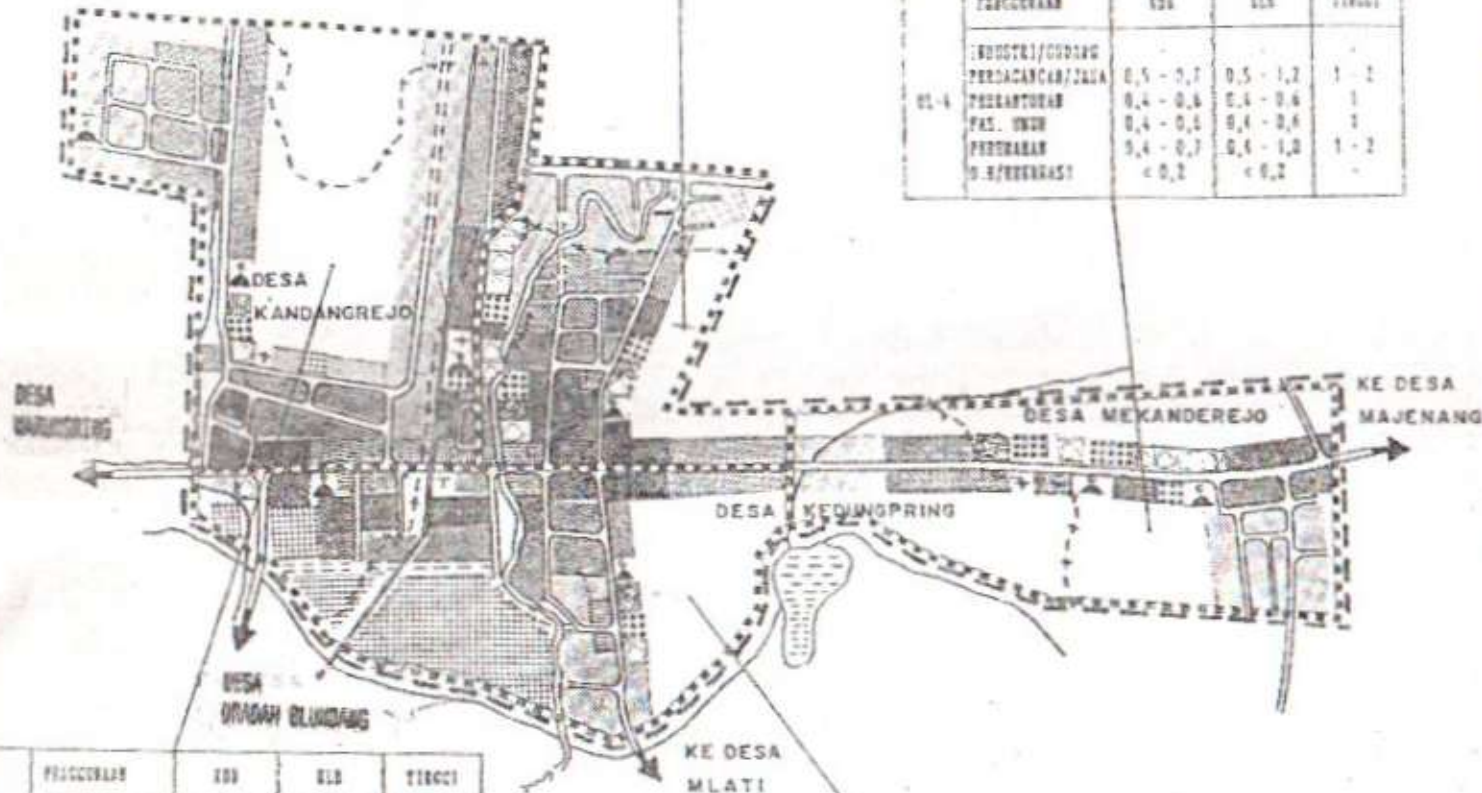
UTARA

SKALA

1:15000

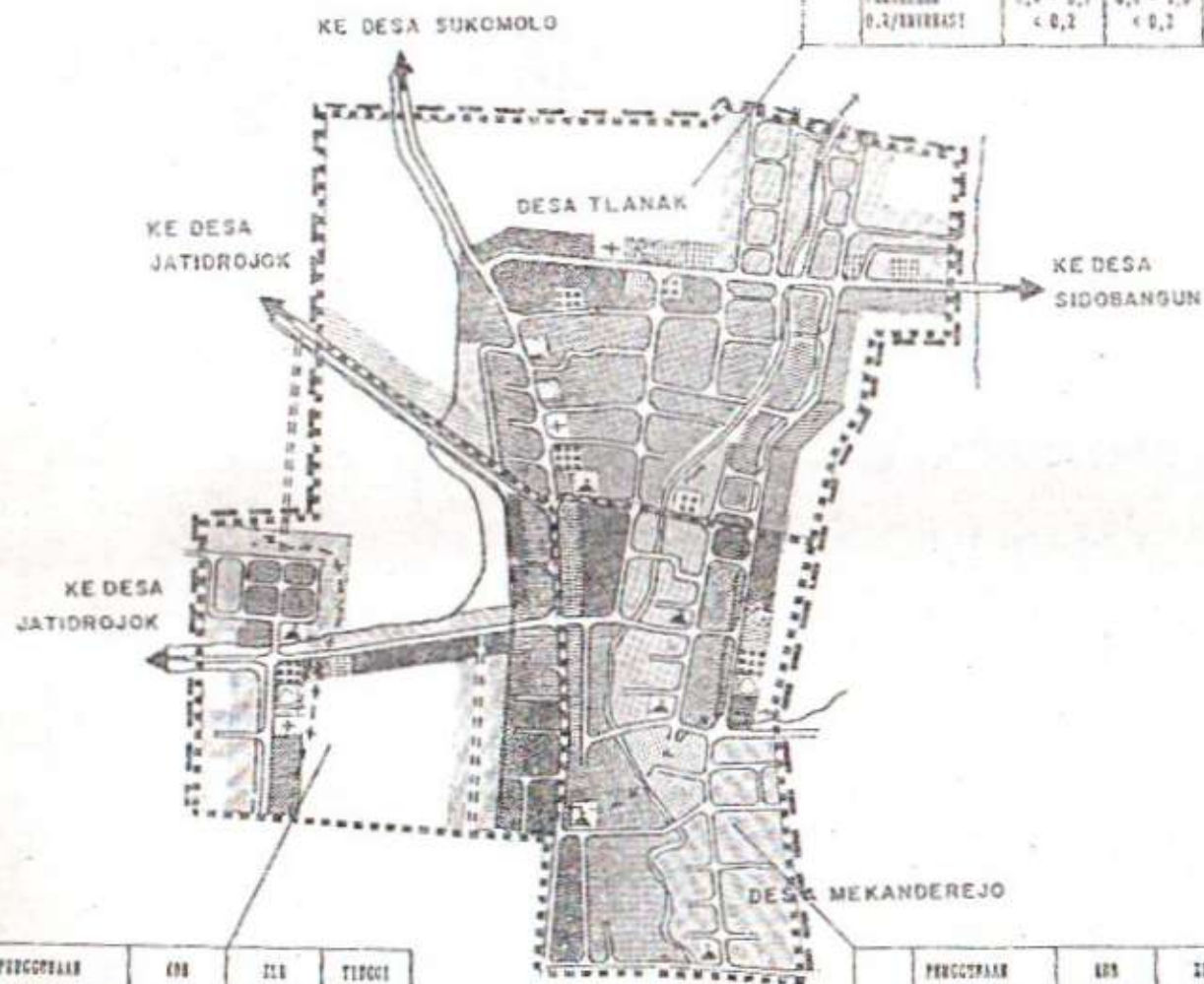
	PERGUNAAN	ESB	ELB	TINGGI
UL-2	INDUSTRI/CIDRANG	-	-	-
	PERDAGANGAN/JASA	0,6 - 0,8	0,6 - 1,0	1 - 1
	PERKANTORAN	0,4 - 0,7	0,4 - 1,6	1 - 1
	PAS. UMUM	0,4 - 0,6	0,4 - 1,0	1 - 2
	PERUMAHAN	0,5 - 0,7	0,5 - 1,2	1 - 2
	O.S./REKREASI	< 0,4	< 0,4	1

	PERGUNAAN	ESB	ELB	TINGGI
UL-4	INDUSTRI/CIDRANG	-	-	-
	PERDAGANGAN/JASA	0,5 - 0,7	0,5 - 1,2	1 - 2
	PERKANTORAN	0,4 - 0,6	0,4 - 0,6	1
	PAS. UMUM	0,4 - 0,6	0,4 - 0,6	1
	PERUMAHAN	0,4 - 0,7	0,4 - 1,0	1 - 2
	O.S./REKREASI	< 0,2	< 0,2	-



	PERGUNAAN	ESB	ELB	TINGGI
UL-3	INDUSTRI/CIDRANG	0,4 - 0,6	0,4 - 0,6	1
	PERDAGANGAN/JASA	0,5 - 0,7	0,5 - 1,2	1 - 2
	PERKANTORAN	0,4 - 0,7	0,4 - 1,2	1 - 2
	PAS. UMUM	0,4 - 0,6	0,4 - 1,0	1 - 2
	PERUMAHAN	0,5 - 0,7	0,5 - 1,0	1 - 2
	O.S./REKREASI	< 0,2	< 0,2	1

	PERGUNAAN	ESB	ELB	TINGGI
UL-1	INDUSTRI/CIDRANG	0,4 - 0,6	0,4 - 0,6	1
	PERDAGANGAN/JASA	0,6 - 0,8	0,6 - 1,0	1 - 3
	PERKANTORAN	0,4 - 0,7	0,4 - 1,6	1 - 3
	PAS. UMUM	0,4 - 0,6	0,4 - 1,0	1 - 2
	PERUMAHAN	0,5 - 0,7	0,5 - 1,2	1 - 2
	O.S./REKREASI	< 0,2	< 0,2	-



PENGUNTAH	SD	SLD	TIRGCI
INDUSTRI/CORANG	0,4 - 0,6	0,4 - 0,6	1
PERDAGANGAN/JASA	0,4 - 0,7	0,5 - 1,2	1 - 2
PURKANTORAN	0,4 - 0,6	0,4 - 0,6	1
PAS. DUK	0,4 - 0,6	0,4 - 0,6	1
PERUMAHAN	0,4 - 0,7	0,4 - 1,0	1 - 2
G.R./REKREASI	< 0,2	< 0,2	1

PENGUNTAH	SD	SLD	TIRGCI
INDUSTRI/CORANG	-	-	-
PERDAGANGAN/JASA	0,4 - 0,7	0,5 - 1,2	1 - 2
PURKANTORAN	0,4 - 0,6	0,4 - 0,6	1
PAS. DUK	0,4 - 0,6	0,4 - 0,6	1
PERUMAHAN	0,4 - 0,7	0,4 - 1,0	1 - 2
G.R./REKREASI	< 0,2	< 0,2	1

PENGUNTAH	SD	SLD	TIRGCI
INDUSTRI/CORANG	-	-	-
PERDAGANGAN/JASA	0,4 - 0,7	0,5 - 1,2	1 - 2
PURKANTORAN	0,4 - 0,6	0,4 - 0,6	1 - 2
PAS. DUK	0,4 - 0,6	0,4 - 0,6	1
PERUMAHAN	0,4 - 0,7	0,5 - 1,0	1 - 2
G.R./REKREASI	< 0,2	< 0,2	1



PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN 1995/1996 - 2005/2006

PETA RENCANA
PENGATURAN BANGUNAN
BWK-B

KETERANGAN :

- BATAS KOTA
- BATAS DESA
- JALAN
- REL KERETA API
- SUNGAI
- WADUK
- BATAS UNIT LINGKUNGAN

SUMBER : HASIL RENCANA



GAMBAR : IV - 22

DIGAMBAR :

DIPERIKSA :



UTARA

SKALA
1:13000

BAB V

ASPEK PENGELOLAAN PEMBANGUNAN
KOTA IKK KEDUNGPRING

5.1. Tahapan dan Prioritas Pembangunan.

Tahapan dan prioritas pembangunan di Kota Kedungpring dimaksudkan untuk mengurangi hambatan perkembangan kota yang diakibatkan oleh kurangnya sektor produktif dan sektor konsumtif yang diperlukan kota Kedungpring. Program pembangunan tersebut tidak dapat dilakukan sekaligus, tapi harus bertahap mengingat anggaran bagi pembangunan kota yang terbatas, dalam hal ini kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan. Oleh karena itu prioritas pembangunan harus dilaksanakan. Prioritas diarahkan pada sektor yang memberikan multiplier effect (efek ganda) terbesar terhadap faktor-faktor lainnya. Untuk itu dibuat daftar prioritas pembangunan untuk jangka waktu sampai dengan tahun 2005/2006. Daftar prioritas tersebut didekati dengan metode pembobotan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.1-1.

TABEL : 5.1 - 1

KRITERIA PENENTUAN BOBOT KEPENTINGAN
PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

NO	P R O G R A M	TINGKAT KEPENTINGAN	BOBOT
1	Pengaturan lokasi pusat perdagangan regional + perdagangan di pusat kota	- Perdagangan dan perdagangan terdapat di pusat kota, letaknya menyebar dan belum diklasifikasi - Perdagangan dan perdagangan terdapat di pusat kota, serta letaknya sudah diklasifikasi dengan baik	5 3
2	Pengaturan Pasar	- Perdagangan dan perdagangan banyak terdapat disebelah pusat kota serta letaknya sudah diklasifikasi dengan baik - Kondisi pasar tidak baik, dan lokasinya sudah tepat - Kondisi pasar baik, dan lokasinya tepat	1 3 1
3	Peningkatan prasarana Pendidikan dan Pengaturan SD, SLP, dan SLTA	- Jumlah TK, SD, SLP, dan SLTA yang tersedia (40-80%) dari kebutuhan tetapi lokasinya belum tepat - Jumlah TK, SD, SLP, dan SLTA yang tersedia [20-60%] dari kebutuhan tetapi lokasinya sudah tepat	5 1

Lanjutan tabel 5.1 - 1

NO	P R O G R A M	TINGKAT KEPENTINGAN	BOBOT
4	Pengaturan lokasi Kantor Pemerintahan	- Kantor pemerintahan letaknya menyebar dan letaknya belum terlokasi dengan baik - Kantor pemerintahan letaknya tersebar dan tidak hanya terdapat di pusat kota, tetapi lokasinya belum tepat - Kantor pemerintahan terdapat di pusat kota dan lokasinya sudah baik	5 3 3
5	Peningkatan pengadaan serta Pengaturan alokasi prasarana pelayanan Sosial.	- Prasarana pelayanan sosial kurang sekali kondisi tidak baik dan lokasi tidak tepat - Prasarana pelayanan sosial kurang tetapi kondisi cukup baik dan lokasi tidak tepat - Prasarana pelayanan sosial sudah cukup dan baik kondisinya, juga lokasinya	5 3 1
6	Pengadaan Perumahan	- Perumahan kurang sekali dibandingkan dengan kebutuhan dan kondisinya kurang baik - Perumahan kurang sekali dibandingkan dengan kebutuhan dan kondisinya baik - Perumahan yang ada kurang dibandingkan kebutuhan dan kondisinya baik - Perumahan sudah mencukupi dan kondisinya sudah baik	5 4 3 1

Lanjutan tabel 5.1 - 1

NO	P R O G R A M	TINGKAT KEGIATAN	ROBOT
7	Pemugaran dan Perbaikan Lingkungan Permukiman	- Lingkungan perumahan belum baik dan perlu perbaikan dan partisipasi masyarakat sangat baik dalam perbaikan kampung. - Lingkungan perumahan sudah baik dan perlu perbaikan dan partisipasi masyarakat terbatas pada kelompoknya - Lingkungan perumahan sudah dan partisipasi masyarakat sangat baik dalam perbaikan kampung.	5 3 1
8	Penyediaan dan Meleengkan Fasilitas Umum bagi Wilayah Perumahan baru sebagai Faktor pengikat	- Fasilitas umum disetiap permukiman kurang, dan kondisinya tidak baik, dan letaknya tidak tepat - Fasilitas umum disetiap permukiman kurang, perlu penambahan, dan kondisinya tidak baik dan letaknya tidak tepat - Fasilitas umum disetiap permukiman dan perlu perbaikan, tetapi letaknya tidak tepat - Fasilitas umum disetiap permukiman sudah cukup, dan kondisinya baik, dan letaknya sudah tepat.	1 2 3 4 5

Lanjutan tabel 5.1 - 1

NO	P R O G R A M	TINGKAT KEPENINGKAN	ROBOT
9	Peningkatan Fasilitas dan utilitas	- Fasilitas dan utilitas kurang sehat dan kondisinya kurang baik. - Fasilitas dan utilitas belum mencukupi, tetapi juga kurang baik. - Fasilitas dan utilitas belum mencukupi, tetapi kondisinya baik. - Fasilitas dan utilitas sudah mencukupi, tetapi kondisinya belum baik. - Fasilitas dan utilitas sudah mencukupi, kebutuhan dan disinya belum baik.	5 4 3 2 1
10	Pembuatan jaringan jalan untuk menampung arus lalu lintas.	- Kepadatan lalu lintas semakin meningkat dan aksesibilitasnya menurun. - Kepadatan lalu lintas regional meningkat dan aksesibilitasnya baik. - Kepadatan lalu lintas regional tetap dan aksesibilitasnya baik.	5 3 1
11	Peningkatan jaringan jalan lokal dan peningkatan aksesibilitas antara fungsi kegiatan di dalam kota	- Jalan belum teraspal dan kondisinya kurang baik. - Jalan belum semuanya beraspal dan kondisinya baik. - Jalan beraspal dan kondisinya baik.	5 3 1

Lanjutan tabel 5.1 - 1

NO	PROGRAM	TINGKAT KEPENTINGAN	BOBOT
12	Pengalokasian Sub terminal Angkutan	- Terminal tidak teralokasi dan kondisinya kurang baik - Terminal tidak teralokasi tetapi kondisinya baik dan akses baik - Terminal sudah teralokasi dengan baik, kondisi baik, serta akses baik	5 3 1
13	Peningkatan aksesibilitas lalu lintas antar bagian wilayah kota	- Ke arah pusat kota lalu lintas semakin padat dan aksesibilitasnya semakin tetap baik. - Ke arah pusat kota lalu lintas belum terlalu padat dan aksesibilitas tetap baik.	3 1
14	Pengadaan taman-taman kota.	- Bagian wilayah kota yang belum mempunyai lahan terbuka. - Bagian wilayah kota yang sudah mempunyai lahan terbuka. - Bagian wilayah kota yang sudah mempunyai lahan terbuka dan lokasinya sudah benar	5 3 1
15	Pengembangan Industri perdagangan	- Industri non polutif, teknologi cukup modern, menggunakan bahan setengah jadi menjadi bahan jadi dan menyerap tenaga kerja lokal - Industri non polutif, teknologi cukup modern, menggunakan bahan setengah jadi, perlu kualitas tenaga kerja - Industri mengolah bahan menjadi bahan setengah jadi dan jadi	5 3 1

TABEL : 5.1 - 2

PENENTUAN BOBOT PROGRAM PEMBANGUNAN

NO	PROGRAM/PROGAM PEMBANGUNAN	A	B	C
1	Pengaturan pusat perdagangan	5	5	10
2	Pemugaran dan Pengalokasian Pasar	5	5	10
3	Peningkatan prasarana pendidikan dan pengajaran tingkat SD, SLT, SLA.	3	5	8
4	Pengaturan "Jarak" antar kecamatan.	3	5	8
5	Peningkatan pengadaan serta pengaturan alokasi prasarana pelayanan sosial.	5	3	8
6	Pengadaan perumahan	5	3	8
7	Pemugaran dan perbaikan lingkungan perumahan	5	5	10
8	Mengadakan dan melengkapi fasilitas umum bagi wilayah pemukiman	5	3	8
9	Peningkatan fasilitas dan utilitas.	5	5	10
10	Peningkatan jaringan jalan	5	5	10
11	Pembangunan Sub Terminal	5	5	10
12	Peningkatan jalan-jalan lokal dan peningkatan aksesibilitas antara fungsi-fungsi kegiatan di dalam kota.	3	5	8
13	Peningkatan aksesibilitas antar bagian wilayah kota	5	5	10
14	Pengadaan taman-taman kota.	5	3	8
15	Industri/Perdagangan	5	3	8
16	Pengembangan Daerah lingkungan	5	2	7

Keterangan : A = Tingkat Kepentingan

B = Efek Ganda

C = Jumlah

Sumber : Hasil Analisis

TABEL : 5.1 - 3

URUTAN PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN

PRIORITAS	PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN	BOBOT
I	- Pemugaran dan perbaikan lingkungan perumahan di daerah pusat kota. - Peningkatan fasilitas dan utilitas - Pembuatan jaringan jalan. - Peningkatan jalan-jalan lokal dan peningkatan aksesibilitas antar fungsi-fungsi kegiatan di dalam kota - Pembangunan Sub Terminal - Peningkatan aksesibilitas antar bagian wilayah kota - Pengaturan lokasi pusat perdagangan regional - Pemugaran dan Pertokoan Utama - Pengadaan perumahan	10 10 10 10 10 10 10 10 8
II	- Peningkatan prasarana pendidikan dan pengajaran lokasi SD, STK serta pengadaan SLTA - Menyediakan dan melengkapi fasilitas umum kawasan perumahan yang ada sebagai faktor pengikat - Peningkatan pengadaan serta pengaturan alokasi prasarana pelayanan sosial - Pengembangan, pengadaan serta pengaturan alokasi industri dan perdagangan - Peningkatan jalan-jalan lokal dan peningkatan aksesibilitas antar bagian wilayah kota - Penyediaan taman-taman kota - Pengaturan kantor pemerintahan - Pengawasan dampak lingkungan	8 8 8 8 8 8 8 8 8

Sumber : Hasil Pengolahan

Dari urutan prioritas tersebut, maka ditentukan tahap-tahap pembangunannya adalah sebagai berikut :

a. Tahap Pelaksanaan Pembangunan 1 (Tahun 1995/1996 - 1996/1999)

- Pemugaran dan perbaikan lingkungan perumahan di daerah Pusat kota.
- Peningkatan fasilitas dan utilitas

- Pembuatan dan pengembangan jaringan jalan.

- Peningkatan jalan-jalan lokal dan peningkatan aksesibilitas antara fungsi-fungsi kegiatan di dalam kota

- Pembangunan Sub Terminal

- Peningkatan aksesibilitas antar bagian wilayah kota

- Pengaturan lokasi pusat perdagangan regional

- Pemugaran Pusat Perdagangan

- Pengadaan perumahan

b. Tahap Pelaksanaan Pembangunan 2 (Tahun 1999/2000 - 2003/2004)

- Peningkatan prasarana pendidikan dan pengaturan lokasi SD, STK.

- Menyediakan dan melengkapi fasilitas umum kawasan perumahan yang ada sebagai faktor pengikat.

- Peningkatan pengadaan serta pengaturan alokasi prasarana pelayanan sosial

- Pengembangan, pengadaan serta pengaturan alokasi industri dan perdagangan

- Peningkatan jalan-jalan lokal dan peningkatan aksesibilitas antar bagian wilayah kota

- Penyediaan taman-taman kota

- Pengaturan kantor pemerintahan

c. Tahap Pelaksanaan Pembangunan 3 (Tahun 2004/2005 - 2005/2009)

- Melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan.
- Evaluasi.

5.2. Arah Penanganan Lingkungan.

Untuk mencapai suatu lingkungan kehidupan kota yang aman,

nyaman dan menyenangkan didalam proses kehidupan kota, maka

diperlukan beberapa arahan penanganan lingkungannya.

Rencana arahan penanganan lingkungan ini sangat berkaitan

dengan kualitas penduduk di kawasan rencana, adapun arahnya

adalah :

- Kawasan Pusat Kegiatan Kota (BKK - A) :

1. Penataan lingkungan kegiatan utama kota

2. Penataan lingkungan pusat perdagangan utama

3. Penataan dan pengaturan kawasan pendidikan

4. Penataan dan pengaturan kawasan pertanian

5. Penataan lingkungan industri dan perdagangan

6. Penataan lingkungan pemukiman

7. Penataan ruang terbuka hijau

8. Penataan kawasan sub terminal

9. Sirkulasi dan Manajemen lalu lintas

- Kawasan Bagian Wilayah Kota B

1. Penataan Ruang Terbuka hijau

2. Penataan lingkungan permukiman

3. Manajemen lalu lintas

Didalam penataan lingkungan ini diperlukan peran serta dan

kesiapan dari berbagai pihak, antara lain :

1. Kesiapan dan kemampuan aparat pengelola pembangunan kota un-

tuk konsekuen dan berpedoman terhadap Rencana Tata Ruang yang

telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Daerah

tingkat II Lamongan.

2. Dengan kesiapan dan kemampuan aparat pengelola pembangunan

kota terhadap aplikasi rencana Tata Ruang yang telah disusun

dan ditetapkan maka kondisi lingkungan kota yang habitabel

dapat tercapai.

3. Rencana Tata Ruang kota yang telah diwujudkan disebarkan

kepada masyarakat, sehingga keterbukaan rencana dapat terca-

pai sesuai dengan keterbukaan Rencana Untuk Umum.

4. Dengan rencana yang diketahui oleh berbagai lapisan masyarakat,

maka didalam implementasi rencana yang menuntut berpi-

dahan hak atas tanah untuk kepentingan pembangunan dapat

tercapai dan dapat dimengerti oleh semua pihak yang terlibat.

5. Peran serta masyarakat kota rencana sangat diperlukan untuk

menjaga lingkungan sesuai dengan harapan semua pihak.

5.3. Indikasi Program dan Proyek serta Pendanaan

Dalam indikasi program dan proyek yang telah dirumuskan

tersebut, maka diperlukan adanya aspek pembiayaan pembangunan

dalam pelaksanaan suatu rencana. Oleh karenanya, untuk setiap

program pembangunan perlu dirumuskan sumber-sumber pembiayaan-

nya, baik yang menyangkut perencanaan detail maupun dalam pelak-

sanaan pembangunan fasilitas, prasarana dan sarana.

Dengan demikian dapat dipergunakan dalam arahan pengatur-

an dan pengendalian pembangunan. Akan tetapi untuk sampai pada

tahap pelaksanaan pembangunan diperlukan dua tahapan lagi berupa

TABLE 5.3-1

Sumber : HASIL PENGESAHAN...

TAXONOMICAL LEVEL NUMBER	PREFERRED SYNONYM	SYNONYM NUMBER	LOCALITY INFORMATION	
			DATE	TIME
112	— <i>Salicaria</i> (L.) Link. — <i>Salicaria</i> (L.) Link. — <i>Salicaria</i> (L.) Link.	— <i>Salicaria</i> (L.) Link. — <i>Salicaria</i> (L.) Link. — <i>Salicaria</i> (L.) Link.	1961-1-2-3 1961-1-2-3	1961-1-2-3 1961-1-2-3

Sumber : HASIL PENGESAHAN...

5.4. Aspek Kelengkapan Perbaikan

Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dan kewajiban melaksanakan pembangunan-pembangunan di daerah yang bersangkutan, kerja sama dengan pihak swasta dan selalu berusaha untuk mengajak masyarakat agar berpartisipasi. Untuk mengatasi situasi dan kondisi yang menimbulkan tuntutan kebutuhan yang baru, perlu diadakan usaha-usaha penyempurnaan dengan melakukan restrukturisasi, reorganisasi danialisasi, dan relokalisasi. Untuk pengaturan struktur organisasi ditetapkan yang harus dapat diwujudkan apabila struktur itu cukup sederhana dengan perwujudan tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang elastis.

Pembangunan fisik, yaitu merupakan perwujudan dari pembangunan bidang-bidang sosial, ekonomi budaya dan politik yang mempunyai pengaruh langsung pada kondisi sosial ekonomi yang dibutuhkan masyarakat. Untuk itu, pelaksanaan pembangunan fisik seyogyanya mempergunakan potensi kelembagaan yang dimiliki pemerintah daerah secara optimal melalui pengaturan mekanisme kerja antar aparat pembangunan.

Sehubungan dengan upaya pembinaan pembangunan kota, rencana kota yang telah dibuat diharapkan harus dapat dilaksanakan, maka masalah pengorganisasian aparatur pelaksanaan pembangunan di kota Kedungpring khususnya di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan pada umumnya harus mendapatkan perhatian, agar tercapainya tujuan yang telah terumuskan. Hal ini mengingat masalah pembangunan kota/daerah sangat tergantung pada kemampuan organisasi aparatur pelaksanaannya.

5.4.1. Organisasi fungsional otonomi daerah vertikal.

Kota IKK Kedungpring yang merupakan bagian wilayah administratif Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, pengelolaan administrasi dan pembangunan kotanya langsung ditangani dan dibawah koordinasi Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan, sehingga aparatur yang melaksanakan pembangunan kota Lamongan adalah unsur-unsur Pemerintah Kabupaten.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 1973 (Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, Sekretariat Kotamadya/Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II), maka untuk melancarkan pembangunan kota, dalam struktur organisasi fungsional otonom Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan yang telah diperlengkapi oleh sub bagian pengembangan perkotaan pada Bagian Pemerintahan; subbagian penyusunan pelaksanaan program, dan subbagian pengendalian pelaksanaan program pada bagian pembangunan dapat berjalan sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Aparatur yang berhubungan dengan pengelolaan pembangunan kota ini bertugas untuk menangani masalah-masalah perkotaan, yang menyangkut kebersihan, pertamanan, pengamanan bangunan, pengaturan parkir, pengaturan pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sebagainya. Juga tugas utama untuk subbagian pengembangan perkotaan (pasal 11), Subbagian penyusunan pelaksanaan program (pasal 38), dan untuk subbagian Pengendalian Pelaksanaan Program (pasal 39), untuk butir masing-masing tugas tersebut perlu dibentuk adanya forum koordinasi, sehingga pelaksanaan tugas antar lembaga dapat dilakukan dengan baik.

Dinas-dinas otonomi Daerah dan Dinas vertikal Daerah Tingkat II Lamongan, merupakan unsur-unsur yang terlibat langsung didalam pembangunan perkotaan; mengingat Dinas Otonomi Daerah yang bertanggung jawab melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dan melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Daerah, sedangkan dinas vertikal merupakan aparat departemen yang bersangkutan yang diperbantukan kepada Kepala Daerah, selain mempunyai tanggung jawab secara vertikal. Selanjutnya dalam hal pembangunan yang dilaksanakan oleh dinas daerah maupun dinas vertikal, perencanaannya dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

5.4.2. Tata kerja aparatur pelaksana.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan merupakan unsur pemerintah yang mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai Kepala Daerah otonom yang mempunyai penyelenggaraan dan bertanggung

Jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan daerah dan fungsi sebagai Kepala Wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Kepala daerah menurut hirarki bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Dalam melaksanakan fungsinya Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langgam membantu dan Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II Langgam berkoordinasi pada setiap Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi sinkronisasi dan simplifikasi (KISS), secara vertikal dan horizontal. Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat II Langgam bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan yang masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan-nya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Lamongan merupakan unsur stat yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan, dan mempunyai tugas membantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan dalam menentukan kebijaksanaan dibidang perencanaan pembangunan daerahnya serta penilaian atas pelaksanaannya

Dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang tertentu, maka pelaksanaan ditugaskan pada dinas-dinas Daerah Tingkat II Lamongan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan. Selain dinas-dinas yang berada dibawah Pemerintah Daerah Tingkat II

Lamongan, terdapat pula instansi-instansi vertikal. Baik yang berada di lingkungan Departemen Dalam Negeri, Departemen lainnya, maupun lembaga-lembaga pemerintah nondepartemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Daerah Tingkat II Lamongan. Instansi-instansi yang berada di lingkungan Departemen Dalam Negeri secara organisatoris berada dibawah garis komando Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan, sedangkan instansi vertikal yang bukan berada di lingkungan Departemen Dalam Negeri berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Daerah Tingkat I Jawa Timur, tetapi mempunyai garis koordinasi dengan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

Adapun tata kerja dari pada dinas-dinas daerah dan dinas vertikal adalah sebagai berikut :

1. Tata kerja dinas-dinas daerah :

4. Dalam melaksanakan tugasnya antara lain diberikan dan melaksanakan vertikal yang urusannya sejenis wajib diselenggarakan atas dasar hubungan fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.

c. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Daerah Tingkat II Lamongan dengan Dinas Daerah Tingkat I Jawa Timur wajib diselenggarakan atas dasar hubungan fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.

c. Kepala Dinas Daerah Tingkat II Lamongan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, baik dalam

- tinggungan dinasnya, maupun dalam hubungan antar dinas/instansi lainnya.
- d. Kepala Dinas Daerah Tingkat II Lamongan dalam menjalankan fungsinya berdasarkan atas kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- e. Kepala Dinas bertugas memberikan petunjuk, membimbing dan membantu pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam tinggungan dinasnya.
- f. Kepala Dinas harus memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, maka terlebih dahulu harus diajukan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan keputusan.
- g. Tata kerja dinas vertikal.
- h. Mengindahkan pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk dan instruksi-instruksi pemerintah dan departemen atasannya mengenai pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- i. Melaporkan kepada Kepala Daerah Tingkat II Lamongan mengenai penerimaan biaya dan mengindahkan petunjuk Kepala Daerah dalam rangka memperancar pelaksanaan pembangunan.
- j. menerima saran dan pertimbangan Kepala Daerah guna diteruskan kepada departemen yang bersangkutan untuk mendapatkan perhatian.
- k. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan dinas-dinas vertikal lainnya dan dinas atau badan pelaksana yang pembangunan lainnya serta jawatan-jawatan tingkat daerah yang berkepentingan atas dasar hubungan fungsional.

a. Memberikan laporan secara berkala kepada instansi atasannya dan kepada Kepala Daerah Tingkat II.

f. Apabila perlu untuk kelancaran tugasnya dapat meminta bantuan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya.

Dalam melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan wilayah pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan pelaksanaan tugas Departemen Dalam Negeri di Kabupaten Lamongan, baik yang bersifat rutin maupun pembangunan, maka Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan dalam tugasnya dibantu oleh Inspektori Wilayah Kabupaten yang kadukannya secara teknis operasional langsung berada dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Inspektori Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pembinaan dan pengembangan kota merupakan masalah yang menyangkut berbagai bidang disiplin. Oleh karena itu dalam tata kerja pelaksanaan pengembangan perkotaan, selain integrasi dan koordinasi dari pada aparat pelaksana yang formal, maka perlu dilibatkan personalia/tenaga ahli yang bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang disiplinnya seperti tenaga ahli keuangan dan perbendaharaan, tenaga ahli perencanaan kota dan daerah, ahli pertanahan, ahli sipil konstruksi, ahli pertanian, ahli hukum, ahli administrasi dan lain sebagainya. Keterpaduan ini ditujukan dalam rangka pembinaan kota, yaitu untuk memberikan pengarahan, bimbingan serta melakukan

Sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri no. 2 Tahun 1987 yang merupakan Pedoman Penyusunan Rencana Kota sebagai pengisi kekosongan perundangan pembinaan kota yang menggantikan Undang-undang Pembinaan Kota (SVQ/SVV) yang sudah tidak sesuai lagi, maka proses pemberian kekuatan hukum untuk RUTRK dengan kedalaman RUTRK Kedungpring perlu adanya penyesahan (diperdakan).